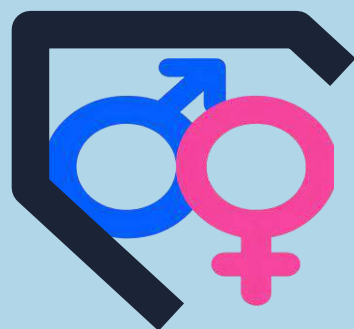




Pemerintah Daerah
Kota Payakumbuh

PROFIL GENDER KOTA PAYAKUMBUH TAHUN **2026**



Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana



(DP3AP2KB)

Jl. Balai Polam No. 2 Kelurahan Tanjung Gadang Sei Pinago (26225)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanallahu wata'ala atas segala kenikmatan, kelancaran, serta rahmat-Nya yang tak ternilai sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Profil Gender Kota Payakumbuh Tahun 2026. Penyusunan buku ini berpedoman pada peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak.

Data Gender menjadi elemen penting bagi terselenggaranya Pengarusutamaan Gender (PUG). Data Gender yang komprehensif dan terkini membantu para pengambil kebijakan untuk memberikan gambaran secara spesifik mengenai peran, situasi, dan kondisi perempuan dan laki-laki di Kota Payakumbuh.

Penggunaan Data dapat menjadi bahan acuan dan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai komitmen Pemerintah Kota Payakumbuh dalam mewujudkan pembangunan gender yang responsif.

Tersusunnya Buku Profil Gender Kota Payakumbuh merupakan wujud dari pentingnya Data Gender dalam

mendukung pembangunan gender yang responsif. Kami ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak dan dengan segala hormat dan kerendahan hati disampaikan rasa terima kasih Kerjasama semua pihak dalam penyusunan buku Profil Perempuan Kota Payakumbuh. Saya menyadari bahwa buku profil ini masih jauh dari sempurna dan dengan segala keterbatasan yang ada. Oleh sebab itu, kritik dan masukan yang membangun kami harapkan dari para pengguna data dan pembaca. Semoga buku profil ini bermanfaat bagi semua pihak yang menggunakannya.

Payakumbuh, 2026

Kepala Dinas P3A&P2KB Kota Payakumbuh



DESMON KORINA, S.IP.M.M
NIP. 19691231 199003 2 016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	
1.2. Tujuan	1
BAB II. PEREMPUAN DAN PENDIDIKAN	3
2.1. Latar Belakang	
2.2. Defenisi Konseptual	4
2.3. Pembahasan.....	6
BAB III. PEREMPUAN DAN KESEHATAN	14
3.1. Latar Belakang	
3.2. Defenisi Konseptual	33
3.3. Pembahasan.....	34
BAB IV. PEREMPUAN DAN DUNIA KERJA	46
KETENAGAKERJAAN	
4.1.Latar Belakang	
4.2. Defenisi Konseptual	84
4.3. Pembahasan.....	86
BAB V. PEREMPUAN DAN ILMU PENGETAHUAN,	99
TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI	
(IP-TIK)	
5.1. Latar Belakang	
5.2. Defenisi Konseptual	124
5.3. Pembahasan.....	126
BAB VI. KEPEMIMPINAN PEREMPUAN	129
6.1. Latar Belakang	
6.2. Defenisi Konseptual	133
6.3. Pembahasan.....	135
BAB VII. PEREMPUAN KEPALA RUMAH TANGGA	138
7.1. Latar Belakang	

7.2. Defenisi Konseptual	158
7.3. Pembahasan.....	160
BAB VIII : PEREMPUAN DAN KEKERASAN	164
8.1. Latar Belakang	
8.2. Defenisi Konseptual	179
8.3. Pembahasan.....	181
	190

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik dan Kemampuan Membaca dan Menulis di Kota Payakumbuh Tahun 2025.....	12
Tabel 2.	Jumlah Penduduk Umur 16-59 Tahun Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2025.....	19
Tabel 3.	Jumlah Penduduk Umur 60 Tahun ke Atas Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2025.....	21
Tabel 4.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2025.....	24
Tabel 5.	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2025.....	27
Tabel 6.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2025.....	30
Tabel 7.	Angka Kematian Ibu di Kota Payakumbuh Tahun 2025.....	56
Tabel 8.	Jumlah Penduduk yang Berobat/rawat Jalan dan Rawat Inap Menurut Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2025.....	63

Tabel 9	Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Menurut Jenis Jaminan di Kota Payakumbuh Tahun 2025.....	66
Tabel 10.	Capaian Pertolongan Persalinan menurut Kecamatan Oleh Tenaga Kesehatan di Kota Payakumbuh Tahun 2025.....	70
Tabel 11.	Jumlah Peserta KB Aktif di Kota Payakumbuh Tahun 2025.....	73
Tabel 12.	Cakupan Penduduk Dengan Akses Air Bersih (Layak) Menurut Kecamatan di Kota Payakumbuh Tahun 2025.....	77
Tabel 13.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2025.....	99
Tabel 14.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2025.....	109
Tabel 15.	Jumlah Penduduk Produktif dan Tidak Produktif Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2025.....	112
Tabel 16.	Jumlah Penduduk Bekerja Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2025.....	115
Tabel 17.	Pekerja Di Sektor Formal Menurut Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2025.....	118

Tabel 18.	Tenaga Kerja Migran Antar Negara (AKAN) Menurut Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2025.....	121
Tabel 19.	Persentase Anggota Rumah Tangga berusia 5 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik dan Pengguna Teknologi Informasi Selama Tiga Bulan Terakhir di Kota Payakumbuh Tahun 2025.....	130
Tabel 20.	Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2021-2025.....	139
Tabel 21.	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2025.....	141
Tabel 22.	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2025.....	144
Tabel 23.	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Kepangkat dan Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2025.....	146
Tabel 24.	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Masa Kerja dan Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2025.....	148
Tabel 25.	Persentase Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2025.....	153

Tabel 26.	Persentase Pengurus Partai Politik Menurut Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2025.....	155
Tabel 27.	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2025.....	164
Tabel 28.	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan di Kota Payakumbuh Tahun 2025.....	166
Tabel 29.	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi di Kota Payakumbuh Tahun 2025.....	171
Tabel 30.	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin dan Pekerjaan di Kota Payakumbuh Tahun 2025.....	175
Tabel 31.	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Jenis Kekerasan yang Dialami di Kota Payakumbuh Tahun 2025.....	191
Tabel 32.	Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan Berdasarkan Jumlah Layanan yang Diterima di Kota Payakumbuh Tahun 2025.....	193

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan gerakan untuk memelopori kesejahteraan hidup sekaligus merawat lingkungan sekitar secara berkesinambungan dan merupakan komitmen global dan nasional dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan didasarkan pada hak asasi manusia dan kesetaraan. No one left behind atau tidak ada satupun yang tertinggal menjadi target global dalam (SDGs) yang diharapkan dapat terwujud pada tahun 2030.

Keberhasilan suatu pembangunan sangat tergantung pada sejauh mana keseimbangan partisipasi perempuan dan laki-laki untuk terus didorong secara maksimal pada semua aspek kehidupan. Dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi laki-laki dan perempuan, keterbukaan akses yang setara dan seimbang menjadi prasyarat, sehingga manfaatnya dapat 2 diperoleh dengan adil dan merata. Untuk mewujudkan hal tersebut maka gender equal society harus bisa diwujudkan.

Isu gender merupakan isu permasalahan yang diakibatkan karena adanya kesenjangan atau ketimpangan gender yang berimplikasi adanya diskriminasi terhadap salah satu pihak (perempuan dan laki-laki). Kesamaan kondisi dan kesetaraan

bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak akses yang sama sebagai manusia serta mampu berperandan juga berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan serta kesetaraan dalam menikmati hasil pembangunan merupakan inti dari upaya pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025- 2045. Hal ini sebagai wujud komitmen kehadiran negara dalam upaya memberdayakan serta melindungi perempuan dan anak. Secara statistik, di berbagai bidang capaian, perempuan masih tertinggal dibandingkan laki-laki. Padahal keterlibatan perempuan memiliki peranan yang sangat penting, tidak hanya sebagai penerima manfaat namun juga sebagai pelaku pembangunan. Perempuan memiliki resiliensi dan daya juang untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan orang-orang di sekitarnya.

Terkait dengan salah satu prioritas nasional adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, peningkatan kualitas perempuan kini terus ditingkatkan. Dalam hal ini pemerintah telah berupaya mencapai target khusus terkait arah kebijakan peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda yang salah satunya yaitu peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta

peningkatan kualitas anak. Lima arahan prioritas presiden terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Analisis Profil Gender Kota Payakumbuh adalah Teridentifikasikannya bidang- bidang yang memiliki kesenjangan tinggi antara laki-laki dan perempuan yang meliputi ;

1. Perempuan di bidang pendidikan,
2. Perempuan di bidang kesehatan,
3. Perempuan dan dunia kerja,
4. Perempuan dan Ilmu Pengetahuan, Teknologi
5. Kepemimpinan Perempuan,
6. Perempuan sebagai kepala Rumah Tangga
7. Perempuan dan Kekerasan.

BAB II PEREMPUAN DAN PENDIDIKAN

1. Latar Belakang

Pendidikan dan pembangunan gender memiliki hubungan yang kuat dan saling mendukung. Pendidikan berperan penting dalam mendorong kesetaraan gender, meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan, serta mengubah pola pikir diskriminatif. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan perempuan berdampak positif terhadap Indeks Pembangunan Gender. Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia bergantung pada kualitas pendidikan yang dicapai. Pentingnya pendidikan tercermin dalam UUD 1945 dan GBHN yang menyatakan bahwa pendidikan memiliki andil besar terhadap kemajuan sosial ekonomi dan kesejahteraan suatu bangsa

Setiap penduduk Indonesia berhak atas kehidupan yang layak. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai kehidupan yang layak tersebut adalah melalui pendidikan, dengan pencapaian pendidikan bagi semua lapisan masyarakat (education for all) bagi tua dan muda, miskin maupun kaya, dan laki-laki maupun perempuan.

Salah satu pilar pembangunan pendidikan adalah perluasan dan pemerataan pendidikan dengan indikator antara

lain : Angka Melek Huruf, Pendidikan Tinggi Yang ditamatkan, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka PartisipasiKasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan rata – rata lama sekolah.

Pendidikan Bagi Perempuan Pendidikan adalah salah satu pilar penting dalam pembangunan suatu bangsa. Masa depan yang cerah sebagai wujud keberhasilan pembangunan diciptakan melalui pondasi pendidikan (Wati dkk, 2024). Kunci utama dalam meraih masa depan didasarkan atas kualitas sumber daya yang dimiliki oleh generasi muda. Masa depan yang sejahtera ditentukan oleh generasi muda yang cerdas, berkualitas, dan berkarakter. Tidak terkecuali peran perempuan atau ibu dalam keluarga.

Kesetaraan pendidikan bagi perempuan seperti kaum laki-laki merupakan tujuan ke- ke-5 dari skema pembangunan berkelanjutan (SDGs). Pendidikan yang baik dan berkualitas seharusnya adalah pendidikan yang terbebas dari diskriminasi gender (Trisnawati dan Widiensyah, 2022), yaitu pendidikan yang didasarkan pada kesetaraan hak untuk mengenyam pendidikan setinggi mungkin. Kondisi ini akan berkontribusi pada keberdayaan perempuan. Perempuan berkembang potensi dirinya, sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya (Liliana, 2024). Perempuan tidak hanya sebagai pengelola rumah tangga, yang hanya sibuk dalam urusan domestik tetapi lebih luas karena dukungan pendidikan yang lebih baik.

2.2 Definisi Konseptual

Definisi konseptual yang digunakan pada bab ini merujuk pada laman Sistim Informasi Rujukan Statistik (Sirusa) Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020.

2.2.1 Angka Melek Huruf

Melek huruf merupakan kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya. Angka melek huruf digunakan untuk melihat persentase penduduk pada kelompok usia tertentu yang dapat membaca sekaligus menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya seperti huruf jawa, huruf kanji atau huruf lainnya terhadap seluruh penduduk pada kelompok usia tersebut. Angka melek huruf ini berkorelasi dengan proporsi Angka Buta Huruf (ABH), jumlah yang menunjukkan proporsi penduduk di usia tertentu yang tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Angka melek huruf dilihat pada penduduk usia 15 tahun sampai 59 tahun, demikian juga angka buta huruf merujuk pada rentang usia yang digunakan pada angka melek huruf.

Angka melek huruf digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah. Indikator melek huruf mengindikasikan adanya kemampuan literasi dasar yang dimiliki penduduk yang dapat berguna untuk mengakses informasi dan pengetahuan, serta memperluas ilmu pengetahuan

yang dimiliki. Dengan demikian, Angka Melek Huruf digunakan sebagai indikator penting yang dapat menjadi acuan dalam melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan atau tidak (Sirusa.bps.go.id)

2.2.2 Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi sesuai tingkatan sekolah yang dijalaninya. Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan diukur melalui kepemilikan tanda tamat sekolah atau ijazah (Sirusa.bps.go.id).

Pendidikan yang ditamatkan dapat diperoleh melalui salah satu dari dua sistem pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu pendidikan formal dan nonformal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SMA/MA/ sederajat, dan PT. Pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, seperti pendidikan kecakapan hidup (kursus), pendidikan anak usia dini (PAUD) atau prasekolah, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (paket A, paket B, dan paket C) serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Pendidikan formal

dan non formal ini dapat diselenggarakan oleh Lembaga/institusi pendidikan negeri maupun swasta.

Beberapa istilah yang digunakan dalam menjelaskan pendidikan yang ditamatkan adalah:

- a. Tidak memiliki Ijazah menjelaskan tentang status penduduk yang belum pernah sekolah, termasuk penduduk yang sudah tamat atau belum tamat Taman Kanak-kanak dan tidak melanjutkan pendidikannya di tingkat sekolah dasar.
- b. SD/Sederajat Tamat Sekolah Dasar (SD) merupakan kategori bagi mereka yang tamat Sekolah Dasar. Sederajat dengan SD adalah Madrasah Ibtidaiyah dan sekolah yang setara dengannya, termasuk Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar, Sekolah Dasar Kecil, Sekolah Dasar Pamong, Paket A dan memperoleh ijazah persamaan SD, SD Proyek Perintis Sekolah Pembangunan dan SD Indonesia (di Luar Negeri).
- c. SMP/Sederajat Tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah merupakan kategori bagi mereka yang tamat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. Sekolah yang setara dengan SMP di antaranya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), Hoogere Burgerschool (HBS) 3 tahun, Sekolah Luar Biasa Lanjutan Tingkat Pertama, SLTP Proyek Perintis Sekolah Pembangunan, SLTP Indonesia (di Luar Negeri) dan SLTP Olahraga, dan Paket B dan memperoleh ijazah persamaan SMP.
- d. SMA/Sederajat Tamat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah adalah kategori bagi mereka yang

tamat Sekolah Menengah Umum/Madrasah Aliyah atau sekolah yang setara misalnya: Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Hoogere Burgerschool (HBS) 5 tahun, Algemene Middelbare School (AMS), Sekolah Lanjutan Persiapan Pembangunan, SLTA Proyek Perintis Sekolah Pembangunan, SLTA Indonesia (di Luar Negeri), dan SLTA para atlet, dan Paket B dan memperoleh ijazah persamaan SMA.

- e. Diploma I-IV dan S1 Tamat Diploma Tamat Program Diploma I/II adalah pendidikan yang khusus diberikan untuk program diploma. Program Akta I dan II termasuk dalam jenjang pendidikan program DI/DII. Bagi mereka yang tamat program DI/DII pada suatu fakultas yang tidak mengeluarkan gelar Sarjana Muda maka mahasiswa yang duduk di tingkat 4 dan 5 tetap dicatat sebagai tamat Sekolah Menengah Umum atau Sekolah Menengah Kejuruan. Untuk Tamat Program Diploma III adalah kategori bagi mereka yang tamat Akademi/ Diploma III, tamat program Akta III atau yang telah mendapatkan gelar Sarjana Muda pada suatu fakultas, dan Tamat Program Diploma IV/S1 adalah kategori bagi mereka yang tamat program pendidikan Diploma IV dan Sarjana pada suatu Universitas/Institut/Sekolah Tinggi, sedangkan Program Akta IV sejajar dengan jenjang Diploma IV.
- f. S2/S3 Tamat Program S2/S3 adalah kategori bagi mereka yang tamat program pendidikan Pasca Sarjana dan Doktor atau Spesialisasi I dan II pada suatu Universitas atau Perguruan tinggi (sirusa.bps.go.id).

2.2.3 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Penghitungan APK dikelompokkan berdasarkan kelompok umur sesuai jenjang pendidikan tersebut. APK tingkat SD/ sederajat memperhitungkan penduduk di rentang umur 7-12 tahun, APK tingkat SMP/ sederajat memperhitungkan penduduk di rentang umur 13-15 tahun, APK tingkat SMA/ sederajat memperhitungkan penduduk di rentang umur 16- 18 tahun, dan APK tingkat perguruan tinggi memperhitungkan penduduk di rentang umur 19-24 tahun (sirusa.bps.go.id). APK digunakan untuk menunjukkan besaran umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan.

APK juga dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. Selain itu, APK juga digunakan sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu, akan tetapi usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya. Oleh karena itu, nilai APK bisa lebih

dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya (Sirusa.bps.go.id)

2.2.4 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Penghitungan APM merujuk pada jumlah murid di tingkatan pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk di usia sekolah di jenjang umur tersebut. Sebagai contoh, APM untuk tingkat SD/ sederajat akan menghitung jumlah siswa dalam rentang usia 7-12 tahun dibagi jumlah penduduk umur 7-12 tahun. Usia 7-12 tahun merupakan usia tepat waktu bagi penduduk dalam menempuh pendidikan di tingkat SD/ sederajat. Metode ini akan menghasilkan nilai APM dalam rentang kisaran 0-100. Bila seluruh anak usia sekolah

dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen.

APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai jenjang pendidikannya di umur yang seharusnya berada di tingkatan jenjang pendidikan tersebut. Dengan demikian, APM digunakan untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. APM juga digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah (Sirusa.bps.go.id). Nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan, sedangkan APM hanya sebatas usia pada jenjang yang bersesuaian (KEMEN PPPA, 2019)

2.2.5 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah diukur melalui rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk di jenjang pendidikan tertentu. Rata-rata lama sekolah dilakukan pada penduduk mulai usia 15 tahun ke atas untuk melihat jumlah tahun efektif bersekolah formal yang sudah dicapai penduduk dalam menempuh semua jenjang pendidikan formal

yang pernah dijalaninya. Untuk penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat Sekolah Menengah diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun (sirusa.bps.go.id). Rata-rata ini dilakukan dengan tanpa memperhitungkan apakah penduduk tersebut menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang ditetapkan karena alasan tertentu, misalnya pernah tinggal kelas, pernah melakukan berhenti sementara (cuti), atau pernah mengulang tingkat jenjang atau kelas tertentu karena alasan khusus. Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah merujuk pada 4 informasi berikut, 1) partisipasi sekolah, 2) jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki 3) Ijasah tertinggi yang dimiliki dan 4) tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki (sirusa.bps.go.id).

Interpretasi pada hasil rata-rata lama sekolah bermakna bahwa semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah, maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan seseorang. Melalui indikator ini, dapat terlihat sampai sejauh mana kemampuan penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Dengan demikian, data yang ditunjukkan dalam hasil rata-rata lama sekolah ini dapat menginformasikan tentang kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal.

2.3 Pembahasan

2.3.1 Kemampuan Baca Tulis

Kemampuan baca tulis perempuan merupakan salah satu indikator penting dalam melihat tingkat pendidikan dan kualitas sumber daya manusia perempuan di suatu masyarakat. Kemampuan ini tidak hanya berkaitan dengan keterampilan membaca dan menulis, tetapi juga mencerminkan akses perempuan terhadap pendidikan, informasi, serta kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Secara konseptual, kemampuan baca tulis perempuan adalah kecakapan perempuan dalam memahami, membaca, dan menuliskan informasi menggunakan bahasa tertentu untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Kemampuan tersebut menjadi dasar bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan.

Tingkat kemampuan baca tulis perempuan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi keluarga, akses pendidikan, lingkungan sosial, budaya masyarakat, serta dukungan keluarga. Dalam beberapa masyarakat, perempuan masih menghadapi hambatan pendidikan akibat adanya pandangan budaya yang membatasi peran perempuan hanya pada ranah domestik. Kondisi tersebut dapat menyebabkan rendahnya tingkat literasi perempuan dibandingkan laki-laki.

Kemampuan baca tulis yang baik memberikan dampak positif bagi perempuan, antara lain meningkatkan pengetahuan,

memperluas wawasan, mempermudah akses informasi, serta meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan. Selain itu, perempuan yang memiliki kemampuan baca tulis yang baik cenderung lebih mampu mendidik anak, mengelola ekonomi keluarga, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, peningkatan kemampuan baca tulis perempuan menjadi salah satu upaya penting dalam mendukung kesetaraan gender dan pembangunan masyarakat. Pendidikan yang merata bagi perempuan diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup perempuan serta memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan sosial dan ekonomi.

Untuk capaian penduduk 15 Tahun ke Atas menurut karakteristik dan kemampuan membaca dan menulis di Kota Payakumbuh Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik
dan Kemampuan Membaca dan Menulis di Kota Payakumbuh
Tahun 2025

No	Kemampuan Membaca & Menulis	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Huruf Latin	99,80	99,75
2	Huruf Lainnya	46,76	46,61
Jumlah/Total		99,77	46,68
2024		99,68	31,54

Sumber : BPS Kota Payakumbuh

Dari Tabel 1 terlihat bahwa kemampuan membaca dan menulis penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Payakumbuh

Tahun 2025 sudah sangat tinggi, baik pada laki-laki maupun perempuan. Kemampuan membaca dan menulis huruf latin tercatat sebesar 99,80 persen pada laki-laki dan 99,75 persen pada perempuan. Angka ini menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk dewasa di Kota Payakumbuh telah memiliki kemampuan dasar literasi yang baik. Kondisi tersebut mencerminkan keberhasilan pembangunan pendidikan dan meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan formal maupun nonformal.

Sementara itu, kemampuan membaca dan menulis huruf lainnya tercatat sebesar 46,76 persen pada laki-laki dan 46,61 persen pada perempuan. Persentase ini menunjukkan bahwa kemampuan literasi selain huruf latin, seperti huruf Arab atau aksara lainnya, masih berada pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan kemampuan membaca dan menulis huruf latin. Meski demikian, capaian antara laki-laki dan perempuan relatif seimbang, sehingga tidak terdapat kesenjangan gender yang signifikan dalam kemampuan tersebut.

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, kemampuan membaca dan menulis huruf latin mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 persentase penduduk yang mampu membaca dan menulis tercatat sebesar 99,68 persen, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi 99,77 persen. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam kualitas sumber daya manusia di Kota Payakumbuh, terutama dalam aspek pendidikan dan literasi masyarakat.

Bagi perempuan, tingginya tingkat kemampuan membaca dan menulis menjadi indikator penting dalam pembangunan gender. Literasi yang baik akan mendukung perempuan dalam mengakses informasi, meningkatkan keterampilan, memperluas kesempatan kerja, serta berpartisipasi lebih aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Selain itu, kemampuan membaca dan menulis juga berperan dalam meningkatkan kualitas keluarga, karena perempuan umumnya memiliki peran penting dalam pendidikan anak dan pengelolaan rumah tangga.

Secara umum, data ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam kemampuan baca tulis di Kota Payakumbuh sudah cukup baik. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan sangat kecil, sehingga dapat diartikan bahwa perempuan telah memperoleh akses pendidikan yang hampir setara dengan laki-laki. Kondisi ini menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan perempuan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kota Payakumbuh.

2.3.2 Pendidikan Tertinggi

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan salah satu indikator penting dalam melihat kualitas sumber daya manusia berdasarkan profil gender. Tingkat pendidikan yang dicapai perempuan dan laki-laki dapat menggambarkan akses, kesempatan, serta partisipasi dalam memperoleh pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan, maka semakin besar peluang seseorang untuk meningkatkan kualitas

hidup, memperoleh pekerjaan yang lebih baik, serta berpartisipasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

Dalam profil gender, pendidikan tertinggi juga menunjukkan adanya kesetaraan atau kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan. Perempuan yang memiliki tingkat pendidikan tinggi cenderung lebih mandiri, memiliki pengetahuan yang luas, serta mampu berperan aktif dalam keluarga maupun masyarakat. Sementara itu, laki-laki dengan pendidikan yang tinggi juga memiliki peluang lebih besar dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan keluarga.

Perkembangan pendidikan saat ini menunjukkan bahwa akses pendidikan bagi perempuan semakin meningkat. Hal ini terlihat dari semakin banyak perempuan yang mampu menamatkan pendidikan hingga jenjang menengah maupun perguruan tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi perempuan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesetaraan gender.

Namun demikian, masih terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tingkat pendidikan tertinggi berdasarkan gender, seperti kondisi ekonomi keluarga, budaya, akses pendidikan, serta lingkungan sosial. Pada beberapa wilayah, perempuan masih menghadapi hambatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari pemerintah, keluarga, dan

masyarakat untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan.

Dengan meningkatnya tingkat pendidikan tertinggi baik pada laki-laki maupun perempuan, diharapkan kualitas sumber daya manusia semakin baik dan kesenjangan gender dalam bidang pendidikan dapat terus berkurang. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kota Payakumbuh Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2
Jumlah Penduduk Umur 16-59 Tahun Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2025

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Tidak Memiliki Ijazah	2.452	1.724
2	SD/Sederajat	5.534	3.871
3	SMP/Sederajat	8.215	7.158
4	SMA/Sederajat	24551	22.810
5	D1-D4/S1	6.335	10.238
6	S2/S3	380	477
Jumlah/Total		47.467	46.278
2024		46.965	88.530

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Payakumbuh

Berdasarkan data persentase penduduk usia 16–59 tahun menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin di Kota Payakumbuh tahun 2025, terlihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat didominasi oleh penduduk dengan pendidikan SMA/ sederajat, baik laki-laki maupun perempuan. Jumlah laki-laki pada jenjang SMA/ sederajat tercatat sebanyak 24.551 orang, sedangkan perempuan sebanyak 22.810 orang. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia produktif

telah mencapai pendidikan menengah atas, yang mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan.

Pada jenjang pendidikan rendah, yaitu tidak memiliki ijazah, jumlah laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Laki-laki yang tidak memiliki ijazah berjumlah 2.452 orang, sedangkan perempuan sebanyak 1.724 orang. Kondisi yang sama juga terlihat pada jenjang SD/ sederajat dan SMP/ sederajat. Pada tingkat SD/ sederajat terdapat 5.534 laki-laki dan 3.871 perempuan, sedangkan pada tingkat SMP/ sederajat terdapat 8.215 laki-laki dan 7.158 perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki masih mendominasi kelompok pendidikan dasar hingga menengah pertama.

Namun, pada jenjang pendidikan tinggi terjadi kondisi yang berbeda. Pada tingkat D1–D4/ S1, jumlah perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Perempuan tercatat sebanyak 10.238 orang, sedangkan laki-laki sebanyak 6.335 orang. Begitu pula pada jenjang S2/ S3, perempuan berjumlah 477 orang dan laki-laki sebanyak 380 orang. Data ini menunjukkan bahwa perempuan di Kota Payakumbuh memiliki partisipasi yang cukup tinggi dalam pendidikan tinggi, bahkan melampaui laki-laki.

Secara keseluruhan, data tersebut menggambarkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat usia produktif di Kota Payakumbuh sudah cukup baik, terutama pada jenjang SMA/ sederajat. Selain itu, terdapat kecenderungan bahwa

perempuan memiliki capaian pendidikan tinggi yang lebih baik dibandingkan laki-laki. Kondisi ini dapat menjadi indikator meningkatnya kesadaran dan kesempatan perempuan dalam memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Payakumbuh.

Tabel 3
Jumlah Penduduk Umur 60 Tahun ke Atas Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2025

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Tidak Memiliki Ijazah	200	256
2	SD/Sederajat	2.985	4.015
3	SMP/Sederajat	1.225	1.556
4	SMA/Sederajat	2.441	2.316
5	D1-D4/S1	1.030	1.341
6	S2/S3	111	38
Jumlah/Total		7.992	9.522
2024		7.590	9.050

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Payakumbuh

Berdasarkan data persentase penduduk usia 60 tahun ke atas menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin di Kota Payakumbuh tahun 2025, terlihat bahwa sebagian besar penduduk lanjut usia masih didominasi oleh tingkat pendidikan dasar, khususnya SD/ sederajat. Jumlah perempuan pada jenjang SD/ sederajat tercatat lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu sebanyak 4.015 orang, sedangkan laki-laki berjumlah 2.985 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk

lansia memperoleh pendidikan formal hanya sampai tingkat dasar.

Pada kategori tidak memiliki ijazah, jumlah perempuan juga lebih banyak dibandingkan laki-laki. Perempuan yang tidak memiliki ijazah tercatat sebanyak 256 orang, sedangkan laki-laki sebanyak 200 orang. Hal ini menggambarkan bahwa pada masa lalu akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya perempuan, masih terbatas sehingga masih terdapat penduduk lanjut usia yang belum memiliki ijazah formal.

Pada jenjang SMP/ sederajat, jumlah perempuan mencapai 1.556 orang dan laki-laki sebanyak 1.225 orang. Sementara itu, pada tingkat SMA/ sederajat, jumlah laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan, yaitu 2.441 orang berbanding 2.316 orang. Data ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan menengah atas pada kelompok lansia relatif lebih rendah dibandingkan pendidikan dasar.

Pada jenjang pendidikan tinggi D1-D4/S1, jumlah perempuan kembali lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Perempuan tercatat sebanyak 1.341 orang, sedangkan laki-laki sebanyak 1.030 orang. Akan tetapi, pada jenjang S2/S3, laki-laki lebih mendominasi dengan jumlah 111 orang, sedangkan perempuan hanya 38 orang. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan kesempatan pendidikan pada masa lalu yang lebih banyak diberikan kepada laki-laki untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang pascasarjana.

Secara keseluruhan, jumlah penduduk perempuan usia 60 tahun ke atas di Kota Payakumbuh lebih banyak dibandingkan laki-laki, yaitu 9.522 perempuan dan 7.992 laki-laki. Data tersebut menunjukkan bahwa kelompok lansia di Kota Payakumbuh masih didominasi oleh pendidikan dasar, meskipun sebagian kecil telah mencapai pendidikan tinggi. Kondisi ini mencerminkan perkembangan akses pendidikan pada masa lampau yang masih belum merata, terutama bagi generasi lanjut usia.

2.3.4 Partisipasi Sekolah

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK ini digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. Nilai APK bisa lebih besar dari 100 % karena terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah dan terletak pada daerah perbatasan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenis Kelamin
di Kota Payakumbuh Tahun 2025

No	Kecamatan	SD			SLTP		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	Payakumbuh Utara	155.65	152.78	154.24	225.68	223.52	224.63
2	Payakumbuh Selatan	90.06	88.83	89.49	23.66	24.47	24.07
3	Payakumbuh Barat	99.05	99.28	99.16	67.94	65.41	66.72
4	Payakumbuh Timur	89.97	93.70	91.49	110.88	112.60	111.69
5	Lamposi Tigo Nagori	44.64	51.74	48.17	0.00	0.00	0.00
Jumlah/Total		104.47	106.02	105.21	105.39	104.54	104.98
2022		55,08	51,13	106,21	69,84	69,79	139,62
2023		98,07	97,46	97,77	101,74	106,87	104,18
2024		98,18	98,13	104,62	101,74	106,87	102,65

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh

Berdasarkan data Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenis kelamin di Kota Payakumbuh tahun 2025, terlihat bahwa tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang SD dan SLTP menunjukkan kondisi yang cukup baik. APK digunakan untuk menggambarkan tingkat partisipasi penduduk dalam mengikuti pendidikan pada jenjang tertentu tanpa membedakan usia peserta didik. Semakin tinggi nilai APK, maka semakin besar tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

Pada jenjang SD, Kecamatan Payakumbuh Utara memiliki APK tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya. APK laki-laki tercatat sebesar 155,65%, perempuan 152,78%, dan total laki-laki serta perempuan mencapai 154,24%. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah peserta didik SD tidak hanya berasal dari kelompok usia sekolah dasar, tetapi juga terdapat peserta didik yang berada di luar usia ideal sekolah.

Sementara itu, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori memiliki APK SD terendah dengan total sebesar 48,17%, terdiri dari 44,64% laki-laki dan 51,74% perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan dasar di kecamatan tersebut masih relatif rendah dibandingkan wilayah lainnya.

Pada jenjang SLTP, Kecamatan Payakumbuh Utara kembali menunjukkan APK tertinggi, yaitu sebesar 224,63% dengan rincian 225,68% laki-laki dan 223,52% perempuan. Tingginya APK pada tingkat SLTP mengindikasikan adanya peserta didik yang berusia di luar kelompok usia ideal sekolah menengah pertama. Sebaliknya, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori menunjukkan nilai APK SLTP sebesar 0,00%, yang menandakan tidak adanya data peserta didik SLTP pada wilayah tersebut atau masih sangat rendahnya partisipasi pendidikan tingkat menengah pertama.

Secara keseluruhan, total APK Kota Payakumbuh tahun 2025 pada jenjang SD mencapai 105,21%, terdiri dari 104,47% laki-laki dan 106,02% perempuan. Pada jenjang SLTP, total APK mencapai 104,98%, dengan 105,39% laki-laki dan 104,54% perempuan. Data ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan di Kota Payakumbuh secara umum sudah berada pada kategori baik karena telah mencapai di atas 100%.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, APK Kota Payakumbuh mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023, APK SD tercatat sebesar 97,77%, sedangkan pada tahun 2025

meningkat menjadi 105,21%. Demikian juga pada jenjang SLTP, APK tahun 2023 sebesar 104,18% dan meningkat menjadi 104,98% pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan, baik pada jenjang SD maupun SLTP.

Secara umum, data tersebut menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan di Kota Payakumbuh sudah cukup tinggi. Selain itu, partisipasi pendidikan antara laki-laki dan perempuan terlihat relatif seimbang, sehingga menunjukkan adanya pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan atau dengan arti sederhana bahwa APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu dan nilai APM akan selalu lebih rendah dari nilai APK. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau yang terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya *under estimate* karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di setiap jenjang pendidikan tertentu.

Tabel 5
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin
di Kota Payakumbuh Tahun 2025

No	Kecamatan	SD			SLTP		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	Payakumbuh Utara	140.86	137.88	139.39	189.59	179.01	183.89
2	Payakumbuh Selatan	80.84	80.30	80.58	20.50	18.43	19.44
3	Payakumbuh Barat	91.11	91.01	91.06	57.59	52.97	55.37
4	Payakumbuh Timur	83.08	85.75	84.33	92.44	96.82	94.33
5	Lamposi Tigo Nagori	41.67	46.44	43.93	0.00	0.00	0.00
Jumlah/Total		95.50	96.45	95.95	88.34	85.17	86.81
2022		49,63	45,95	95,58	56,05	56,03	112,08
2023		88,38	87,89	88,14	82,79	86,82	84,71
2024		91,10	91,19	91,15	77,80	78,29	77,56

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh

Berdasarkan data Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenis kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2025, terlihat bahwa tingkat partisipasi sekolah penduduk usia sekolah pada jenjang SD dan SLTP secara umum menunjukkan capaian yang cukup baik. APM menggambarkan persentase penduduk usia sekolah tertentu yang bersekolah tepat pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya. Semakin tinggi nilai APM, maka semakin besar penduduk usia sekolah yang memperoleh pendidikan sesuai jenjangnya.

Pada jenjang SD, APM Kota Payakumbuh tahun 2025 tercatat sebesar 95,95 persen, terdiri dari 95,50 persen laki-laki dan 96,45 persen perempuan. Data ini menunjukkan bahwa partisipasi sekolah perempuan pada jenjang SD sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa akses pendidikan dasar bagi anak perempuan di Kota

Payakumbuh sudah berjalan dengan sangat baik dan relatif setara dengan laki-laki.

Sementara itu, pada jenjang SLTP, APM Kota Payakumbuh mencapai 86,81 persen, dengan rincian 88,34 persen untuk laki-laki dan 85,17 persen untuk perempuan. Angka ini menunjukkan bahwa partisipasi sekolah pada tingkat SLTP masih cukup tinggi, meskipun lebih rendah dibandingkan jenjang SD. Terdapat sedikit kesenjangan gender pada jenjang ini, di mana partisipasi laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal tersebut dapat menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan keberlanjutan pendidikan anak perempuan hingga jenjang pendidikan menengah pertama.

Jika dilihat menurut kecamatan, terdapat variasi capaian APM yang cukup beragam. Kecamatan Payakumbuh Utara memiliki nilai APM tertinggi baik pada jenjang SD maupun SLTP, yaitu masing-masing sebesar 139,39 persen dan 183,89 persen. Tingginya angka tersebut menunjukkan besarnya jumlah peserta didik yang bersekolah di wilayah tersebut, termasuk kemungkinan adanya siswa dari luar kelompok usia resmi atau dari wilayah lain yang bersekolah di kecamatan tersebut. Sebaliknya, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori memiliki APM terendah, khususnya pada jenjang SLTP yang tercatat 0,00 persen. Kondisi ini perlu mendapat perhatian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi sekolah di wilayah tersebut.

Dari sisi perkembangan tahunan, APM Kota Payakumbuh menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada jenjang SD, APM meningkat dari 91,15 persen pada tahun 2024 menjadi 95,95 persen pada tahun 2025. Demikian pula pada jenjang SLTP yang meningkat dari 77,56 persen pada tahun 2024 menjadi 86,81 persen pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan akses dan partisipasi pendidikan di Kota Payakumbuh.

Secara umum, data APM tahun 2025 menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan di Kota Payakumbuh terus mengalami kemajuan, termasuk dalam mendukung kesetaraan gender di bidang pendidikan. Tingginya partisipasi sekolah perempuan, khususnya pada jenjang SD, menjadi indikator positif bahwa perempuan telah memperoleh kesempatan pendidikan yang semakin baik. Ke depan, diperlukan upaya berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan partisipasi sekolah, terutama pada jenjang SLTP dan di wilayah dengan capaian yang masih rendah.

c. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk terhadap fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan

sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Tabel 6
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin
di Kota Payakumbuh Tahun 2025

No	Kecamatan	SD 7-12			SLTP 13-15		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	Payakumbuh Utara	157.37	158.23	157.79	220.83	210.34	215.18
2	Payakumbuh Selatan	81.41	83.42	82.35	26.81	30.21	28.55
3	Payakumbuh Barat	96.62	97.99	97.27	62.30	57.16	59.82
4	Payakumbuh Timur	89.79	91.85	90.75	116.49	138.80	126.88
5	Lamposi Tigo Nagori	43.17	47.05	45.01	0.00	0.00	0.00
Jumlah/Total		104.80	107.09	105.89	103.29	104.02	103.64
2022		55,36	52,22	107,57	70,84	72,79	143,63
2023		96,63	96,83	96,73	87,01	114,97	115,34
2024		96,63	96,83	96,73	87,01	114,97	115,34

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator yang menunjukkan persentase penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah pada kelompok usia tertentu. APS digunakan untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang ditempuh.

Berdasarkan data tahun 2025, APS kelompok usia 7-12 tahun di Kota Payakumbuh mencapai 105,89 persen. APS laki-laki sebesar 104,80 persen, sedangkan perempuan sebesar 107,09 persen. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi sekolah anak perempuan usia SD sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Secara wilayah, Kecamatan Payakumbuh Utara memiliki APS usia 7-12 tahun tertinggi yaitu 157,79 persen, disusul

Payakumbuh Barat sebesar 97,27 persen dan Payakumbuh Timur sebesar 90,75 persen. Sementara itu, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori memiliki APS terendah yaitu 45,01 persen. Tingginya APS di beberapa kecamatan yang melebihi 100 persen dapat dipengaruhi oleh adanya siswa di luar kelompok usia resmi yang masih mengikuti pendidikan pada kelompok usia tersebut.

Pada kelompok usia 13–15 tahun, APS Kota Payakumbuh mencapai 103,64 persen. APS perempuan sebesar 104,02 persen sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebesar 103,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan usia SLTP di Kota Payakumbuh tergolong baik dan relatif merata antara laki-laki dan perempuan.

Kecamatan dengan APS usia 13–15 tahun tertinggi adalah Payakumbuh Utara sebesar 215,18 persen, diikuti Payakumbuh Timur sebesar 126,88 persen. Sebaliknya, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori memiliki APS sebesar 0,00 persen. Perbedaan nilai APS antarwilayah menunjukkan adanya ketimpangan partisipasi sekolah yang perlu mendapat perhatian, terutama pada daerah dengan tingkat partisipasi yang rendah.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, APS tahun 2025 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2023, APS usia 7–12 tahun tercatat sebesar 96,73 persen dan meningkat menjadi 105,89 persen pada tahun 2025. Demikian pula APS usia 13–15 tahun meningkat dari 115,34 persen pada tahun 2023 menjadi

103,64 persen pada tahun 2025, meskipun mengalami fluktuasi dibandingkan data tahun 2022 dan 2024.

Secara umum, APS Kota Payakumbuh Tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sekolah pada usia pendidikan dasar dan menengah pertama sudah cukup tinggi. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antarwilayah yang menunjukkan perlunya pemerataan akses pendidikan agar seluruh anak usia sekolah memperoleh kesempatan pendidikan yang sama.

3.1 Latar Belakang

Kesehatan perempuan merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi kesehatan perempuan tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas hidup perempuan itu sendiri, tetapi juga terhadap kesehatan keluarga, tumbuh kembang anak, serta keberlangsungan pembangunan daerah. Oleh karena itu, informasi mengenai kondisi kesehatan perempuan perlu disajikan secara sistematis, akurat, dan berkelanjutan melalui penyusunan buku profil perempuan.

Buku profil perempuan menjadi sarana penting dalam menggambarkan situasi dan kondisi perempuan di berbagai bidang, termasuk kesehatan. Data dan informasi kesehatan perempuan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat akses pelayanan kesehatan, kesehatan ibu dan anak, status gizi, angka kesakitan, penggunaan fasilitas kesehatan, hingga perilaku hidup sehat perempuan di suatu daerah. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan, penyusunan program, serta evaluasi pembangunan yang responsif gender.

Penyusunan profil perempuan di bidang kesehatan juga penting untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang masih dihadapi perempuan, seperti tingginya risiko kesehatan

reproduksi, keterbatasan akses pelayanan kesehatan, anemia pada perempuan, masalah gizi, serta rendahnya kesadaran terhadap pemeriksaan kesehatan secara rutin. Selain itu, perbedaan kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan wilayah tempat tinggal turut memengaruhi kualitas kesehatan perempuan sehingga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan pemangku kepentingan.

Melalui buku profil perempuan, data kesehatan dapat disajikan secara komprehensif berdasarkan indikator-indikator yang relevan, sehingga mampu memberikan gambaran nyata mengenai capaian pembangunan kesehatan perempuan di daerah. Dengan tersedianya data yang lengkap dan terintegrasi, diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan yang tepat sasaran dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan perempuan serta mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan.

Oleh sebab itu, penyusunan buku profil perempuan dan kesehatan menjadi penting sebagai sumber informasi, bahan evaluasi, dan acuan dalam perencanaan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup perempuan secara berkelanjutan.

3.2 Definisi Konseptual

3.2.1 Kesehatan

UU nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 1 mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sehat, baik secara

fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Definisi ini sama sejalan dengan WHO (1958) yang mendefinisikan kesehatan sebagai suatu kondisi seseorang yang sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, dan tidak hanya (diukur dari) tidak adanya penyakit dan kelemahan pada tubuhnya. Definisi ini menunjukkan pergeseran makna kesehatan yang sebelumnya hanya dilihat dari aspek fisik semata. Karena itu, penyakit tidak lagi dilihat sebagai sebuah kondisi, namun merupakan proses dari dampak yang dialami seseorang karena berbagai faktor yang ada di sekelilingnya, termasuk gaya hidup, pola makan, lingkungan, dan keterjangkauan pada fasilitas kesehatan.

Pembangunan kesehatan di Indonesia dilakukan dengan menerapkan asas perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama (Pasal 2 UU nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan) dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis (pasal 3). Oleh karena itu, pembangunan kesadaran tentang kesehatan dan upaya promosi kesehatan yang terus menerus memungkinkan setiap individu untuk melakukan ikhtiyar dan kontrol atas kesehatannya.

Penilaian atas kesehatan seseorang tidak lagi semata-mata bergantung sepenuhnya pada tenaga medis, namun juga dapat dikembangkan melalui penguatan mental dan kesadaran individu masing-masing sehingga partisipasi masyarakat untuk menciptakan rasa sehat dan meningkatkan kualitas kesehatan diri dan lingkungannya dapat lebih mudah. Lingkungan sehat merupakan kondisi lingkungan yang dapat menopang dan mendukung kesehatan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Di dalam pasal 162 UU nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menekankan tujuan kesehatan lingkungan pada upaya menciptakan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dengan demikian, lingkungan yang sehat tidak berisiko timbulnya suatu penyakit atau risiko lain yang berdampak pada kualitas kesehatan makhluk yang hidup di dalamnya, terutama manusia.

Beberapa indikator lingkungan sehat dalam UU Kesehatan ini dapat dilihat dari ketiadaan unsur-unsur yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain: limbah cair, limbah padat, limbah gas, sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah, binatang pembawa penyakit, zat kimia yang berbahaya, kebisingan yang melebihi ambang batas, radiasi sinar pengion dan non pengion, air yang tercemar, udara yang tercemar, dan makanan yang terkontaminasi.

3.2.2 Lingkungan Sehat

a. Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan

Badan Pusat Statistik mendefinisikan keluhan kesehatan sebagai gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari (www.sirusa.bps.go.id). Gangguan kesehatan fisik dapat berupa sesak nafas, panas, diare, sakit kepala, penyakit kronis dan akut, atau gangguan kesehatan karena kecelakaan. Sedangkan gangguan jiwa atau psikis dapat berupa rasa tertekan atau depresi, gelisah, ketakutan, trauma, skizofrenia, atau gangguan psikis lain yang berkaitan dengan gangguan cara berpikir (cognitive), kemauan (volition), emosi (affective), dan perilaku (psychomotor).

Dalam data BPS, angka kesakitan merujuk pada jumlah penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam satu bulan terakhir dan merasa terganggu kegiatannya sehari-hari dikarenakan keluhan kesehatan dibandingkan jumlah seluruh penduduk. Data keluhan kesehatan dan angka kesakitan ini bermanfaat dalam mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum sebagai basis data yang digunakan untuk mengembangkan upaya pembangunan di bidang kesehatan, yang dapat diakses semua lapisan masyarakat sehingga memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata demi tercapainya derajat kesehatan laki-laki dan perempuan yang terbaik.

b. Jaminan Kesehatan

Jaminan Kesehatan (JKN) merupakan program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. JKN ini bersifat asuransi sosial yang meliputi (1) kegotong-royongan antara yang kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang berisiko tinggi dan rendah; (2) kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak selektif; (3) iuran berdasarkan persentase upah/penghasilan; (4) bersifat nirlaba. Dalam implementasinya, JKN menerapkan prinsip ekuitas yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya yang tidak berkaitan dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya.

Untuk memastikan jaminan kesehatan dapat diakses secara merata oleh seluruh masyarakat, pemerintah membagi peserta JKN (peserta BPJS) melalui dua kelompok, yaitu Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dan Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI JK). Keanggotaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) diprioritaskan pada peserta Jaminan Kesehatan dari kelompok fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah. Sedangkan Peserta bukan PBI jaminan kesehatan terdiri dari: (1) Pekerja penerima upah dan anggota

keluarganya, (2) Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya, dan (3) Bukan pekerja dan anggota keluarganya (www.jkn.kemkes.go.id). Masyarakat yang termasuk non PBI JK diantaranya ASN, TNI, Polri, pegawai swasta, pekerja mandiri, dan pensiunan.

c. Fasilitas Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Kesehatan mendefinisikan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Di dalam pasal 4 disebutkan bahwa fasilitas kesehatan dibagi dalam dua bentuk, yaitu (1) pelayanan kesehatan perseorangan; dan/atau (2) pelayanan kesehatan masyarakat. Berdasarkan jenisnya, fasilitas kesehatan dapat berupa 10 varian berikut ini, yaitu (1) tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, (2) pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), (3) klinik, (4) rumah sakit, (5) apotek, (6) unit transfusi darah, (7) laboratorium kesehatan, (8) optikal, (9) fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan (9) fasilitas pelayanan kesehatan tradisional. Semua jenis fasilitas kesehatan ini dapat diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat (non pemerintah).

Fasilitas kesehatan memiliki tingkatan layanan yang berbeda. Terdapat 4 tingkatan layanan fasilitas kesehatan yang dilakukan berdasarkan jenisnya, yaitu (1) Fasilitas Pelayanan

Kesehatan tingkat pertama memberikan pelayanan kesehatan dasar, (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat kedua memberikan pelayanan kesehatan spesialis (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat ketiga memberikan pelayanan kesehatan subspecialistik, dan (4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat kedua dan tingkat ketiga dapat memberikan pelayanan yang diberikan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat dibawahnya. Untuk memastikan ketercapaian derajat kesehatan masyarakat dengan keterjangkauan fasilitas kesehatan secara merata, UU nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 14-17 menetapkan bahwa pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat yang ramah bagi semua lapisan sosial ekonomi masyarakat, menjamin ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata, dan bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Dalam menentukan jumlah dan jenis fasilitas kesehatan yang dibutuhkan, Pemerintah dapat mempertimbangkan unsur-unsur luas wilayah, kebutuhan kesehatan, jumlah dan persebaran penduduk, pola penyakit, pemanfaatannya, fungsi sosial, dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi (pasal 35). Oleh karena itu, dalam pasal 31 dan 32 dijelaskan bahwa fasilitasn kesehatan wajib memberikan akses yang luas bagi kebutuhan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan

dan dalam keadaan darurat fasilitas kesehatan dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.

d. Tenaga Kesehatan

UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 1 menjelaskan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan dapat berupa dokter, psikolog, perawat, bidan, apoteker, pembimbing kesehatan, tenaga administrasi kesehatan, tenaga biostatistik, tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, ahli gizi, terapis, penata anestesi, radiographer, ahli laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, ortotik prostetik, tenaga kesehatan tradisional berketerampilan, dan tenaga kesehatan tradisional ramuan.

Setiap tenaga kesehatan memiliki kualifikasi minimum yang berbeda-beda. Dalam memastikan mutu profesionalitas tenaga kesehatan, pemerintah wajib mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan (Pasal 21 UU nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). Pasal 26 UU Kesehatan menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan dalam mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk kepentingan pemerataan pelayanan kesehatan dengan tetap memperhatikan hak tenaga kesehatan dan hak masyarakat

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut. Selain mengenai penempatan, UU ini juga mengatur tentang kewenangan tenaga kesehatan untuk menyelenggarakan fasilitas kesehatan sesuai bidang keahliannya dengan izin dari pemerintah. Setiap fasilitas kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat (non pemerintah) dilarang mengutamakan pada kepentingan yang bernilai materi (pasal 23).

e. Keluarga Berencana

Undang-undang nomor Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mendefinisikan Keluarga Berencana sebagai upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas (pasal 1). Keluarga berencana berorientasi pada terwujudnya keluarga yang berkualitas dan sehat, tidak hanya pada anak-anak yang akan dilahirkan, namun terutama pada kesehatan perempuan yang mengemban peran kodrati dalam proses kehamilan dan persalinan. Karena itu, kebijakan pemerintah dalam keluarga berencana berorientasi pada setidaknya di 5 aspek berikut: (1) pengaturan kehamilan yang diinginkan; (2) menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak; (3) meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; (4) meningkatkan partisipasi dan keterlibatan laki-laki dalam praktik keluarga

berencana; dan (5) mempromosikan pemberian ASI sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan (pasal 20-21 UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga).

Dalam memastikan tujuan terbangunnya keluarga berencana tercapai, pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana yang secara spesifik bertujuan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab. Keputusan penting yang terkait dengan keluarga berencana mencakup usia ideal perkawinan, usia ideal untuk melahirkan, jumlah ideal anak, jarak ideal kelahiran anak, dan penyuluhan kesehatan reproduksi (UU No. 52/2009 pasal 21). Selain penguatan dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, UU Kesehatan juga menetapkan kewajiban pemerintah dalam menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana (pasal 77), dan bertanggung jawab dalam menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obat dalam memberikan pelayanan keluarga berencana yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat (pasal 78).

Cara mengatur waktu kehamilan dapat dilakukan secara alami/tradisional dan modern. Contoh kontrasepsi alami adalah senggama terputus (coitus interruptus) dan pantang

berkala/kalender; sedangkan contoh kontrasepsi modern yang digunakan perempuan adalah sterilisasi/tubektomi/MOW, IUD/AKDR/spiral, suntikan, susuk/implan, pil, intravag/kondom wanita/diafragma; menyusui alami (metode amenore laktasi/LAM), metode sympto-thermal (pengecekan perubahan lendir serviks, suhu tubuh dan konsistensi serviks), metode twoday (pengamatan keberadaan lendir serviks), dan kontrasepsi yang digunakan laki-laki adalah sterilisasi/vasektomi/MOP dan kondom.

f. Air Bersih dan Sanitasi Layak Rumah Tangga

Air merupakan sumber daya yang penting bagi kehidupan semua makhluk hidup, termasuk manusia. Air bersih merupakan air yang baik dan dapat dimanfaatkan manusia untuk berbagai aktivitas maupun kebutuhan tubuh (dikonsumsi). Sumber sumber air bersih diantaranya adalah (1) air permukaan tanah berupa air sungai, air danau, dan air laut; (2) air bawah tanah berupa air pegunungan dan air sumur; dan (3) air yang jatuh dari atas melalui proses alami, seperti air hujan dan air embun. Akan tetapi, tidak semua sumber air dapat dikategorisasikan sebagai air layak konsumsi, karena syarat air layak konsumsi harus memenuhi prasyarat kesehatan, yaitu tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Karena itu, air bersih tidak selalu bermakna air tersebut layak dikonsumsi, karena bisa jadi telah tercemar dan berisiko pada kesehatan manusia.

Tersedianya air bersih dan layak ini merupakan bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan 6 SDGs adalah ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Untuk mencapai tujuan ini di tahun 2030, telah ditetapkan 8 target capaian dengan sejumlah indikator kunci. Di antara target capaian yang diharapkan dapat terpenuhi di tahun 2030 nanti adalah akses terhadap air minum layak, akses pada sanitasi yang layak dan sehat, kualitas air dan limbah, pemanfaatan, pengelolaan, dan pelestarian sumber daya air. Indonesia telah mengejawantahkan target dari tujuan 6 SDGs ini melalui sejumlah kebijakan program pembangunan yang ada.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum menegaskan bahwa air minum adalah air yang telah melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (pasal 1).

Badan Pusat Statistik mendefinisikan air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah (www.sirusa.bps.go.id). Akses terhadap sumber air berkualitas dan layak konsumsi bagi rumah tangga, termasuk perempuan dan laki-laki ini penting dianalisis

karena air yang tidak berkualitas dapat menjadi penyebab langsung berbagai penyakit.

3.3 Pembahasan

3.3.1 Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu indikator utama dalam pembangunan manusia yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kondisi kesehatan yang baik tidak hanya memengaruhi produktivitas individu, tetapi juga menentukan tingkat kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks pembangunan gender, kesehatan menjadi aspek strategis karena perempuan memiliki peran ganda, baik sebagai individu, ibu, maupun pengelola kesehatan keluarga.

Derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi lingkungan, perilaku hidup sehat, akses terhadap pelayanan kesehatan, tingkat pendidikan, serta kondisi sosial ekonomi. Akses pelayanan kesehatan yang memadai memungkinkan masyarakat memperoleh pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara optimal. Oleh karena itu, keberadaan fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan program kesehatan masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan penduduk.

Kesehatan perempuan memiliki perhatian khusus karena berkaitan erat dengan kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan

anak, serta keberlangsungan generasi mendatang. Perempuan menghadapi berbagai tantangan kesehatan, mulai dari masa remaja, kehamilan, persalinan, hingga lanjut usia. Permasalahan seperti anemia, gizi buruk, tingginya risiko kematian ibu, serta kurangnya akses informasi kesehatan reproduksi masih menjadi isu yang perlu mendapat perhatian. Upaya peningkatan kesehatan perempuan dapat dilakukan melalui pemerataan pelayanan kesehatan, peningkatan edukasi kesehatan, serta penguatan program kesehatan ibu dan anak.

Selain itu, perilaku hidup bersih dan sehat juga menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap pola makan bergizi, aktivitas fisik, sanitasi lingkungan, serta pemeriksaan kesehatan secara rutin dapat membantu mencegah berbagai penyakit menular maupun tidak menular. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran kesehatan menjadi langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif.

Dalam penyusunan profil perempuan, indikator kesehatan dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti angka harapan hidup, angka kematian ibu, status gizi, tingkat keluhan kesehatan, akses terhadap fasilitas kesehatan, serta kepesertaan jaminan kesehatan. Data tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi kesehatan perempuan dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih responsif gender.

Dengan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, khususnya perempuan, diharapkan dapat tercipta sumber daya manusia yang lebih berkualitas, produktif, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional. Oleh sebab itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait sangat diperlukan dalam mewujudkan derajat kesehatan yang lebih baik dan merata.

a. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur derajat kesehatan dan kualitas hidup penduduk. AHH menunjukkan rata-rata perkiraan lama hidup yang dapat dicapai seseorang sejak lahir apabila pola mortalitas yang berlaku pada saat tertentu tetap berlaku sepanjang hidupnya. Dalam penyusunan profil perempuan, indikator ini memiliki peranan penting karena dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan, kualitas kesehatan, serta keberhasilan pembangunan yang responsif gender.

Tingginya angka harapan hidup perempuan umumnya menunjukkan adanya perbaikan dalam pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas gizi, akses pendidikan yang lebih baik, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola hidup sehat. Perempuan cenderung memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki karena dipengaruhi oleh faktor biologis maupun perilaku kesehatan. Namun demikian, tingginya AHH juga membawa tantangan baru,

terutama terkait kesehatan perempuan lanjut usia yang membutuhkan perhatian khusus dalam aspek pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial.

Angka harapan hidup perempuan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi kesehatan ibu dan anak, akses terhadap fasilitas kesehatan, tingkat pendapatan, sanitasi lingkungan, serta pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat. Semakin baik akses perempuan terhadap pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan reproduksi, maka peluang untuk hidup lebih sehat dan lebih lama akan semakin tinggi. Selain itu, program pemerintah dalam bidang kesehatan seperti imunisasi, jaminan kesehatan, pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan, dan penanganan gizi juga berkontribusi dalam meningkatkan angka harapan hidup perempuan.

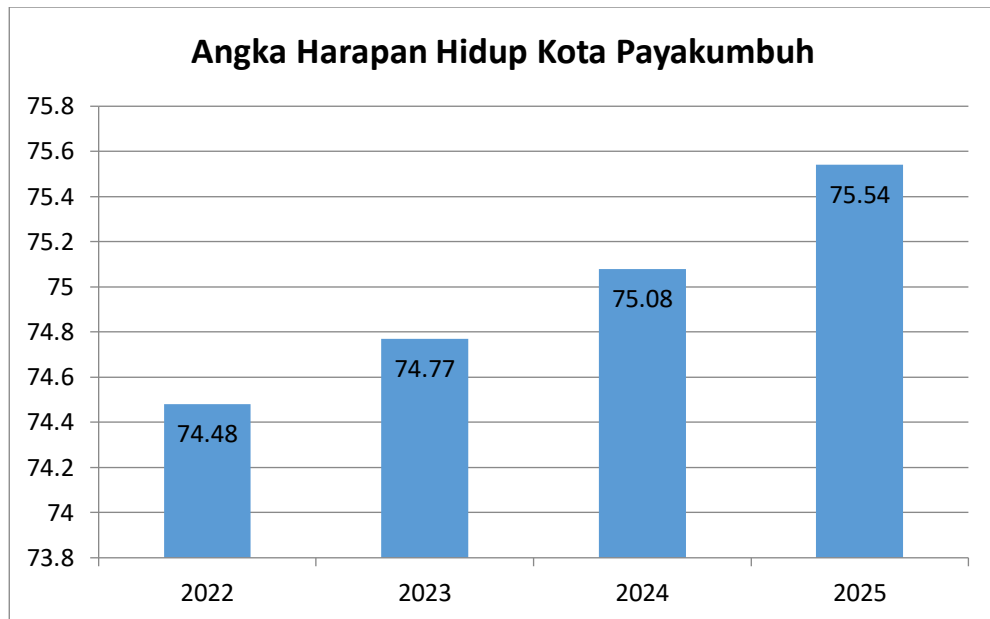
Dalam konteks pembangunan gender, AHH dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup perempuan. Angka harapan hidup yang tinggi mencerminkan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan hidup dalam kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Sebaliknya, rendahnya angka harapan hidup dapat mengindikasikan masih adanya masalah kesehatan, kemiskinan, keterbatasan akses pelayanan kesehatan, atau rendahnya kualitas lingkungan.

Pada penyusunan profil perempuan, data angka harapan hidup dapat dianalisis berdasarkan perkembangan dari tahun ke tahun untuk melihat tren peningkatan atau penurunan kualitas kesehatan perempuan. Analisis tersebut penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan perempuan, perlindungan sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan meningkatnya angka harapan hidup perempuan, diharapkan perempuan dapat berperan lebih aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memperluas akses kesehatan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat guna mendukung peningkatan kualitas hidup perempuan secara menyeluruh.

Angka Harapan Hidup di Kota Payakumbuh Tahun 2014-2023 dapat di lihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1
Angka Harapan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2022-2025



Sumber : BPS Kota Payakumbuh Dalam Angka 2025

Berdasarkan data Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan tahun 2022–2025, terlihat adanya peningkatan secara bertahap dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, angka harapan hidup perempuan tercatat sebesar 74,48 tahun, kemudian meningkat menjadi 74,77 tahun pada tahun 2023. Selanjutnya pada tahun 2024 meningkat kembali menjadi 75,08 tahun, dan pada tahun 2025 mencapai 75,54 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan dan kesejahteraan perempuan mengalami perkembangan yang semakin baik.

Peningkatan angka harapan hidup tersebut mencerminkan adanya perbaikan dalam berbagai aspek pembangunan, khususnya di bidang kesehatan. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, tersedianya fasilitas kesehatan yang lebih memadai, serta meningkatnya kesadaran

masyarakat terhadap pentingnya pola hidup sehat menjadi faktor yang turut mendukung peningkatan usia harapan hidup perempuan. Selain itu, program pemerintah dalam bidang kesehatan ibu dan anak, imunisasi, perbaikan gizi, serta perluasan jaminan kesehatan juga memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan.

Kenaikan angka harapan hidup perempuan juga menunjukkan bahwa tingkat mortalitas perempuan cenderung menurun. Hal ini dapat diartikan bahwa perempuan memiliki peluang hidup yang lebih panjang akibat membaiknya kondisi kesehatan, lingkungan, dan sosial ekonomi masyarakat. Perempuan yang memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan dan informasi kesehatan umumnya lebih mampu menjaga kesehatan diri dan keluarganya, sehingga berdampak pada meningkatnya kualitas hidup secara keseluruhan.

Meskipun demikian, peningkatan angka harapan hidup juga perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas hidup perempuan pada usia lanjut. Semakin tingginya usia harapan hidup menyebabkan jumlah penduduk lanjut usia perempuan juga meningkat, sehingga diperlukan perhatian terhadap pelayanan kesehatan lansia, jaminan sosial, serta dukungan keluarga dan lingkungan agar perempuan lanjut usia tetap sehat, mandiri, dan produktif.

Secara umum, tren peningkatan angka harapan hidup perempuan selama periode 2022–2025 menunjukkan

keberhasilan pembangunan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini menjadi indikator positif dalam penyusunan profil perempuan karena mencerminkan semakin baiknya kualitas hidup perempuan. Oleh karena itu, upaya peningkatan pelayanan kesehatan, perbaikan gizi, edukasi kesehatan, serta penguatan program perlindungan perempuan perlu terus dilakukan agar angka harapan hidup perempuan dapat terus meningkat di masa mendatang.

b. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur derajat kesehatan perempuan, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan kualitas pelayanan kesehatan maternal. AKI menggambarkan jumlah kematian perempuan yang terjadi selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan oleh kondisi terkait kehamilan atau penanganannya, dalam periode tertentu.

Tinggi rendahnya angka kematian ibu mencerminkan tingkat kesejahteraan perempuan, akses terhadap layanan kesehatan, kualitas pelayanan tenaga medis, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penurunan AKI menunjukkan adanya peningkatan pelayanan kesehatan ibu, seperti pemeriksaan kehamilan yang rutin, persalinan yang ditolong tenaga kesehatan, serta akses yang lebih baik terhadap fasilitas kesehatan.

Dalam penyusunan profil perempuan, indikator angka kematian ibu menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan upaya perlindungan hak kesehatan perempuan. Kematian ibu tidak hanya berdampak pada hilangnya kehidupan seorang perempuan, tetapi juga memengaruhi kondisi keluarga dan perkembangan anak yang ditinggalkan. Oleh sebab itu, pemerintah terus melakukan berbagai program untuk menurunkan AKI melalui peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, edukasi kesehatan reproduksi, serta peningkatan gizi ibu hamil.

Faktor-faktor yang menyebabkan kematian ibu umumnya meliputi perdarahan, tekanan darah tinggi dalam kehamilan, infeksi, komplikasi persalinan, dan keterlambatan dalam memperoleh penanganan medis. Selain faktor medis, kondisi sosial seperti rendahnya pendidikan, keterbatasan ekonomi, dan minimnya pengetahuan kesehatan juga turut memengaruhi tingginya risiko kematian ibu.

Dengan demikian, upaya penurunan angka kematian ibu perlu dilakukan secara menyeluruh melalui kerja sama antara pemerintah, tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat. Penurunan AKI diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berperspektif gender dan berkelanjutan.

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur derajat kesehatan perempuan,

khususnya yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan kualitas pelayanan kesehatan maternal. AKI menggambarkan jumlah kematian perempuan yang terjadi selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan oleh kondisi terkait kehamilan atau penanganannya, dalam periode tertentu.

Tinggi rendahnya angka kematian ibu mencerminkan tingkat kesejahteraan perempuan, akses terhadap layanan kesehatan, kualitas pelayanan tenaga medis, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penurunan AKI menunjukkan adanya peningkatan pelayanan kesehatan ibu, seperti pemeriksaan kehamilan yang rutin, persalinan yang ditolong tenaga kesehatan, serta akses yang lebih baik terhadap fasilitas kesehatan.

Dalam penyusunan profil perempuan, indikator angka kematian ibu menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan upaya perlindungan hak kesehatan perempuan. Kematian ibu tidak hanya berdampak pada hilangnya kehidupan seorang perempuan, tetapi juga memengaruhi kondisi keluarga dan perkembangan anak yang ditinggalkan. Oleh sebab itu, pemerintah terus melakukan berbagai program untuk menurunkan AKI melalui peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, edukasi kesehatan reproduksi, serta peningkatan gizi ibu hamil.

Faktor-faktor yang menyebabkan kematian ibu umumnya meliputi perdarahan, tekanan darah tinggi dalam kehamilan,

infeksi, komplikasi persalinan, dan keterlambatan dalam memperoleh penanganan medis. Selain faktor medis, kondisi sosial seperti rendahnya pendidikan, keterbatasan ekonomi, dan minimnya pengetahuan kesehatan juga turut memengaruhi tingginya risiko kematian ibu.

Dengan demikian, upaya penurunan angka kematian ibu perlu dilakukan secara menyeluruh melalui kerja sama antara pemerintah, tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat. Penurunan AKI diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berperspektif gender dan berkelanjutan.

Angka Kematian Ibu di Kota Payakumbuh Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 7
Angka Kematian Ibu di Kota Payakumbuh Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Kematian Ibu			
		< 20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	Jml
1	Payakumbuh Utara	0	0	1	1
2	Payakumbuh Selatan	0	1	0	1
3	Payakumbuh Barat	0	0	0	0
4	Payakumbuh Timur	0	0	0	0
5	Lamposi Tigo Nagori	0	0	0	0
Total/Jumlah		0	1	1	2
2022		0	0	2	2
2023		0	0	4	4
2024		0	0	2	2

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai derajat kesehatan perempuan, khususnya terkait pelayanan kesehatan ibu selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2025, tercatat sebanyak 2 kasus kematian ibu yang tersebar di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Payakumbuh Selatan.

Menurut kelompok umur, kematian ibu pada tahun 2025 terjadi pada kelompok usia 20–34 tahun sebanyak 1 kasus dan kelompok usia ≥ 35 tahun sebanyak 1 kasus, sedangkan pada kelompok usia kurang dari 20 tahun tidak ditemukan kasus kematian ibu. Hal ini menunjukkan bahwa risiko kematian ibu masih dapat terjadi pada usia reproduksi ideal maupun usia reproduksi berisiko tinggi. Kelompok usia ≥ 35 tahun umumnya memiliki risiko komplikasi kehamilan yang lebih tinggi dibandingkan usia reproduksi sehat, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam pelayanan kesehatan maternal.

Dilihat dari persebaran wilayah, Kecamatan Payakumbuh Utara mencatat 1 kasus kematian ibu pada kelompok usia ≥ 35 tahun, sedangkan Kecamatan Payakumbuh Selatan mencatat 1 kasus pada kelompok usia 20–34 tahun. Sementara itu, Kecamatan Payakumbuh Barat, Payakumbuh Timur, dan Lamposi Tigo Nagori tidak mencatat adanya kasus kematian ibu selama tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum pelayanan kesehatan ibu di sebagian besar wilayah Kota

Payakumbuh telah berjalan cukup baik, meskipun upaya pencegahan tetap perlu ditingkatkan.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah kematian ibu di Kota Payakumbuh pada tahun 2025 relatif sama dengan tahun 2022 dan 2024, yaitu masing-masing sebanyak 2 kasus. Namun demikian, angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 4 kasus kematian ibu. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pelayanan kesehatan ibu dan peningkatan perhatian terhadap kesehatan maternal di Kota Payakumbuh.

Berbagai faktor dapat memengaruhi terjadinya kematian ibu, antara lain komplikasi kehamilan dan persalinan, perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, serta keterlambatan dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Selain faktor medis, kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan, pengetahuan kesehatan reproduksi, dan akses terhadap fasilitas kesehatan juga berpengaruh terhadap keselamatan ibu selama masa kehamilan dan persalinan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk menekan angka kematian ibu melalui peningkatan kualitas pelayanan antenatal, persalinan oleh tenaga kesehatan, pemantauan ibu hamil berisiko tinggi, serta edukasi kesehatan reproduksi bagi perempuan dan keluarga. Dengan penanganan yang optimal, diharapkan angka kematian ibu di Kota

Payakumbuh dapat terus menurun sehingga kualitas kesehatan perempuan semakin meningkat.

c. Lingkungan Sehat

Lingkungan sehat merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan. Kondisi lingkungan yang baik akan mendukung terciptanya kesehatan fisik, mental, dan sosial perempuan dalam menjalankan perannya di keluarga maupun masyarakat. Sebaliknya, lingkungan yang kurang sehat dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan, terutama bagi perempuan sebagai kelompok yang memiliki peran besar dalam pengelolaan rumah tangga dan pengasuhan keluarga.

Dalam konteks profil perempuan, lingkungan sehat mencakup ketersediaan air bersih, sanitasi layak, pengelolaan sampah, kondisi rumah tinggal yang sehat, serta lingkungan yang aman dan nyaman. Akses terhadap fasilitas dasar tersebut sangat berpengaruh terhadap kesehatan perempuan, khususnya kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak, serta pencegahan penyakit menular maupun tidak menular.

Perempuan memiliki keterkaitan yang erat dengan kondisi lingkungan karena sebagian besar aktivitas domestik dilakukan di lingkungan rumah tangga. Ketersediaan air bersih dan sanitasi yang memadai, misalnya, sangat penting untuk menjaga kebersihan diri dan keluarga serta mencegah penyakit berbasis lingkungan. Selain itu, lingkungan rumah yang sehat dengan ventilasi dan pencahayaan yang baik dapat mengurangi risiko

gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan dan penyakit lainnya.

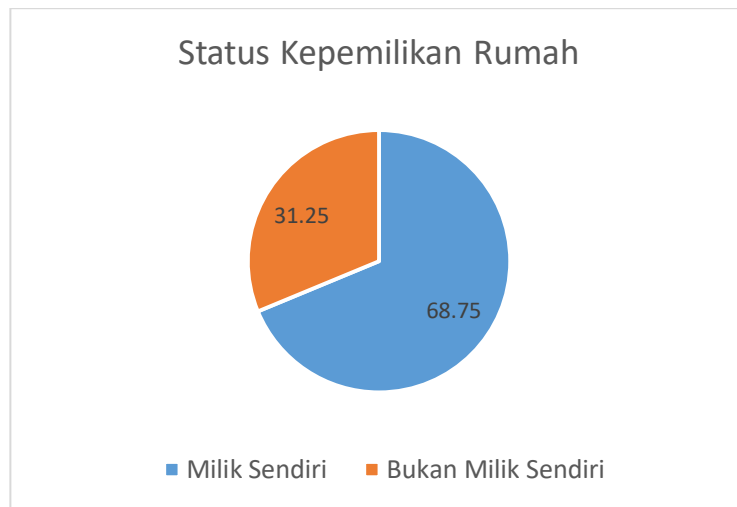
Lingkungan sehat juga berkaitan dengan kualitas permukiman dan akses terhadap fasilitas umum yang mendukung kehidupan perempuan, seperti layanan kesehatan, ruang terbuka hijau, dan sarana kebersihan lingkungan. Perempuan yang tinggal di lingkungan yang aman dan sehat cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan produktivitas yang lebih tinggi.

Upaya menciptakan lingkungan sehat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat, termasuk perempuan. Perempuan berperan penting dalam membangun perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga, seperti menjaga kebersihan rumah, mengelola limbah rumah tangga, serta membiasakan pola hidup sehat bagi anggota keluarga.

Dengan demikian, peningkatan kualitas lingkungan sehat menjadi bagian penting dalam pembangunan perempuan. Lingkungan yang sehat diharapkan mampu mendukung peningkatan derajat kesehatan perempuan, memperkuat ketahanan keluarga, serta menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.

Gambar 2.

Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah di Kota Payakumbuh Tahun 2025



Sumber : BPS Kota Payakumbuh

Berdasarkan data di atas, sebagian besar rumah tangga di Kota Payakumbuh telah menempati rumah milik sendiri, yaitu sebesar 68,75 persen, sedangkan 31,25 persen lainnya menempati rumah dengan status kepemilikan lainnya seperti kontrak/sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah adat, dan bentuk lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat telah memiliki tempat tinggal tetap yang dapat mendukung stabilitas dan kesejahteraan keluarga.

d. Keluhan Kesehatan

Keluhan kesehatan merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat, termasuk perempuan. Keluhan kesehatan dapat berupa gangguan fisik maupun mental yang dirasakan dalam periode tertentu dan dapat memengaruhi aktivitas sehari-hari. Dalam penyusunan profil perempuan, data mengenai keluhan kesehatan diperlukan

untuk melihat tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan secara umum.

Perempuan memiliki kerentanan terhadap berbagai masalah kesehatan yang dipengaruhi oleh faktor biologis, sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Selain menjalankan fungsi reproduksi, perempuan juga memiliki peran ganda dalam rumah tangga dan kegiatan sosial ekonomi, sehingga lebih rentan mengalami kelelahan fisik maupun tekanan psikologis. Kondisi tersebut dapat memicu munculnya berbagai keluhan kesehatan, baik penyakit ringan maupun gangguan kesehatan yang memerlukan penanganan medis.

Keluhan kesehatan yang umum dialami perempuan antara lain demam, batuk, sakit kepala, gangguan pernapasan, nyeri otot, gangguan pencernaan, serta keluhan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Selain itu, perempuan juga lebih rentan mengalami anemia, kelelahan, dan gangguan kesehatan mental akibat beban pekerjaan domestik dan sosial yang cukup tinggi.

Persentase penduduk yang berobat/rawat jalan dan rawat inap menurut jenis kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2025 dapat di lihat pada tabel dibawah ini

Tabel 8
Jumlah Penduduk yang Berobat/rawat Jalan dan Rawat Inap
Menurut Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2025

No	Jenis Berobat	Jenis Kelamin		
		Laki-La ki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
1	Rawat Jalan	224.861	339.982	564.843
2	Rawat Inap	9.626	18.016	27.642
Jumlah		234.487	357.998	592.485

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

Berdasarkan data Tahun 2025, jumlah penduduk Kota Payakumbuh yang memanfaatkan pelayanan kesehatan baik rawat jalan maupun rawat inap mencapai 592.485 kunjungan. Dari jumlah tersebut, 357.998 kunjungan (60,4 persen) dilakukan oleh perempuan, sedangkan 234.487 kunjungan (39,6 persen) dilakukan oleh laki-laki. Data ini menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak memanfaatkan pelayanan kesehatan dibandingkan laki-laki.

Menurut jenis pelayanan, rawat jalan merupakan layanan yang paling banyak dimanfaatkan dengan jumlah 564.843 kunjungan atau sekitar 95,3 persen dari seluruh kunjungan pelayanan kesehatan. Kunjungan rawat jalan perempuan mencapai 339.982 kunjungan, lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang berjumlah 224.861 kunjungan. Tingginya kunjungan rawat jalan pada perempuan dapat dipengaruhi oleh kebutuhan pelayanan kesehatan yang lebih beragam, seperti pemeriksaan kesehatan reproduksi, pelayanan kehamilan, persalinan, nifas, keluarga berencana, serta pemeriksaan kesehatan rutin lainnya.

Sementara itu, pelayanan rawat inap tercatat sebanyak 27.642 kunjungan, yang terdiri dari 18.016 kunjungan perempuan dan 9.626 kunjungan laki-laki. Sama halnya dengan rawat jalan, jumlah perempuan yang menjalani rawat inap juga lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki tingkat pemanfaatan fasilitas kesehatan yang lebih besar, baik untuk pelayanan preventif, kuratif, maupun pelayanan kesehatan maternal.

Dari perspektif gender, tingginya pemanfaatan layanan kesehatan oleh perempuan menunjukkan adanya kesadaran yang cukup baik dalam menjaga kesehatan diri dan keluarga. Namun demikian, kondisi ini juga dapat mencerminkan adanya kebutuhan pelayanan kesehatan yang lebih besar pada perempuan, terutama terkait fungsi reproduksi dan kesehatan ibu. Oleh karena itu, penyediaan layanan kesehatan yang responsif gender, mudah diakses, dan berkualitas perlu terus ditingkatkan untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan perempuan di Kota Payakumbuh.

f. Jaminan Kesehatan

Jaminan kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan. Akses terhadap jaminan kesehatan memberikan perlindungan finansial bagi perempuan dan keluarganya ketika membutuhkan pelayanan kesehatan, baik untuk tindakan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Kepemilikan jaminan kesehatan

juga berperan dalam meningkatkan akses perempuan terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, serta penanganan penyakit tidak menular.

Dalam konteks pembangunan gender, cakupan kepesertaan jaminan kesehatan menjadi indikator penting untuk melihat tingkat perlindungan sosial yang diterima perempuan. Perempuan yang memiliki jaminan kesehatan cenderung lebih mudah memanfaatkan fasilitas kesehatan, melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin, memperoleh pelayanan persalinan yang aman, serta mendapatkan pengobatan ketika mengalami gangguan kesehatan. Sebaliknya, perempuan yang belum memiliki jaminan kesehatan berisiko mengalami hambatan dalam mengakses layanan kesehatan akibat keterbatasan biaya.

Peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan pada perempuan merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata dan berkeadilan. Melalui program jaminan kesehatan, diharapkan seluruh perempuan dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan tanpa mengalami kesulitan ekonomi yang berarti. Selain itu, jaminan kesehatan juga mendukung peningkatan derajat kesehatan perempuan yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Cakupan jaminan kesehatan penduduk menurut jenis jaminan di Kota Payakumbuh Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 9
Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Menurut Jenis Jaminan
di Kota Payakumbuh Tahun 2025

No	Jenis Kepesertaan	Peserta Jaminan Kesehatan	
		Jumlah	%
Penerima Bantuan Iuran (PBI)			
1	PBI APBN	38,718	25.8
2	PBI APBD	50,266	33.5
	Sub Jumlah PBI	88,984	59.4
1	Pekerja Penerima Upah (PPU)	38,355	25.6
2	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/Mandiri	15,357	10.2
3	Bukan Pekerja (BP)	5,586	3.7
	Sub Jumlah Non PBI	59,298	39.6
Jumlah/Total		148,282	99,00
2022		137.357	96,77
2023		142.249	97,8
2024		145.255	98.2

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

Berdasarkan data Tahun 2025, jumlah penduduk Kota Payakumbuh yang telah memiliki jaminan kesehatan mencapai 148.282 jiwa atau sekitar 99,0 persen dari total penduduk. Angka ini menunjukkan bahwa hampir seluruh masyarakat Kota Payakumbuh telah terlindungi oleh program jaminan kesehatan, sehingga akses terhadap pelayanan kesehatan semakin terbuka dan merata.

Ditinjau menurut jenis kepesertaan, kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) masih mendominasi dengan jumlah 88.984 peserta atau 59,4 persen dari seluruh peserta jaminan

kesehatan. Dari jumlah tersebut, peserta PBI APBD merupakan yang terbesar yaitu 50.266 jiwa (33,5 persen), sedangkan peserta PBI APBN sebanyak 38.718 jiwa (25,8 persen). Tingginya proporsi peserta PBI menunjukkan besarnya peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjamin akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan.

Sementara itu, peserta Non-PBI berjumlah 59.298 jiwa atau 39,6 persen dari total peserta. Kelompok ini terdiri dari Pekerja Penerima Upah (PPU) sebanyak 38.355 jiwa (25,6 persen), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBP)/Mandiri sebanyak 15.357 jiwa (10,2 persen), dan Bukan Pekerja (BP) sebanyak 5.586 jiwa (3,7 persen). Besarnya jumlah peserta PPU menunjukkan bahwa sektor formal memiliki kontribusi yang cukup besar dalam mendukung kepesertaan jaminan kesehatan melalui mekanisme pembayaran iuran oleh pemberi kerja dan pekerja.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, cakupan jaminan kesehatan di Kota Payakumbuh menunjukkan tren yang terus meningkat. Pada tahun 2022 jumlah peserta tercatat sebanyak 137.357 jiwa dengan cakupan 96,77 persen, meningkat menjadi 142.249 jiwa atau 97,8 persen pada tahun 2023, kemudian mencapai 145.255 jiwa atau 98,2 persen pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 148.282 jiwa atau 99,0 persen pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam memperluas kepesertaan jaminan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (*Universal Health Coverage/UHC*).

Bagi perempuan, tingginya cakupan jaminan kesehatan memberikan manfaat yang sangat besar karena dapat meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemeriksaan kehamilan, persalinan di fasilitas kesehatan, pelayanan keluarga berencana, serta deteksi dini berbagai penyakit. Dengan demikian, tingginya kepesertaan jaminan kesehatan di Kota Payakumbuh menjadi modal penting dalam meningkatkan derajat kesehatan perempuan dan mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

g. Fasilitas dan Tenaga Kesehatan

Dari perspektif gender, keberadaan fasilitas kesehatan yang tersebar secara merata akan memudahkan perempuan dalam memperoleh layanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, pemeriksaan kehamilan, persalinan, pelayanan keluarga berencana, serta deteksi dini berbagai penyakit. Akses yang mudah terhadap fasilitas kesehatan juga berkontribusi dalam menurunkan risiko kematian ibu, meningkatkan kesehatan bayi, dan memperbaiki kualitas hidup perempuan secara keseluruhan.

Selain ketersediaan fasilitas, jumlah dan distribusi tenaga kesehatan menjadi faktor yang sangat menentukan kualitas pelayanan yang diberikan. Tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, dokter spesialis, dokter gigi, bidan, perawat, tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat, dan tenaga kesehatan lainnya memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki.

Keberadaan bidan dan tenaga kesehatan reproduksi, misalnya, sangat penting dalam mendukung kesehatan ibu selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas.

Analisis data fasilitas dan tenaga kesehatan dalam Profil Gender bertujuan untuk melihat sejauh mana sarana dan sumber daya kesehatan telah tersedia dan mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi gender. Informasi ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan akses pelayanan kesehatan antarwilayah maupun antarkelompok penduduk, sehingga menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan kesehatan yang lebih responsif gender.

Dengan tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai dan didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional serta tersebar secara merata, diharapkan kualitas pelayanan kesehatan dapat terus meningkat, sehingga perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal dan berkelanjutan. Capaian Pertolongan Persalinan di Kota Payakumbuh Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 10
Capaian Pertolongan Persalinan Menurut Kecamatan Oleh Tenaga Kesehatan di Kota Payakumbuh Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Ibu Bersalin/Nifas		
		Jumlah	Jumlah ditolong Nakes	Persentase
1	Payakumbuh Utara	425	425	100%
2	Payakumbuh Selatan	150	150	100%
3	Payakumbuh Barat	744	744	100%
4	Payakumbuh Timur	371	371	100%
5	Lamposi Tigo Nagori	166	166	100%
Jumlah/Total		1856	1856	100%
2022		2.367	2.367	100
2023		2.855	2.371	83,1
2024		2.803	1.879	67

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

Pada tahun 2025, seluruh persalinan di Kota Payakumbuh telah ditolong oleh tenaga kesehatan. Dari total 1.856 ibu bersalin/nifas yang tercatat, seluruhnya memperoleh pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sehingga cakupan pelayanan mencapai 100 persen. Kondisi ini terjadi di seluruh kecamatan, yaitu Kecamatan Payakumbuh Utara, Payakumbuh Selatan, Payakumbuh Barat, Payakumbuh Timur, dan Lamposi Tigo Nagori, yang masing-masing juga mencatat cakupan sebesar 100 persen.

Dilihat dari jumlah persalinan, Kecamatan Payakumbuh Barat memiliki jumlah ibu bersalin/nifas terbanyak yaitu 744 orang, diikuti Kecamatan Payakumbuh Utara sebanyak 425 orang, Payakumbuh Timur sebanyak 371 orang, Lamposi Tigo Nagori sebanyak 166 orang, dan Payakumbuh Selatan sebanyak 150 orang. Meskipun jumlah persalinan berbeda antarwilayah, seluruh ibu bersalin telah mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan yang memadai.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2022 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan mencapai 100 persen, kemudian menurun menjadi 83,1 persen pada tahun 2023 dan kembali menurun menjadi 67 persen pada tahun 2024. Namun pada tahun 2025 cakupan tersebut kembali meningkat hingga mencapai 100 persen. Pencapaian ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam memperluas akses serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu.

Dari perspektif gender, tingginya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan mencerminkan semakin baiknya akses perempuan terhadap pelayanan kesehatan maternal yang aman dan berkualitas. Kondisi ini merupakan modal penting dalam meningkatkan derajat kesehatan perempuan, mengurangi risiko kematian ibu dan bayi, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang responsif gender di Kota Payakumbuh. Dengan mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu, diharapkan kesejahteraan perempuan dan kualitas generasi mendatang dapat terus meningkat.

h. Keluarga Berencana

Keluarga berencana merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan gender karena berkaitan erat dengan kesehatan reproduksi, kualitas hidup keluarga, serta

peningkatan kesejahteraan perempuan dan laki-laki. Program keluarga berencana memberikan kesempatan kepada pasangan usia subur untuk merencanakan jumlah dan jarak kelahiran anak secara sehat dan bertanggung jawab, sehingga dapat mendukung terciptanya keluarga yang berkualitas.

Dalam perspektif gender, keluarga berencana tidak hanya menjadi tanggung jawab perempuan, tetapi juga membutuhkan peran serta laki-laki dalam pengambilan keputusan mengenai kesehatan reproduksi. Kesetaraan peran antara suami dan istri dalam menentukan penggunaan alat kontrasepsi, perencanaan kehamilan, dan pengasuhan anak merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan gender dalam keluarga.

Keberhasilan program keluarga berencana berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak, penurunan angka kematian ibu, serta pengendalian pertumbuhan penduduk. Selain itu, akses yang lebih baik terhadap pelayanan keluarga berencana memungkinkan perempuan memiliki kesempatan yang lebih luas untuk meningkatkan pendidikan, berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, dan mengambil bagian dalam kehidupan sosial masyarakat. Jumlah peserta KB aktif di Kota Payakumbuh Tahun 2025 dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 11
Jumlah Peserta KB Aktif di Kota Payakumbuh Tahun 2025

No	Kecamatan	PUS	Peserta KB Aktif								
			Kondom	Suntik	Pil	AKDR /IUD	MOP	MOW	Implan	Jumlah	%
1	Payakumbuh Utara	5667	624	728	286	307	11	82	387	2425	42.7
2	Payakumbuh Selatan	1668	229	663	171	289	30	39	128	1549	92.8
3	Payakumbuh Barat	9095	685	2695	902	1530	22	366	498	6698	73.6
4	Payakumbuh Timur	3137	217	1339	273	621	8	143	386	2987	95.2
5	Lamposi Tigo Nagori	1732	178	1155	178	428	12	96	463	2510	144.9
Jumlah/Total		21300	1933	6580	1810	3175	83	726	1862	16169	75.9
2022		18.641	1.755	4.614	2.302	2.351	73	656	1.358	12.567	67,4
2023		20.982	1.487	6.595	2.039	2.871	76	756	1.576	15.400	73,4
2024		18.641	1.755	4.614	2.302	2.351	73	656	1.358	12.567	67,4

Sumber : Dinas P3AP2KB Kota Payakumbuh

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah peserta Keluarga Berencana (KB) aktif secara keseluruhan mencapai 16.169 akseptor dari 21.300 pasangan usia subur (PUS), sehingga cakupan peserta KB aktif mencapai 75,9 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan usia subur telah memanfaatkan pelayanan keluarga berencana sebagai upaya untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran demi mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera.

Apabila dilihat menurut wilayah, terdapat variasi tingkat partisipasi peserta KB aktif. Cakupan tertinggi tercatat sebesar 144,9 persen, diikuti oleh wilayah dengan cakupan 95,2 persen dan 92,8 persen. Sementara itu, wilayah lainnya memiliki cakupan sebesar 73,6 persen, 42,7 persen, dan yang terendah 75,9 persen secara keseluruhan. Perbedaan ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam akses maupun pemanfaatan pelayanan keluarga berencana antarwilayah yang dapat

dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, ketersediaan sarana pelayanan, maupun karakteristik sosial ekonomi masyarakat.

Dari sisi metode kontrasepsi yang digunakan, terlihat bahwa metode kontrasepsi modern masih mendominasi pilihan akseptor. Jumlah pengguna metode suntik dan pil merupakan yang terbesar dibandingkan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD, MOW, MOP, dan implan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih cenderung memilih metode kontrasepsi yang mudah digunakan dan relatif terjangkau. Namun demikian, pemanfaatan metode kontrasepsi jangka panjang masih perlu terus ditingkatkan mengingat efektivitasnya yang lebih tinggi dalam pengendalian kelahiran.

Dalam perspektif gender, tingginya jumlah peserta KB aktif mencerminkan semakin meningkatnya kesadaran pasangan usia subur terhadap pentingnya kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Namun, keterlibatan laki-laki dalam program KB, terutama melalui penggunaan Metode Operasi Pria (MOP), masih relatif rendah dibandingkan metode kontrasepsi yang ditujukan bagi perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pengendalian kelahiran masih lebih banyak dipikul oleh perempuan, sehingga diperlukan upaya peningkatan partisipasi laki-laki dalam program keluarga berencana guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kesehatan reproduksi.

Secara keseluruhan, capaian peserta KB aktif yang mencapai 75,9 persen menunjukkan bahwa pelaksanaan program keluarga berencana telah berjalan cukup baik. Meskipun demikian, peningkatan kualitas pelayanan, pemerataan akses antarwilayah, serta penguatan peran laki-laki dalam program KB masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian dalam rangka mendukung pembangunan yang responsif gender dan peningkatan kualitas keluarga di masa mendatang.

i. Air Bersih dan Sanitasi Layak

Ketersediaan air bersih dan akses terhadap sanitasi layak merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan yang berperspektif gender. Air bersih dan sanitasi yang memadai berperan besar dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mencegah penyebaran penyakit, serta mendukung kualitas hidup perempuan dan laki-laki secara setara. Dalam konteks pembangunan gender, akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak memiliki dampak yang lebih besar bagi perempuan karena mereka umumnya memiliki peran yang dominan dalam pengelolaan kebutuhan rumah tangga, termasuk penyediaan air dan pemeliharaan kebersihan keluarga.

Perempuan dan anak perempuan sering kali menghadapi beban yang lebih besar ketika akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi masih terbatas. Keterbatasan tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, mengurangi waktu

produktif, serta mempengaruhi partisipasi perempuan dalam pendidikan, kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial. Oleh karena itu, penyediaan layanan air bersih dan sanitasi yang memadai merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan kesetaraan gender dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Meningkatnya cakupan akses terhadap air bersih dan sanitasi layak akan berkontribusi pada penurunan angka kesakitan, peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak, serta terciptanya lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi layak tidak hanya merupakan bagian dari hak dasar masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga secara keseluruhan.

J.Akses Terhadap Air Layak

Akses terhadap air layak merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup perempuan serta laki-laki. Ketersediaan sumber air yang memenuhi standar kesehatan berperan besar dalam mendukung kesehatan, kebersihan, dan produktivitas rumah tangga. Dalam perspektif gender, akses terhadap air layak memiliki keterkaitan yang erat dengan peran perempuan dalam pengelolaan kebutuhan domestik dan pemeliharaan kesehatan keluarga.

Perempuan pada umumnya memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan air untuk memasak, mencuci, menjaga kebersihan rumah, serta merawat anggota keluarga. Oleh karena itu, keterbatasan akses terhadap air layak dapat meningkatkan beban kerja perempuan, mengurangi waktu yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, pendidikan, maupun partisipasi sosial. Sebaliknya, tersedianya akses air layak secara memadai akan mendukung peningkatan kualitas hidup perempuan dan anggota keluarga secara keseluruhan.

Penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air bersih berkualitas (layak) menurut kecamatan di Kota Payakumbuh Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 12
Cakupan Penduduk Dengan Akses Air Bersih (Layak) Menurut Kecamatan di Kota Payakumbuh Tahun 2025

No	Kecamatan	Bukan Jaringan Perpipaan			Perpipaan	Penduduk Dgn Akses Air Layak	
		Sumur Gali	Sumur Bor	Lainnya		Jumlah	%
1	Payakumbuh Utara	109	6	74	7340	7529	100
2	Payakumbuh Selatan	1	276	0	2650	2927	100
3	Payakumbuh Barat	210	42	650	13334	14236	100
4	Payakumbuh Timur	47	0	0	6791	7338	100
5	Lamposi Tigo Nagori	284	411	939	1066	2706	100
Jumlah/Total		651	735	1663	31181	31809	100
2022		1.669	1.312	123	33.670	35.439	99,7
2023		4.631	677	6.785	119.199	142.329	99,98
2024		918	285	1985	32180	35368	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2025, seluruh penduduk di Kota Payakumbuh telah memperoleh akses terhadap air bersih atau air layak dengan cakupan mencapai 100 persen. Dari total 31.809 penduduk yang

tercatat, sebanyak 31.181 penduduk memperoleh akses melalui jaringan perpipaan, sedangkan sisanya memanfaatkan sumber air non-perpipaan yang berasal dari sumur gali, sumur bor, dan sumber lainnya.

Jika dilihat menurut kecamatan, seluruh wilayah di Kota Payakumbuh, yaitu Kecamatan Payakumbuh Utara, Payakumbuh Selatan, Payakumbuh Barat, Payakumbuh Timur, dan Lamposi Tigo Nagori, telah mencapai cakupan akses air layak sebesar 100 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan pelayanan air bersih di Kota Payakumbuh telah terlaksana dengan baik sehingga seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh sumber air yang memenuhi standar kesehatan.

Berdasarkan jenis sumber air, sebagian besar penduduk memperoleh akses melalui jaringan perpipaan, yaitu sebanyak 31.181 penduduk atau sekitar 98,0 persen dari total penduduk yang memiliki akses air layak. Sementara itu, sebanyak 651 penduduk memanfaatkan sumur gali, 735 penduduk menggunakan sumur bor, dan 1.663 penduduk menggunakan sumber air lainnya. Dominasi penggunaan jaringan perpipaan menunjukkan bahwa pelayanan air bersih yang dikelola secara terpusat telah menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan air masyarakat Kota Payakumbuh.

Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, cakupan akses air layak di Kota Payakumbuh menunjukkan peningkatan.

Pada tahun 2022 cakupan penduduk dengan akses air layak tercatat sebesar 99,7 persen, meningkat menjadi 99,98 persen pada tahun 2023, dan telah mencapai 100 persen pada tahun 2024 serta mampu dipertahankan pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan ketersediaan dan pemerataan akses air bersih bagi seluruh masyarakat.

Dalam perspektif gender, tersedianya akses air bersih yang layak memberikan manfaat yang sangat penting bagi perempuan. Kemudahan memperoleh air bersih dapat mengurangi beban kerja domestik perempuan yang selama ini berperan besar dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, menjaga kebersihan rumah, serta merawat anggota keluarga. Selain itu, akses air layak juga berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan ibu dan anak, pencegahan penyakit berbasis lingkungan, serta peningkatan kualitas hidup keluarga secara keseluruhan.

Dengan tercapainya cakupan akses air layak sebesar 100 persen, Kota Payakumbuh telah menunjukkan kemajuan yang baik dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kondisi ini menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan responsif gender, serta mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera.

k. Akses Terhadap Sanitasi Layak

Akses terhadap sanitasi layak merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan kesejahteraan keluarga. Sanitasi yang layak mencakup tersedianya fasilitas pembuangan limbah dan jamban yang memenuhi standar kesehatan sehingga dapat mencegah pencemaran lingkungan serta menurunkan risiko terjadinya penyakit berbasis lingkungan. Dalam konteks pembangunan yang responsif gender, akses terhadap sanitasi layak memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan dengan kesehatan, keamanan, dan kenyamanan perempuan serta laki-laki dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

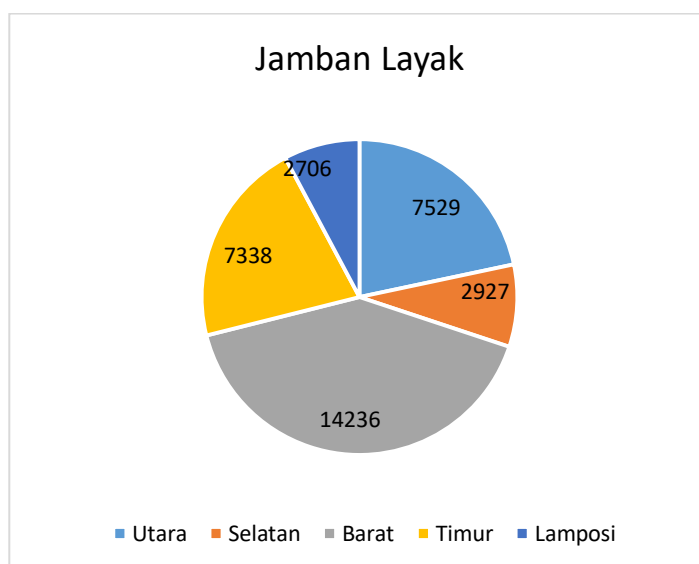
Perempuan dan anak perempuan merupakan kelompok yang sangat merasakan dampak dari keterbatasan fasilitas sanitasi. Ketersediaan sanitasi yang layak tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi perempuan, tetapi juga memberikan rasa aman, menjaga privasi, serta mendukung kualitas hidup keluarga secara keseluruhan. Sebaliknya, akses sanitasi yang tidak memadai dapat meningkatkan risiko penyakit, menambah beban domestik perempuan, dan mempengaruhi partisipasi mereka dalam pendidikan maupun kegiatan ekonomi.

Dengan demikian, akses terhadap sanitasi layak tidak hanya merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu faktor penting dalam

mendukung pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berperspektif gender. Data mengenai sanitasi layak dalam Profil Gender diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat serta menjadi landasan bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan gender.

Gambar 3.

Jumlah Penduduk Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat) di Kota Payakumbuh Tahun 2025



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

Akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak merupakan salah satu indikator penting dalam mendukung derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan yang sehat. Ketersediaan jamban sehat berperan dalam mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta mendukung terciptanya kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh anggota masyarakat, khususnya perempuan dan anak.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2025, jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi layak (jamban sehat) mencapai 34.736 jiwa. Jumlah tersebut tersebar di lima kecamatan, dengan jumlah tertinggi berada di Kecamatan Payakumbuh Barat sebanyak 14.236 jiwa, diikuti Kecamatan Payakumbuh Utara sebanyak 7.529 jiwa, Kecamatan Payakumbuh Timur sebanyak 7.338 jiwa, Kecamatan Payakumbuh Selatan sebanyak 2.927 jiwa, dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori sebanyak 2.706 jiwa.

Besarnya jumlah penduduk yang telah memiliki akses terhadap jamban sehat menunjukkan bahwa upaya peningkatan sanitasi di Kota Payakumbuh telah berjalan dengan baik. Ketersediaan sarana sanitasi yang memadai menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan keluarga dan menurunkan risiko terjadinya penyakit menular, seperti diare, tifus, dan infeksi saluran pencernaan lainnya.

Ditinjau dari persebaran wilayah, Kecamatan Payakumbuh Barat memiliki jumlah penduduk dengan akses sanitasi layak tertinggi. Hal ini sejalan dengan jumlah penduduk yang relatif lebih besar dibandingkan kecamatan lainnya. Sementara itu, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori memiliki jumlah penduduk dengan akses sanitasi layak paling sedikit, sehingga masih diperlukan upaya peningkatan cakupan dan kualitas sarana sanitasi agar seluruh masyarakat dapat memperoleh akses yang setara terhadap fasilitas sanitasi yang aman dan sehat.

Secara umum, ketersediaan fasilitas sanitasi yang layak merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan kesehatan yang responsif gender. Bagi perempuan, akses terhadap jamban sehat tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga menyangkut kenyamanan, keamanan, dan pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari. Oleh karena itu, peningkatan akses sanitasi yang merata dan berkelanjutan menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang inklusif di Kota Payakumbuh.

BAB IV PEREMPUAN DAN DUNIA KERJA KETENAGAKERJAAN

4.1 Latar Belakang

Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas tidak terlepas dari peran perempuan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam dunia kerja. Perempuan memiliki kontribusi yang semakin besar dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai tenaga kerja, pelaku usaha, maupun penggerak ekonomi keluarga. Partisipasi perempuan dalam pasar kerja tidak hanya berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Meskipun demikian, perempuan masih menghadapi berbagai tantangan dalam bidang ketenagakerjaan, seperti kesenjangan tingkat partisipasi angkatan kerja, perbedaan kesempatan memperoleh pekerjaan, ketimpangan upah, keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak, serta beban ganda yang harus dijalankan antara peran produktif dan peran domestik. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan perempuan dan menghambat terwujudnya kesetaraan gender dalam bidang ekonomi.

Dalam perspektif gender, kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang

layak merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui peningkatan akses terhadap lapangan kerja, pelatihan keterampilan, perlindungan tenaga kerja, dan kesempatan berusaha menjadi faktor yang sangat menentukan dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan keluarganya.

Penyusunan Profil Perempuan pada aspek ketenagakerjaan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi dan peran perempuan dalam dunia kerja, termasuk tingkat partisipasi angkatan kerja, status pekerjaan, jenis pekerjaan, tingkat pengangguran, serta kontribusi perempuan dalam berbagai lapangan usaha. Data dan informasi tersebut diperlukan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender, sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan bagi perempuan.

Selain itu, informasi mengenai perempuan dan ketenagakerjaan menjadi penting dalam mengidentifikasi berbagai kesenjangan yang masih terjadi antara perempuan dan laki-laki di pasar kerja. Dengan adanya data yang terpilah menurut jenis kelamin, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat menyusun strategi yang lebih tepat dalam meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan, memperluas akses terhadap pekerjaan yang layak, serta mendorong terciptanya lingkungan kerja yang adil dan inklusif.

Dengan demikian, kajian mengenai perempuan dan dunia kerja dalam Profil Perempuan merupakan bagian penting dalam mendukung terwujudnya kesetaraan gender, peningkatan kesejahteraan keluarga, serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Peran perempuan yang semakin besar dalam sektor ketenagakerjaan diharapkan mampu menjadi salah satu pendorong utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

4.2 Definisi Konseptual

Konsep dan definisi yang digunakan Badan Pusat Statistik terkait ketenagakerjaan merujuk pada The Labor Force Concept yang disarankan oleh International Labor Organization (ILO).

4.2.1 Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja

BPS mendefinisikan tenaga kerja sebagai orang yang sedang bekerja dan/atau memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja, atau seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Tenaga kerja juga mencakup tenaga kerja tetap, pekerja tidak tetap/harian, pekerja outsourcing dan tenaga kerja asing. Seseorang disebut sebagai tenaga kerja diukur melalui usia, dimana usia penduduk dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu usia kerja dan bukan usia kerja. Pada penduduk yang masuk kategori usia kerja dibedakan menjadi dua, yaitu penduduk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusaha 15 tahun ke atas. Angkatan kerja merupakan kelompok penduduk

usia kerja yang dinilai berpotensi untuk bekerja. Usia 15 tahun merupakan batas usia minimal seseorang disebut sebagai Angkatan kerja, termasuk penduduk usia 15 tahun ke atas yang dan saat ini statusnya sedang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau dan pengangguran. Pada kategori penduduk yang bukan angkatan kerja ditujukan pada penduduk berusia 15 tahun ke atas yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Mengetahui jumlah atau persentase angkatan kerja, akan memberikan informasi tentang potensi penduduk yang bekerja. Semakin tinggi jumlah angkatan kerja, berarti semakin banyak jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja (sirusa.bps.go.id).

Bekerja didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Tenaga kerja yang sedang bekerja atau disebut pekerja dapat dibedakan sebagai pekerja penuh dan pekerja tidak penuh. Pekerja penuh merupakan pekerja yang bekerja minimal 35 jam seminggu, sedangkan pekerja tidak penuh adalah pekerja yang bekerja di bawah jam normal 35 jam seminggu. Pekerja Tidak Penuh terdiri dari (sirusa.bps.go.id).

a) Setengah Penganggur adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih

mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (sebelumnya disebut setengah pengangguran terpaksa).

b) Pekerja Paruh Waktu adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (sebelumnya disebut setengah pengangguran sukarela).

4.2.2 **Usia Produktif**

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kelompok usia produktif adalah penduduk yang berada dalam rentang usia 15 sampai 64 tahun. Usia dibawah 15 tahun dan di atas 65 tahun disebut penduduk usia tidak produktif dan masuk kategori angka beban tanggungan. Pada rentang usia yang dinilai produktif ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu usia sangat produktif dan usia produktif. Usia sangat produktif merujuk pada penduduk yang berusia 15 sampai 49 tahun, sedangkan usia produktif ditujukan pada penduduk usia 50 sampai 64 tahun. Tindakan produktif merupakan tindakan kreatif yang dapat menghasilkan sesuatu dan usia produktif diasumsikan usia seseorang yang dianggap dapat memproduksi atau menghasilkan sesuatu. Dengan mengetahui usia produktif pada penduduk, maka akan diketahui potensi penduduk yang dapat menghasilkan produk maupun jasa yang dapat menunjang kehidupannya secara optimal.

4.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK digunakan untuk mengetahui tingkat pasokan tenaga kerja (labour supply) yang ada berdasarkan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. TPAK ditujukan pada penduduk usia 15 tahun keatas atau usia angkatan kerja. Karena itu, tinggi atau rendahnya TPAK dipengaruhi oleh jumlah penduduk bukan angkatan kerja. Semakin tinggi TPAK suatu wilayah, dapat mengindikasikan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian (sirusa.bps.go.id).

Perempuan usia 15 tahun ke atas atau usia angkatan kerja beresiko tidak dinilai berpartisipasi pada TPAK karena melakukan kerja-kerja domestik atau kerja yang dilakukan untuk kepentingan rumah tangga sendiri, seperti memasak, mengasuh anak, merawat keluarga yang sakit, atau mendampingi orang lanjut usia yang ada di dalam rumah tangga. Akibatnya, perempuan berpotensi tidak dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja, terutama pada status perempuan sebagai ibu rumah tangga yang menghasilkan produk yang dikonsumsi dan dinikmati oleh anggota keluarga sendiri (UNFPA, 2014 dalam Kemen PPPA, 2019). Pilihan menjadi ibu rumah tangga dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang secara budaya dikonstruksikan sebagai tugas perempuan menyulitkan partisipasi perempuan di dunia kerja.

4.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran adalah seseorang yang ingin bekerja dan memiliki kemampuan bekerja namun tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Seseorang yang dikategorikan sebagai pengangguran terbuka adalah 1) tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, 2) tidak memiliki pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha. 3) tidak memiliki pekerjaan dan tidak sedang mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, 4) sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja atau sementara tidak bekerja, yaitu keadaan seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok dan sebagainya. Beberapa contoh kategori punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah a) pekerja tetap, pegawai pemerintah/swasta yang sedang tidak bekerja karena cuti, sakit, mogok, mangkir, mesin/ peralatan perusahaan mengalami kerusakan, dan sebagainya, b) petani yang mengusahakan tanah pertanian dan sedang tidak bekerja karena alasan sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya (menunggu panen atau musim hujan untuk menggarap sawah), dan c) pekerja profesional (mempunyai keahlian tertentu/khusus) yang sedang tidak bekerja karena sakit, menunggu pekerjaan berikutnya/pesanan dan sebagainya. Seperti dalang, tukang cukur, tukang pijat, dukun, penyanyi komersial dan sebagainya (sirusa.bps.go.id).

Tingkat pengangguran adalah banyaknya jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja dan aktif mencari pekerjaan. Dengan demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja (sirusa.bps.go.id). TPT dapat digunakan untuk melihat kondisi ekonomi suatu wilayah atau negara, mengukur ketimpangan dalam pasar tenaga kerja, melihat pasokan tenaga kerja yang tidak digunakan di sebuah wilayah atau negara (ILO dalam Kemen PPPA, 2019).

4.2.5 Tenaga Kerja Formal dan Informasi

Tenaga kerja atau pekerja dapat dibedakan berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, yaitu sektor formal dan sektor informal. Pekerja sektor formal merupakan status pekerjaan utama seseorang yang mencakup berusaha dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan pekerja sektor informal merupakan status pekerjaan utama seseorang yang mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, buruh/karyawan, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di nonpertanian dan pekerja keluarga/tidak dibayar.

Tenaga kerja sektor informal tidak selalu mensyaratkan tingkat pendidikan di jenjang minimal tertentu atau keahlian tertentu yang diperoleh melalui proses pelatihan atau kursus. Karena itu, pekerja sektor informal tidak harus memiliki ijazah atau sertifikat keahlian tertentu dan terkadang tidak memiliki standar upah yang layak. Pada umumnya, pekerjaan di sektor

informal dikembangkan secara individu dengan atau tanpa melibatkan tenaga kerja lain yang dibayar atau tidak. Sebagai contoh usaha mandiri yang dilakukan dari dalam rumah, pedagang kaki lima, pekerja di bidang pertanian dan kelautan, dan berjualan di warung kebutuhan pokok milik sendiri. Jenis pekerjaan di sektor informal pada umumnya tidak memiliki izin usaha dari pemerintah dan memiliki pola kegiatan yang fleksibel. Karena itu, dalam kerja informal, terkadang tidak memiliki jam kerja yang tetap, menggunakan peralatan atau teknologi yang sederhana atau tradisional, dan berbasis modal kecil. Dari segi perlindungan, pekerja informal tidak memiliki jaminan perlindungan dari pemerintah secara langsung sehingga lebih rentan mengalami ketidakadilan dan lebih sulit melakukan upaya hukum dibandingkan pekerja formal.

Tuntutan pekerjaan di wilayah domestik pada perempuan kerap kali menjadikan perempuan memilih sebagai pekerja di sektor informal. Selain fleksibilitas waktu yang dapat disesuaikan dengan kondisi perempuan, sektor informal juga memungkinkan menawarkan jenis pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah. Meskipun menjadi peluang dan alternatif pendapatan bagi perempuan yang kesulitan bekerja di sektor formal, namun kedudukan pekerja di sektor informal beresiko pada jaminan perlindungan atas hak dasar dirinya sebagai tenaga kerja dan kerentanan pada kekerasan berbasis gender.

Mengetahui persentase kerja di sektor formal dan informal dapat menjadi landasan untuk mendorong dibentuk atau

dikembangkannya kebijakan pembangunan yang berorientasi pada upaya mendukung aktivitas produktif, penciptaan lapangan kerja yang baik, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap layanan pendanaan/permodalan pada sektor nonpertanian (sirusa.bps.go.id).

4.2.6 Status Pekerjaan

Status pekerjaan merupakan jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan atau status seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan tertentu. Status/kedudukan pekerjaan utama merupakan jenis kedudukan kepala ruta/anggota ruta dalam pekerjaan utama. Persentase status pekerjaan utama pada penduduk memberikan informasi tentang kondisi tenaga kerja dan menentukan kelompok sosial ekonomi penduduk. Status pekerjaan utama juga dapat memberikan gambaran tentang tingkatan upah atau gaji yang diterima seseorang. Tingginya upah atau gaji pekerja pada sebuah negara dapat mengindikasikan majunya pembangunan ekonomi di negara tersebut.

Indikator status pekerjaan utama dibedakan dalam dua kategori dari seluruh pekerja, yaitu (a) pekerja penerima upah/gaji dan (b) orang yang mempekerjakan dirinya sendiri dan/ atau orang lain. BPS melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) mengklasifikasi status pekerjaan dalam tujuh

macam, dengan penjelasan sebagaimana berikut (sirusa.bps.go.id):

- a. Berusaha sendiri, adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
- b. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar dan atau buruh/pekerja tidak tetap.
- c. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/pekerja tetap yang dibayar.
- d. Buruh/Karyawan/Pegawai, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki 1 (satu) majikan (orang/ rumah tangga) yang sama dalam sebulan terakhir, khusus pada sektor bangunan batasannya tiga bulan. Apabila majikannya instansi/lembaga, boleh lebih dari satu.
- e. Pekerja bebas di pertanian, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1

majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha pertanian meliputi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan perburuan, termasuk juga jasa pertanian. Majikan adalah orang atau pihak yang memberikan pekerjaan dengan pembayaran yang disepakati.

- f. Pekerja bebas di nonpertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir), di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha non pertanian meliputi: usaha di sektor pertambangan, industri, listrik, gas dan air, sektor konstruksi/ bangunan, sektor perdagangan, sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi, sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan.
- g. Pekerja keluarga/tak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang. Pekerja tak dibayar tersebut dapat terdiri dari 1) Anggota rumah tangga dari orang yang dibantunya, seperti istri/ anak yang membantu suaminya/ayahnya bekerja di sawah dan tidak

dibayar, 2) Bukan anggota rumah tangga tetapi keluarga dari orang yang dibantunya, seperti famili yang membantu melayani penjualan di warung dan tidak dibayar, atau 3) Bukan anggota rumah tangga dan bukan keluarga dari orang yang dibantunya, seperti orang yang membantu menganyam topi pada industri rumah tangga tetangganya dan tidak dibayar.

4.2.7 Jam Kerja

Jam kerja merupakan waktu yang digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan. Jam kerja dapat dilakukan di siang hari dan/atau malam hari. Jam kerja bagi para pekerja di sektor swasta di atur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, khususnya dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 85. Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Kepmenakertrans No. KEP 102/MEN/VI/2004, waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari, dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pada waktu istirahat mingguan dan/ atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah (Wijayanti dalam Kemen PPPA, 2019).

BPS menggunakan indikator jumlah jam kerja seluruh pekerjaan dengan maksud melihat lamanya waktu dalam jam yang digunakan untuk bekerja dari seluruh pekerjaan, tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan selama seminggu yang lalu. Bagi pedagang keliling, jumlah jam kerja dihitung mulai berangkat dari rumah sampai tiba kembali di rumah dikurangi waktu yang tidak merupakan jam kerja, seperti mampir ke rumah famili saudara/kawan dan sebagainya (sirusa.bps.go.id). Jam kerja memiliki batasan maksimal, yaitu 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu. Apabila melebihi dari ketentuan waktu kerja tersebut, maka waktu kerja biasa dianggap masuk sebagai waktu kerja lembur sehingga pekerja/buruh berhak atas upah lembur.

4.2.8 Upah dan Rata-Rata

Upah/gaji bersih adalah imbalan yang diterima selama sebulan oleh buruh/karyawan baik berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan/kantor/majikan. Imbalan dalam bentuk barang dinilai dengan harga setempat. Upah/ gaji bersih yang dimaksud tersebut adalah setelah dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan dan sebagainya. Orang yang menerima upah disebut sebagai tenaga kerja dibayar, yaitu semua orang yang bekerja di perusahaan/usaha dengan mendapatkan upah dan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya baik berupa uang maupun barang. Bentuk upah dapat berupa uang maupun barang.

Rata-rata upah merupakan penghitungan rata-rata upah pekerja setiap hari didasarkan pada banyaknya upah yang diterima oleh pekerja dibagi dengan banyaknya hari kerja pekerja dalam periode waktu yang sama. Indeks perkembangan rata-rata upah dilihat menurut jenis kelamin, jenis pekerjaan, atau jenis tanaman perkebunan. Indeks perkembangan rata-rata upah dilakukan dengan membandingkan besar upah antara semester/tahun berjalan dengan upah pada semester/tahun dasar dengan penimbang tetap hari kerja pekerja (sirusa.bps.go.id).

4.2.9 Pekerja Migran

Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi atau berpindah dari wilayah kelahiran atau lokasi tinggal yang bersifat tetap untuk keperluan bekerja. Pekerja migran dapat dibedakan dalam 3 kategori, yaitu pekerja migran internal, internasional dan risen. Pekerja migran internal adalah Pekerja yang bermigrasi dalam kawasan satu negara, umumnya melalui urbanisasi dan transmigrasi, pekerja migran internasional adalah perseorangan yang bermigrasi ke luar negeri untuk keperluan bekerja; dan pekerja migran risen adalah pekerja yang tempat tinggalnya saat pencacahan berbeda dengan tempat tinggalnya lima tahun yang lalu.

Persentase pekerja migran risen dilihat pada jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dan tempat tinggalnya saat pencacahan berbeda dengan tempat tinggalnya lima tahun yang lalu. Indikator ini bermanfaat untuk mengetahui

fenomena pekerja yang melakukan mobilitas permanen khususnya migrasi risen. Persentase yang diperoleh melalui indikator ini dapat dimaknai dengan semakin tinggi persentase pekerja migran risen mengindikasikan tingginya pergerakan penduduk yang melakukan mobilitas secara permanen.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Kegiatan Perempuan Usia 15 Tahun Ke Atas

Angkatan kerja pada dasarnya merujuk pada kelompok penduduk yang berada pada pasar kerja, yaitu penduduk yang siap terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kelamin dan jenis kegiatan di Kota Payakumbuh tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 13

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2025

Kegiatan Utama	Dewasa		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Bekerja	43.251	33.350	76.601
Pengangguran	2.267	1.732	3.999
Angkatan Kerja	45.518	35.082	80.600
Sekolah	4.859	5.053	9.912
Mengurus Rumah Tangga	2.319	14.507	16.826
Lainnya	3.239	1.477	4.716
Bukan Angkatan Kerja	10.417	21.037	31.454
Jumlah Total	55.935	56.119	112.054
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	81,38	62,51	71,93
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,98	4,94	4,96

Sumber : BPS Kota Payakumbuh

Data penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kota Payakumbuh Tahun 2025 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan relatif seimbang, yaitu

55.935 laki-laki dan 56.119 perempuan, dengan total 112.054 jiwa. Namun demikian, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam partisipasi penduduk laki-laki dan perempuan di pasar kerja.

Jumlah penduduk yang bekerja mencapai 76.601 orang, terdiri dari 43.251 laki-laki dan 33.350 perempuan. Data ini menunjukkan bahwa laki-laki masih mendominasi kegiatan ekonomi produktif dibandingkan perempuan. Sementara itu, jumlah pengangguran tercatat sebanyak 3.999 orang, terdiri dari 2.267 laki-laki dan 1.732 perempuan.

Angkatan kerja di Kota Payakumbuh berjumlah 80.600 orang, dengan rincian 45.518 laki-laki dan 35.082 perempuan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki mencapai 81,38 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan yang sebesar 62,51 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi masih lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Perbedaan tersebut berkaitan erat dengan tingginya jumlah perempuan yang berada dalam kategori mengurus rumah tangga. Tercatat sebanyak 14.507 perempuan menjadikan kegiatan mengurus rumah tangga sebagai aktivitas utama, sedangkan laki-laki yang berada pada kategori ini hanya 2.319 orang. Data ini menggambarkan bahwa perempuan masih memikul peran domestik yang cukup besar, sehingga dapat membatasi kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam pasar kerja.

Selain itu, jumlah penduduk yang masih bersekolah mencapai 9.912 orang, dengan jumlah perempuan (5.053 orang) sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki (4.859 orang). Kondisi ini menunjukkan adanya partisipasi pendidikan yang relatif baik bagi perempuan, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia perempuan pada masa mendatang.

Dari sisi pengangguran, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) laki-laki dan perempuan relatif sama, yaitu masing-masing 4,98 persen dan 4,94 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peluang memperoleh pekerjaan bagi laki-laki dan perempuan yang masuk ke dalam angkatan kerja cenderung setara. Namun demikian, tantangan utama yang masih dihadapi adalah meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja melalui perluasan akses terhadap kesempatan kerja, peningkatan keterampilan, pengembangan kewirausahaan perempuan, serta penyediaan kebijakan yang mendukung keseimbangan antara peran domestik dan peran ekonomi perempuan.

Secara keseluruhan, data ketenagakerjaan Kota Payakumbuh Tahun 2025 menunjukkan bahwa kesenjangan gender lebih terlihat pada tingkat partisipasi dalam angkatan kerja daripada pada tingkat pengangguran. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan ekonomi perempuan perlu terus diperkuat agar perempuan dapat berperan lebih optimal dalam pembangunan ekonomi daerah tanpa mengabaikan peran strategisnya dalam keluarga dan masyarakat.

4.3.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang menunjukkan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Indikator ini memberikan gambaran mengenai tingkat keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi dan pasar kerja.

Pada tahun 2025, TPAK Kota Payakumbuh mencapai 71,93 persen. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki tercatat sebesar 81,38 persen, sedangkan TPAK perempuan sebesar 62,51 persen. Data ini menunjukkan bahwa partisipasi laki-laki dalam kegiatan ekonomi masih lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Tingginya TPAK laki-laki mencerminkan bahwa sebagian besar laki-laki usia kerja terlibat dalam aktivitas ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja. Sementara itu, TPAK perempuan yang lebih rendah menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah perempuan usia kerja yang belum masuk ke dalam angkatan kerja. Kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh peran perempuan dalam mengurus rumah tangga, yang masih menjadi aktivitas utama bagi sebagian besar perempuan di Kota Payakumbuh.

Meskipun demikian, capaian TPAK perempuan yang telah mencapai lebih dari 60 persen menunjukkan bahwa perempuan memiliki kontribusi yang cukup besar dalam aktivitas ekonomi daerah. Hal ini mengindikasikan semakin meningkatnya

kesadaran dan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia kerja, baik di sektor formal maupun informal.

Perbedaan TPAK antara laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan gender dalam partisipasi ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja, seperti peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan, pengembangan kewirausahaan perempuan, penyediaan lapangan kerja yang ramah perempuan, serta dukungan terhadap keseimbangan antara peran domestik dan peran produktif. Dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, diharapkan kontribusi perempuan terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan keluarga di Kota Payakumbuh akan semakin optimal.

4.3.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang menunjukkan persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan kondisi pasar kerja dan kemampuan perekonomian dalam menyerap tenaga kerja yang tersedia.

Pada tahun 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Payakumbuh tercatat sebesar 4,96 persen. Berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki sebesar 4,98 persen dan TPT perempuan sebesar 4,94 persen. Perbedaan yang sangat kecil antara TPT laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa

peluang memperoleh pekerjaan bagi kedua kelompok relatif seimbang.

Jumlah pengangguran di Kota Payakumbuh mencapai 3.999 orang, terdiri dari 2.267 laki-laki dan 1.732 perempuan. Meskipun jumlah pengangguran laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, hal ini sejalan dengan jumlah angkatan kerja laki-laki yang juga lebih besar. Oleh karena itu, tingkat pengangguran antara laki-laki dan perempuan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan.

TPT yang berada di bawah 5 persen menunjukkan kondisi ketenagakerjaan yang relatif baik. Angka ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk yang aktif dalam angkatan kerja telah terserap dalam kegiatan ekonomi. Namun demikian, keberadaan pengangguran tetap menjadi perhatian karena dapat berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat dan produktivitas ekonomi daerah.

Dalam perspektif gender, kesetaraan TPT antara laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa ketika perempuan masuk ke dalam angkatan kerja, mereka memiliki peluang yang hampir sama dengan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan. Tantangan yang lebih besar justru terletak pada peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, mengingat masih banyak perempuan usia kerja yang berada di luar angkatan kerja karena menjalankan peran domestik, terutama mengurus rumah tangga.

Oleh karena itu, upaya penurunan pengangguran perlu terus dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan

kualitas sumber daya manusia, pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, serta penguatan program pemberdayaan ekonomi perempuan. Dengan demikian, kesempatan kerja yang lebih luas dapat tercipta bagi seluruh penduduk, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Payakumbuh.

4.3.4 Penduduk Yang Bekerja

Penduduk yang bekerja merupakan bagian dari angkatan kerja yang melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan memperoleh pendapatan atau keuntungan. Indikator ini penting untuk menggambarkan tingkat penyerapan tenaga kerja serta kontribusi penduduk terhadap aktivitas perekonomian daerah.

Pada tahun 2025, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di Kota Payakumbuh mencapai 76.601 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 43.251 orang atau sekitar 56,46 persen adalah laki-laki, sedangkan 33.350 orang atau sekitar 43,54 persen adalah perempuan. Data ini menunjukkan bahwa laki-laki masih mendominasi pasar kerja di Kota Payakumbuh.

Perbedaan jumlah penduduk yang bekerja antara laki-laki dan perempuan berkaitan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja yang juga lebih tinggi pada laki-laki. Selain itu, masih banyak perempuan yang memilih atau menjalankan peran utama sebagai pengurus rumah tangga, sehingga tidak termasuk dalam kelompok penduduk yang bekerja. Kondisi ini mencerminkan

bahwa pembagian peran gender dalam rumah tangga masih memengaruhi tingkat keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi.

Meskipun demikian, jumlah perempuan yang bekerja mencapai lebih dari 33 ribu orang, menunjukkan bahwa perempuan memiliki kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi daerah. Keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor pekerjaan menjadi indikasi meningkatnya akses dan kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan produktif serta mendukung kesejahteraan keluarga.

Dalam perspektif gender, tingginya jumlah perempuan yang bekerja merupakan perkembangan positif karena menunjukkan semakin terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk berperan di sektor ekonomi. Namun demikian, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan akses perempuan terhadap pekerjaan yang layak, kesempatan berwirausaha, pelatihan keterampilan, serta perlindungan tenaga kerja yang responsif gender.

Penduduk yang bekerja dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, status perkawinan, lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama dan bekerja di sektor formal dan informal menurut daerah tempat tinggal dan jenis kelamin.

a. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kualitas sumber daya manusia dan peluang seseorang untuk memperoleh pekerjaan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki, semakin besar peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, produktif, dan memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pendidikan menjadi salah satu indikator penting dalam analisis ketenagakerjaan, khususnya dalam melihat kualitas tenaga kerja dari perspektif gender.

Dalam konteks ketenagakerjaan, tingkat pendidikan berperan dalam meningkatkan kemampuan, keterampilan, serta daya saing tenaga kerja di pasar kerja. Tenaga kerja dengan pendidikan yang lebih tinggi umumnya memiliki akses yang lebih luas terhadap pekerjaan di sektor formal dan profesi yang membutuhkan keahlian khusus. Sebaliknya, tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung bekerja pada sektor informal atau pekerjaan yang memerlukan keterampilan terbatas.

Dari perspektif gender, pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan partisipasi perempuan di dunia kerja. Perempuan yang memperoleh akses pendidikan yang setara dengan laki-laki memiliki peluang yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, memperoleh pekerjaan yang layak, serta meningkatkan kemandirian ekonomi.

Pendidikan juga menjadi sarana penting untuk mengurangi kesenjangan gender dalam kesempatan kerja dan pendapatan.

Peningkatan tingkat pendidikan perempuan tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi keluarga dan masyarakat. Perempuan yang berpendidikan cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam pengambilan keputusan, pengelolaan ekonomi keluarga, serta dalam mendukung pendidikan dan kesehatan anggota keluarga. Dengan demikian, pendidikan menjadi investasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi laki-laki dan perempuan perlu terus dilakukan untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia kerja. Kesetaraan akses pendidikan juga menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender di Kota Payakumbuh.

Di Kota Payakumbuh Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 14
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Lapangan Pekerjaan
Utama dan Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2025

Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	L + P
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	9.169	4.311	9.008
Industri Pengolahan/Manufaktur	9.670	5.110	14.459
Perdagangan/Jasa	24.412	23.929	46.660
Jumlah	43.251	33.350	76.601
2024	40.124	30.003	70.127

Sumber : BPS Kota Payakumbuh

Lapangan pekerjaan utama merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan struktur perekonomian suatu daerah serta pola penyerapan tenaga kerja berdasarkan sektor ekonomi. Distribusi tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan juga dapat memberikan gambaran mengenai keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam berbagai sektor ekonomi.

Pada tahun 2025, jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja di Kota Payakumbuh tercatat sebanyak 76.601 orang, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 70.127 orang. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan kesempatan kerja dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja di Kota Payakumbuh.

Berdasarkan lapangan pekerjaan utama, sektor Perdagangan dan Jasa merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, yaitu sebanyak 46.660 orang. Dari jumlah tersebut, 24.412 orang adalah laki-laki dan 23.929 orang perempuan. Besarnya penyerapan tenaga kerja pada sektor ini menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan dan jasa menjadi

penggerak utama perekonomian Kota Payakumbuh. Selain itu, keterlibatan perempuan yang hampir setara dengan laki-laki menunjukkan bahwa sektor perdagangan dan jasa merupakan sektor yang cukup terbuka bagi tenaga kerja perempuan.

Sektor Industri Pengolahan atau Manufaktur menempati urutan kedua dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 14.459 orang, terdiri dari 9.670 laki-laki dan 5.110 perempuan. Dominasi tenaga kerja laki-laki pada sektor ini menunjukkan bahwa pekerjaan di bidang industri masih lebih banyak melibatkan laki-laki, terutama pada pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik atau keterampilan teknis tertentu.

Sementara itu, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menyerap sekitar 9.008 tenaga kerja. Jumlah pekerja laki-laki pada sektor ini mencapai 9.169 orang, sedangkan perempuan sebanyak 4.311 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor primer masih menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian masyarakat, meskipun kontribusinya lebih kecil dibandingkan sektor perdagangan dan jasa. Dominasi laki-laki pada sektor ini juga mencerminkan karakteristik pekerjaan pertanian yang umumnya lebih banyak dilakukan oleh laki-laki.

Dari perspektif gender, data menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang cukup besar dalam aktivitas ekonomi, terutama pada sektor perdagangan dan jasa. Namun demikian, keterlibatan perempuan pada sektor industri dan pertanian masih relatif lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Kondisi ini mengindikasikan masih adanya perbedaan pola pekerjaan berdasarkan gender yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, tingkat pendidikan, keterampilan, maupun akses terhadap kesempatan kerja.

b. Status Perkawinan Pekerja

Gambaran perempuan dan laki-laki usia 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu lalu berdasarkan status perkawinannya dapat dilihat melalui empat status, yaitu belum kawin, kawin, cerai hidup, dan cerai mati. Persentase perempuan yang berstatus kawin menempati persentase terbesar pada status perkawinan perempuan yang bekerja selama seminggu yang lalu.

c. Partisipasi Angkatan Kerja

Angka partisipasi angkatan kerja menyajikan data yang menggambarkan banyak angkatan kerja yaitu penduduk yang sedang bekerja dan yang mencari pekerjaan dari usia 15 tahun keatas. Data ini bermanfaat untuk mengetahui bagian dari tenaga kerja yang benar-benar terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif yang menghasilkan barang dan jasa dalam waktu tertentu. Di Kota Payakumbuh Jumlah penduduk produktif dan tidak produktif menurut kelompok umur dan jenis kelamin pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 15
Jumlah Penduduk Produktif dan Tidak Produktif Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2025

No	Struktur Umur	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki + Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1	0-14 (Umur Muda)	19.093	25,12	17.709	23,66	36.802	24,39
2	15-64 (Umur Produktif)	51.912	68,29	50.831	67,91	102.743	68,10
3	> 65 (Umur Tua)	5.015	6,60	6.309	8,43	11.324	7,51
	Jumlah	76.020	100	74.849	100	150.869	100

Sumber : Disdukcapil Kota Payakumbuh

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Tahun 2025, jumlah penduduk Kota Payakumbuh tercatat sebanyak 150.869 jiwa, yang terdiri dari 76.020 laki-laki dan 74.849 perempuan. Ditinjau berdasarkan kelompok umur, sebagian besar penduduk berada pada usia produktif, yang menunjukkan bahwa Kota Payakumbuh memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup besar untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial.

Kelompok umur 15–64 tahun (usia produktif) merupakan kelompok yang paling dominan, dengan jumlah 102.743 jiwa atau sekitar 68,10 persen dari total penduduk. Dari jumlah tersebut, terdapat 51.912 laki-laki (68,29 persen) dan 50.831 perempuan (67,91 persen). Besarnya proporsi penduduk usia produktif ini menunjukkan bahwa Kota Payakumbuh sedang berada pada kondisi yang mendukung terciptanya bonus demografi, yaitu keadaan ketika jumlah penduduk usia kerja lebih besar dibandingkan penduduk usia nonproduktif.

Sementara itu, kelompok umur 0–14 tahun (usia muda) berjumlah 36.802 jiwa atau 24,39 persen dari total penduduk, yang terdiri dari 19.093 laki-laki (25,12 persen) dan 17.709 perempuan (23,66 persen). Proporsi penduduk usia muda yang masih cukup besar menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan anak masih menjadi aspek penting dalam pembangunan daerah.

Adapun penduduk berusia 65 tahun ke atas (usia tua) berjumlah 11.324 jiwa atau sekitar 7,51 persen dari total penduduk. Pada kelompok ini, jumlah perempuan mencapai 6.309 jiwa (8,43 persen), lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang berjumlah 5.015 jiwa (6,60 persen). Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki harapan hidup yang relatif lebih tinggi dibandingkan laki-laki, sehingga jumlah perempuan lanjut usia lebih banyak. Hal tersebut sekaligus mengindikasikan perlunya perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan kesehatan, perlindungan sosial, dan peningkatan kesejahteraan bagi penduduk lanjut usia, khususnya perempuan lansia.

Dari perspektif gender, distribusi penduduk menurut kelompok umur memperlihatkan bahwa perempuan memiliki proporsi yang hampir seimbang dengan laki-laki pada usia produktif. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki potensi yang sama untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang pembangunan, baik di sektor ekonomi, pendidikan, sosial, maupun pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia perempuan melalui akses terhadap

pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, serta pemberdayaan ekonomi menjadi sangat penting agar potensi perempuan usia produktif dapat dimanfaatkan secara optimal.

Secara keseluruhan, struktur penduduk Kota Payakumbuh pada tahun 2025 masih didominasi oleh kelompok usia produktif, sehingga memberikan peluang yang besar bagi daerah untuk memperoleh manfaat bonus demografi. Namun demikian, upaya pembangunan yang responsif gender perlu terus dilakukan agar perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara dalam berkontribusi terhadap pembangunan serta memperoleh manfaat yang sama dari hasil-hasil pembangunan tersebut.

d. Status Pekerjaan Utama

Status pekerjaan utama dalam kategori pekerja keluarga menunjukkan keadaan tenaga kerja Indonesia masih dipengaruhi oleh cara pandang yang membakukan peran gender. Ruang domestik yang dikonstruksi sebagai ruang milik perempuan masih tergambar pada status pekerjaan pada kategori pekerja keluarga. Jenis-jenis pekerjaan yang berbasis pengasuhan dan perawatan keluarga masih dianggap sebagai pekerjaan perempuan. Tahun 2025 di Kota Payakumbuh Persentase Penduduk Bekerja Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 16
Jumlah Penduduk Bekerja Status Pekerjaan Utama dan
Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2025

No	Status Pekerjaan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Berusaha Sendiri	11.742	6.629
2	Berusaha diBantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	5.731	4.611
3	Berusaha diBantu Buruh Tetap/Buruh diBayar	2.925	1.542
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	15.209	12.824
5	Pekerja Bebas	1.552	1.084
6	Pekerja Keluarga atau Tidak Dibayar	2.251	5.437
Total		43.251	33.350

Sumber : BPS Kota Payakumbuh

Status pekerjaan merupakan salah satu indikator penting dalam analisis ketenagakerjaan karena dapat menggambarkan posisi seseorang dalam kegiatan ekonomi, tingkat kemandirian usaha, serta kualitas pekerjaan yang dimiliki. Analisis status pekerjaan juga memberikan gambaran mengenai peran dan kontribusi laki-laki serta perempuan dalam pasar kerja.

Pada tahun 2025, jumlah penduduk bekerja di Kota Payakumbuh mencapai 76.601 orang, yang terdiri dari 43.251 laki-laki dan 33.350 perempuan. Berdasarkan status pekerjaan utama, sebagian besar penduduk bekerja sebagai buruh, karyawan, atau pegawai. Jumlah pekerja pada kategori ini mencapai 28.033 orang, terdiri dari 15.209 laki-laki dan 12.824 perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pekerjaan formal masih menjadi sumber mata pencaharian utama bagi sebagian besar tenaga kerja di Kota Payakumbuh.

Status pekerjaan terbesar berikutnya adalah berusaha sendiri, dengan jumlah 18.371 orang yang terdiri dari 11.742 laki-laki dan 6.629 perempuan. Tingginya jumlah pekerja yang berusaha sendiri menunjukkan berkembangnya aktivitas kewirausahaan dan usaha mikro di Kota Payakumbuh. Namun demikian, jumlah laki-laki yang berusaha sendiri masih lebih banyak dibandingkan perempuan, yang mengindikasikan adanya perbedaan akses, modal usaha, maupun peluang pengembangan usaha antara laki-laki dan perempuan.

Pada kategori berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar, terdapat 10.342 pekerja yang terdiri dari 5.731 laki-laki dan 4.611 perempuan. Sementara itu, pekerja yang berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar berjumlah 4.467 orang, dengan 2.925 laki-laki dan 1.542 perempuan. Data ini menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha telah mampu mengembangkan usahanya hingga mempekerjakan tenaga kerja lain, meskipun jumlahnya masih relatif terbatas.

Jumlah pekerja bebas tercatat sebanyak 2.636 orang, terdiri dari 1.552 laki-laki dan 1.084 perempuan. Kelompok ini umumnya bekerja secara mandiri tanpa ikatan kerja tetap dan sering dijumpai pada sektor informal. Keberadaan pekerja bebas menunjukkan fleksibilitas pasar kerja, namun pada saat yang sama juga menggambarkan adanya kelompok pekerja yang rentan terhadap ketidakpastian pendapatan dan perlindungan kerja.

Perbedaan yang cukup mencolok terlihat pada kategori pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar. Jumlah perempuan dalam kategori ini mencapai 5.437 orang, jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang berjumlah 2.251 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan masih banyak terlibat dalam kegiatan usaha keluarga tanpa memperoleh upah secara langsung. Fenomena ini mencerminkan masih kuatnya peran perempuan dalam mendukung ekonomi rumah tangga melalui pekerjaan yang sering kali tidak tercatat atau tidak memperoleh imbalan ekonomi yang memadai.

Dari perspektif gender, data status pekerjaan menunjukkan bahwa perempuan telah berpartisipasi dalam berbagai jenis pekerjaan, baik sebagai pekerja formal, pelaku usaha, maupun pekerja keluarga. Namun demikian, perempuan masih lebih banyak terkonsentrasi pada pekerjaan yang rentan dan kurang memberikan perlindungan ekonomi dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses perempuan terhadap pekerjaan yang layak, kesempatan berwirausaha, akses permodalan, serta perlindungan tenaga kerja yang responsif gender.

e. Pekerja Sektor Formal

Partisipasi perempuan di dunia kerja tidak hanya terbatas pada kerja di sektor formal saja. Perempuan juga memiliki peran yang signifikan pada kerja-kerja informal. Kerja di sektor informal merupakan peluang kerja alternatif yang memberi harapan pendapatan yang tidak selalu lebih kecil dibandingkan kerja di

sector formal. Di negara berkembang, kerja informal menjadi kekuatan ekonomi yang dapat merefleksikan kemandirian penduduknya dalam pemanfaatan sumber-sumber daya lokal yang ada. Termasuk pada perempuan, partisipasi di bidang kerja informal menjadi peluang tumbuhnya ekonomi kreatif yang inovatif dan mandiri bagi upaya pemberdayaan perempuan. Namun di Kota Payakumbuh tahun 2025 yang ada datanya baru pekerja di sektor formal yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 17
Pekerja Di Sektor Formal Menurut Jenis Kelamin
di Kota Payakumbuh Tahun 2025

No	Jenis Kelamin	Pekerja sektor formal
1	Laki-Laki	15.209
2	Perempuan	12.824
	Jumlah	28.033

Sumber : Disnakerperind Kota Payakumbuh

Pekerja di sektor formal merupakan tenaga kerja yang bekerja pada unit usaha atau lembaga yang memiliki struktur organisasi yang jelas, hubungan kerja yang resmi, serta umumnya memperoleh perlindungan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keberadaan sektor formal menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas ketenagakerjaan karena sektor ini cenderung memberikan kepastian pendapatan, jaminan sosial, dan perlindungan kerja yang lebih baik dibandingkan sektor informal.

Berdasarkan data Tahun 2025, jumlah pekerja di sektor formal di Kota Payakumbuh mencapai 28.033 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15.209 orang atau sekitar 54,26 persen merupakan laki-laki, sedangkan 12.824 orang atau sekitar 45,74 persen merupakan perempuan. Data ini menunjukkan bahwa laki-laki masih mendominasi pekerjaan di sektor formal, meskipun keterlibatan perempuan juga cukup tinggi dan mendekati setengah dari total pekerja formal.

Tingginya jumlah perempuan yang bekerja di sektor formal merupakan indikator positif dalam pembangunan gender karena menunjukkan semakin terbukanya akses perempuan terhadap pekerjaan yang lebih layak dan terlindungi. Kesempatan kerja formal memberikan manfaat yang lebih besar bagi perempuan, seperti kepastian pendapatan, akses terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan, perlindungan hukum, serta peluang pengembangan karier yang lebih baik.

Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan jumlah pekerja formal antara laki-laki dan perempuan. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, tanggung jawab domestik yang lebih besar pada perempuan, serta keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal pada beberapa sektor tertentu.

Jika dibandingkan dengan total penduduk yang bekerja sebanyak 76.601 orang, maka pekerja sektor formal mencapai

sekitar 36,60 persen dari seluruh tenaga kerja di Kota Payakumbuh. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja masih bekerja di sektor informal atau usaha mandiri. Oleh karena itu, peningkatan kesempatan kerja formal menjadi salah satu tantangan penting dalam pembangunan ketenagakerjaan daerah.

Dari perspektif gender, peningkatan jumlah pekerja perempuan di sektor formal perlu terus didorong melalui peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan, perluasan kesempatan kerja yang setara, penghapusan diskriminasi di tempat kerja, serta penguatan kebijakan yang mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga. Upaya tersebut penting untuk memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif.

Secara keseluruhan, data pekerja sektor formal Tahun 2025 menunjukkan bahwa perempuan telah memiliki peran yang cukup signifikan dalam dunia kerja formal di Kota Payakumbuh. Namun demikian, masih diperlukan berbagai kebijakan dan program yang mendukung peningkatan akses perempuan terhadap pekerjaan formal agar tercipta pembangunan ketenagakerjaan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan responsif gender.

f. Pekerja Migran

Bermigrasi berarti pindah ke tempat lain. Pergerakan orang-orang ini dapat terjadi di dalam sebuah negara ini yang disebut sebagai migrasi internal. Migrasi juga dapat terjadi ketika orang-orang berpindah dari sebuah negara ke negara lain disebut sebagai migrasi eksternal atau emigrasi. Sedangkan Migrasi perburuhan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pergerakan/migrasi yang dilakukan orang dari sebuah tempat ke tempat lain, dengan tujuan bekerja atau menemukan pekerjaan. Ketika bermigrasi, mereka diklasifikasikan sebagai pekerja migran. Migrasi perburuhan mencakup berbagai jenis pekerja migran, mulai dari pekerja kontrak yang kurang terampil hingga semi dan sangat terampil. Dalam konteks migrasi perburuhan, negara-negara tempat para migran berasal disebut sebagai negara pengirim dan negara yang dituju disebut sebagai negara tujuan atau negara tuan rumah. Di Kota Payakumbuh pada tahun 2025 tenaga kerja migran antar negara dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 18
Tenaga Kerja Migran Antar Negara (AKAN) Menurut Jenis Kelamin
di Kota Payakumbuh Tahun 2025

No	Kecamatan	Tenaga Kerja Migran Antar Kerja Antar Negara (AKAN)		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Payakumbuh Utara	1	1	2
2	Payakumbuh Selatan	-	-	-
3	Payakumbuh Barat	2	-	2
4	Payakumbuh Timur	-	-	-
5	Lamposi Tigo Nagori	-	-	-
Jumlah		3	1	4

Sumber : Disnakerperind Kota Payakumbuh

Tenaga Kerja Migran Antar Negara (AKAN) merupakan penduduk yang bekerja atau memperoleh pekerjaan di luar negeri melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan tenaga kerja migran menjadi salah satu alternatif dalam meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan pendapatan masyarakat melalui remitansi yang dikirimkan kepada keluarga di daerah asal.

Berdasarkan data Tahun 2025, jumlah Tenaga Kerja Migran Antar Negara (AKAN) yang berasal dari Kota Payakumbuh tercatat sebanyak 4 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3 orang adalah laki-laki dan 1 orang perempuan. Data ini menunjukkan bahwa keterlibatan laki-laki dalam pekerjaan migran internasional masih lebih dominan dibandingkan perempuan.

Menurut kecamatan, tenaga kerja migran terbanyak berasal dari Kecamatan Payakumbuh Barat dengan jumlah 2 orang, seluruhnya laki-laki. Sementara itu, Kecamatan Payakumbuh Utara memiliki 2 orang tenaga kerja migran yang terdiri dari 1 laki-laki dan 1 perempuan. Adapun Kecamatan Payakumbuh Selatan, Payakumbuh Timur, dan Lamposi Tigo Nagori tidak tercatat memiliki tenaga kerja migran antar negara pada tahun 2025.

Jumlah tenaga kerja migran yang relatif sedikit menunjukkan bahwa bekerja ke luar negeri bukan merupakan pilihan utama bagi sebagian besar penduduk Kota Payakumbuh.

Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh tersedianya peluang kerja di dalam negeri, keterbatasan minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri, maupun persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi untuk menjadi pekerja migran.

Dari perspektif gender, keterlibatan perempuan dalam migrasi kerja internasional masih sangat terbatas. Rendahnya jumlah pekerja migran perempuan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tanggung jawab domestik dan pengasuhan dalam keluarga, pertimbangan keamanan, serta preferensi untuk bekerja di daerah asal. Namun demikian, keberadaan pekerja migran perempuan menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki kesempatan untuk mengakses pasar kerja internasional dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga.

Meskipun jumlahnya relatif kecil, tenaga kerja migran tetap memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi karena dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui remitansi serta mendorong transfer pengalaman dan keterampilan yang diperoleh selama bekerja di luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus memberikan informasi, pembinaan, pelatihan, dan perlindungan bagi calon pekerja migran, baik laki-laki maupun perempuan, agar mereka dapat bekerja secara aman, legal, dan produktif.

BAB V

PEREMPUAN DAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI (IP-TIK)

5.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan komunikasi (IP-TIK) telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kemajuan tersebut memberikan peluang yang semakin luas bagi perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup, memperluas akses terhadap pendidikan, memperoleh informasi, meningkatkan keterampilan, serta berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan pembangunan. Pemanfaatan IP-TIK juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong terwujudnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Ilmu pengetahuan, Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (IPTIK) merupakan bagian dari kebutuhan mendasar dalam upaya percepatan pembangunan suatu negara. Daya saing bangsa dalam menghadapi persaingan global membutuhkan kualitas pengetahuan, teknologi, dan komunikasi yang tinggi. Melalui IP-TIK, sejumlah kreativitas, inovasi, dan rekayasa pembangunan dapat dimaksimalkan demi tujuan mewujudkan cita-cita luhur bangsa, pembangunan yang merata, dan berkeadilan bagi perempuan dan laki-laki. Baik di bidang sosial budaya, pendidikan, ketahanan, keamanan, dan ekonomi, IP-TIK

dapat diintegrasikan sebagai strategi pembangunan berkelanjutan.

Di era digital, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Perempuan memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dalam keluarga dan masyarakat, sehingga peningkatan kemampuan dan akses perempuan terhadap IP-TIK merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan perempuan memperoleh akses yang lebih mudah terhadap pendidikan, layanan kesehatan, peluang usaha, serta berbagai informasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga.

Keseimbangan akses terhadap sumber daya IP-TIK bagi perempuan dan laki-laki dan masih adanya kesenjangan laki-laki dan perempuan di bidang IP-TIK menjadi fokus pemerintah, selain pembangunan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas pembangunan IP-TIK. Pemerataan pembangunan dapat dicapai secara ideal dan proses pembangunan akan memberikan manfaat yang berkeadilan jika perempuan juga maju dan mumpuni di bidang IP-TIK. Oleh karena itu, sinergi triple helix yang terjadi antara pemerintah, perguruan tinggi/lembaga riset, dan industri/dunia usaha dengan memaksimalkan peran serta masyarakat menjadi kekuatan dalam pembangunan IP-TIK yang berkeadilan gender dan merata bagi seluruh bangsa Indonesia.

5.2 Definisi Konseptual

5.2.1 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK)

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) dikembangkan oleh International Telecommunication Union (ITU) dengan nama ICT Development Index (ICT DI). IPTIK digunakan untuk mengukur standar tingkat pembangunan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) di suatu wilayah yang dapat dibandingkan antarwaktu dan antarwilayah. IP-TIK juga digunakan untuk mengukur pertumbuhan pembangunan TIK, mengukur gap digital atau kesenjangan digital antarwilayah, dan mengukur potensi pembangunan TIK. Bappenas melakukan penghitungan IP-TIK dengan metode terkini berdasarkan buku *Measuring Information Society 2016* yang dipublikasikan oleh ITU. Di dalam penghitungannya terdapat 11 indikator penyusun IP-TIK yang terbagi dalam 3 subindeks yaitu subindeks akses dan infrastruktur, subindeks penggunaan, dan subindeks keahlian (Bappenas, 2018).

5.2.2. Kepemilikan Perangkat Informasi dan Komunikasi

Penjelasan konseptual pada sejumlah konsep merujuk pada definisi operasional dalam laman sistem informasi rujukan statistik (Sirusa) Badan Pusat Statistik.

a. Persentase Rumah Tangga dengan Komputer

Komputer merupakan komputer desktop, komputer laptop (portabel), computer berbentuk tablet atau komputer genggam

dan sejenisnya. Pembatasan pengertian computer di sini, tidak termasuk peralatan lain yang memiliki kemampuan komputasi tertanam, seperti perangkat televisi pintar, atau perangkat dengan fungsi utama telepon, seperti ponsel atau smartphone. Rumah tangga dengan komputer berarti bahwa komputer tersedia untuk digunakan oleh semua anggota rumah tangga kapan saja. Komputer mungkin dimiliki atau mungkin tidak dimiliki oleh rumah tangga, tetapi harus dianggap sebagai aset rumah tangga

b. Pelanggan Telpon Tetap per 100 penduduk

Istilah “pelanggan telepon tetap” mengacu pada jumlah saluran telepon tetap analog yang aktif, langganan Voice-over-Internet Protocol (VoIP), pelanggan lokal tetap nirkabel, Integrated Services Digital Network setara dengan saluran suara dan telepon umum. Ini mencakup semua akses melalui infrastruktur tetap (fixed) yang mendukung telepon suara menggunakan kabel tembaga, layanan suara menggunakan Protokol Internet (IP) yang disampaikan melalui infrastruktur fixed broadband (misalnya digital subscriber line (DSL), serat optik), dan layanan suara yang disediakan melalui jaringan televisi kabel coaxial (modem kabel).

c. Pelanggan Telpon Seluler per 100 penduduk

Istilah “pelanggan telepon seluler” mengacu pada jumlah pelanggan ke layanan telepon seluler publik yang menyediakan akses ke jaringan telepon umum yang menggunakan teknologi

seluler. Ini mencakup jumlah pelanggan pascabayar dan prabayar aktif selama tiga bulan sebelumnya. Tidak termasuk langganan melalui kartu data atau modem USB, langganan ke layanan data seluler publik, radio seluler trunked pribadi, telepoint, paging radio, M2M (machine-to-machine) dan layanan telemetri.

5.2.3 Akses Informasi dan Komunikasi

Rumah tangga dengan akses internet merupakan rumah tangga yang minimal terdapat satu anggota rumah tangga yang mengakses internet, baik melalui jaringan tetap atau seluler. Rumah tangga dengan akses Internet berarti bahwa internet tersedia untuk digunakan oleh semua anggota rumah tangga kapan saja. Persentase Individu yang menggunakan Internet (percentage of individual using the internet) Individu yang menggunakan internet mengacu pada individu berusia lima tahun ke atas yang menggunakan internet tanpa mempertimbangkan lokasi, tujuan, serta perangkat dan jaringan yang digunakan dalam tiga bulan terakhir. Penggunaan dapat melalui komputer (misalnya komputer desktop, laptop, tablet atau komputer genggam sejenis), ponsel, mesin game, televisi digital, dan lainnya. Akses dapat melalui jaringan tetap atau seluler.

5.2.4 Partisipasi dalam Berkomunikasi dan Informasi

Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam

pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator ini digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekunder adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMP/ sederajat sampai dengan SMA/ sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama (13-18 tahun). Tingkat pendidikan ini berdasarkan klasifikasi International Standard Classification of Education (ISCED) 2011 dimana pendidikan tersier termasuk pada ISCED 3 dan 4 yang di Indonesia setara dengan SMP/ sederajat hingga SMA/ sederajat.

5.2 Pembahasan

1. Penggunaan dan Kepemilikan Telpon Seluler (HP) dan Komputer (PC/Desktop/Laptop/Notebook/Tablet)

Lima tahun terakhir, pengguna teknologi informasi dan komunikasi oleh rumah tangga di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Persentase penduduk yang menggunakan telpon seluler terus mengalami peningkatan yang diikuti pula oleh pertumbuhan penggunaan komputer dan kepemilikan akses internet dalam rumah tangga. Di Kota Payakumbuh tahun 2025 persentase anggota rumah tangga berusia 5 tahun ke atas menurut karakteristik dan pengguna teknologi informasi selama tiga bulan terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 19
Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas
Menurut Karakteristik dan Pengguna Teknologi Informasi Selama
Tiga Bulan Terakhir di Kota Payakumbuh Tahun 2025

No	Karakteristik	Menggunakan Telpon Seluler (HP), Nirkabel atau Komputer (PC, Desktop, Laptop/Notebook, Tablet)	Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, BBM, whatsapp)
1	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	94,26	89,01
	Perempuan	93,83	87,29
2	Kuintil Pengeluaran		
	40 Persen Terbawah	91,20	83,74
	40 Persen Tengah	94,98	89,30
	20 Persen Teratas	97,59	94,21
3	Pendidikan Tinggi ART		
	SD ke Bawah	87,76	77,67
	SMP ke Atas	97,54	93,98
	Jumlah	94,04	88,15
	2024	93,39	75,29

Sumber : BPS Kota Payakumbuh

Berdasarkan data BPS Kota Payakumbuh Tahun 2025, tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh anggota rumah tangga berusia 5 tahun ke atas tergolong tinggi. Secara keseluruhan, sebanyak 94,04 persen penduduk menggunakan telepon seluler, komputer, atau perangkat nirkabel lainnya, sedangkan 88,15 persen telah mengakses internet dalam tiga bulan terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Kota Payakumbuh.

Ditinjau menurut jenis kelamin, terdapat perbedaan yang relatif kecil antara laki-laki dan perempuan dalam penggunaan teknologi informasi. Sebanyak 94,26 persen laki-laki menggunakan telepon seluler atau komputer, sedangkan pada perempuan sebesar 93,83 persen. Demikian pula dalam

penggunaan internet, persentase laki-laki mencapai 89,01 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan yang sebesar 87,29 persen. Kecilnya kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa perempuan di Kota Payakumbuh telah memiliki akses yang hampir setara dengan laki-laki dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Menurut kelompok pengeluaran, terlihat bahwa semakin tinggi tingkat kesejahteraan rumah tangga, semakin tinggi pula tingkat pemanfaatan teknologi informasi. Pada kelompok 40 persen terbawah, persentase penggunaan perangkat teknologi mencapai 91,20 persen dan akses internet sebesar 83,74 persen. Persentase tersebut meningkat pada kelompok 40 persen tengah, yaitu masing-masing sebesar 94,98 persen dan 89,30 persen. Sementara itu, pada kelompok 20 persen teratas, penggunaan perangkat teknologi mencapai 97,59 persen dan akses internet sebesar 94,21 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi berpengaruh terhadap akses dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi anggota rumah tangga, terlihat adanya perbedaan yang cukup nyata. Anggota rumah tangga dengan pendidikan SD ke bawah memiliki tingkat penggunaan perangkat teknologi sebesar 87,76 persen dan akses internet sebesar 77,67 persen. Sebaliknya, anggota rumah tangga dengan pendidikan SMP ke atas menunjukkan tingkat pemanfaatan yang jauh lebih tinggi, yaitu 97,54 persen untuk penggunaan perangkat teknologi dan 93,98 persen untuk akses

internet. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Dari perspektif profil perempuan, tingginya tingkat penggunaan teknologi oleh perempuan di Kota Payakumbuh merupakan modal yang penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia perempuan. Akses terhadap teknologi informasi dan internet dapat membuka peluang yang lebih luas bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan, meningkatkan keterampilan, mengembangkan usaha, serta memperoleh berbagai informasi yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan kecil antara perempuan dan laki-laki dalam pemanfaatan internet, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan literasi digital dan memperluas akses teknologi bagi seluruh perempuan, terutama yang berasal dari kelompok ekonomi rendah dan berpendidikan rendah.

Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Kota Payakumbuh telah memberikan peluang yang semakin besar bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas perempuan dalam pemanfaatan IP-TIK perlu terus didorong sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

BAB VI

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

6.1 Latar Belakang

Kepemimpinan perempuan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif. Perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, dunia kerja, maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan perempuan dalam posisi kepemimpinan menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat pemberdayaan perempuan dan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang responsif gender.

Dalam berbagai bidang kehidupan, perempuan memiliki potensi dan kapasitas yang besar untuk menjadi pemimpin yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan. Kehadiran perempuan dalam posisi strategis dapat memperkaya perspektif dalam perumusan kebijakan, mendorong terciptanya keputusan yang lebih inklusif, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan dan kepentingan seluruh kelompok masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan representasi perempuan dalam kepemimpinan menjadi salah satu upaya untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam pembangunan.

Meskipun demikian, perempuan masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses posisi-posisi kepemimpinan. Faktor sosial budaya, stereotip gender, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan sumber daya, serta masih adanya pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan menjadi beberapa kendala yang dapat memengaruhi keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut menyebabkan partisipasi perempuan dalam jabatan strategis dan kepemimpinan di berbagai sektor belum sepenuhnya seimbang.

Penyusunan Profil Perempuan pada aspek kepemimpinan perempuan menjadi penting untuk memberikan gambaran mengenai tingkat partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam berbagai posisi kepemimpinan, baik di bidang pemerintahan, politik, ekonomi, pendidikan, maupun organisasi kemasyarakatan. Data dan informasi yang tersaji dalam profil ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam mengidentifikasi capaian, peluang, serta tantangan yang dihadapi perempuan dalam memperoleh akses terhadap posisi pengambil keputusan.

Melalui penyusunan Profil Perempuan, diharapkan dapat tersedia informasi yang komprehensif mengenai kondisi kepemimpinan perempuan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan serta program yang mendukung peningkatan partisipasi dan kapasitas kepemimpinan perempuan. Dengan semakin meningkatnya keterlibatan

perempuan dalam berbagai posisi strategis, diharapkan terwujud pembangunan yang lebih adil, setara, dan berkelanjutan serta meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

6.2 Definisi Konseptual

6.2.1 Aparatur Negara

Aparatur negara merupakan bagian dari kelengkapan suatu negara, termasuk kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian. Aparatur negara memiliki tanggung jawab sebagai kepanjangan tangan negara dalam melaksanakan proses pemerintahan. Di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 8 dan 9 menjelaskan bahwa pegawai ASN memiliki kedudukan sebagai unsur aparatur negara. Pegawai ASN adalah orang yang melaksanakan kebijakan pemerintah dan memiliki keberpihakan kepada pemerintah. Oleh karena itu, pegawai ASN harus terbebas dari pengaruh atau intervensi dari kepentingan kelompok atau golongan tertentu, termasuk kepentingan partai politik.

Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari 2 kelompok, yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu seseorang yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). ASN yang telah diangkat memiliki nomor induk pegawai yang bersifat nasional. ASN kelompok kedua adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yaitu seseorang yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja ini diangkat sewaktu-waktu dengan menyesuaikan kebutuhan pemerintah terhadap jenis profesi atau keahlian yang sedang dibutuhkan (UU No. 5/2014).

Di dalam sistem aparatur negara, pejabat atau pimpinan ditunjuk dengan menyesuaikan kompetensi yang dibutuhkan (pasal 16). Terdapat 3 jenis jabatan yang diatur di dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, sebagaimana penjelasan berikut :

5.2.2 Jabatan Administrasi

Jabatan Administrasi terdiri dari Jabatan administrator, Jabatan pengawas dan Jabatan pelaksana. Masing-masing jabatan memiliki tanggung jawab yang berbeda. Jabatan administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, jabatan pengawas bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana, dan jabatan pelaksana melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

5.2.3 Jabatan Fungsional;

Jabatan Fungsional terdiri dari dua macam, yaitu jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional ketrampilan. Jabatan fungsional keahlian terdiri dari jabatan Ahli utama, Ahli madya, Ahli muda dan Ahli pertama. Untuk jabatan fungsional ketrampilan terdiri dari Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula.

5.2.4 Jabatan Pimpinan Tinggi.

Pasal 19 menyebutkan bahwa setiap jabatan Pimpinan Tinggi ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan. Jabatan Pimpinan Tinggi bertanggung jawab dalam memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah melalui 3 aspek utama, yaitu 1). Kepeloporan dalam bidang keahlian professional, analisis dan rekomendasi kebijakan, dan kepemimpinan manajemen; 2) Pengembangan kerjasama dengan instansi lain; dan 3) Keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN, dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN. Jabatan Pimpinan Tinggi dibagi dalam 3 tingkatan, yaitu jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan pimpinan tinggi pratama.

5.2.5 Parlemen

Di dalam UU No. 2 tahun 2011 tentang perubahan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai politik atau UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai politik di amanahkan bahwa pentingnya keterwakilan perempuan didalam sebuah partai politik dan menjadi sebuah persyaratan untuk mengikuti Pemilihan umum bagi semua partai politik dan partai politik harus memenuhi persyaratan itu. Keterwakilan perempuan sudah dibahas atau diterapkan melalui UU tentang politik yang terdahulu, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang karena hal itu masih dianggap kurang penting oleh partai poltik. Melalui UU tentang

partai politik regulasi mengenai keterwakilan perempuan didalam partai politik diperketat.

Isu gender sebagai suatu wacana dan gerakan untuk mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan telah menjadi pembicaraan yang menarik perhatian masyarakat. Pada satu sisi hubungan gender menjadi persoalan tersendiri, padahal secara fakta persoalan emansipasi kaum perempuan masih belum mendapat tempat yang sepenuhnya bisa diterima. Perempuan diberikan kebebasan untuk memperoleh pendidikan dan kesempatan untuk bekerja tetapi mereka tetap diikat dengan aturan patriarki yang relatif menghambat dan memberikan kondisi dilematis terhadap posisi mereka. Disini dibutuhkan pengertian dari konsep gender agar masyarakat dapat membedakan antara gender dan emansipasi perempuan.

5.3 Pembahasan

5.3.1 Perempuan sebagai Aparatur Sipil Negara

Karier adalah sesuatu yang senantiasa diharapkan oleh siapa saja, mereka yang bekerja selalu berharap kariernya selalu mulus, kariernya meningkat, dan seterusnya. Membicarakan tentang karier memang sangat menarik, apalagi yang dibicarakan adalah Pegawai Negeri Sipil. Mereka selalu mengharapkan agar kariernya gemilang. Kenaikan pangkat PNS dapat dibedakan menjadi empat yakni kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat pilihan, kenaikan pangkat anumerta, dan kenaikan pangkat pengabdian. Di kota Payakumbuh persentase aparatur

sipil negara menurut jenis kelamin tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 20
Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Jenis Kelamin
di Kota Payakumbuh Tahun 2021-2025

Tahun	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki + Perempuan	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
2021	933	32,07	1.976	67,93	2.909	100
2022	899	32,44	1.961	70,77	2.860	100
2023	947	30,75	2.133	69,25	3.080	100
2024	899	32,44	1.961	70,77	2.860	100
2025	1.013	31,00	2.255	69,00	3.268	100

Sumber : BKPSDM Kota

Berdasarkan data BKPSDM Kota Payakumbuh Tahun 2021–2025, komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa perempuan memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Kondisi ini mencerminkan tingginya partisipasi perempuan dalam sektor pemerintahan serta menunjukkan semakin terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Pada tahun 2021, jumlah ASN di Kota Payakumbuh tercatat sebanyak 2.909 orang, terdiri atas 933 laki-laki atau 32,07 persen dan 1.976 perempuan atau 67,93 persen. Pada tahun 2022, jumlah ASN mengalami sedikit penurunan menjadi 2.860 orang, dengan komposisi 899 laki-laki (32,44 persen) dan 1.961 perempuan (67,56 persen). Meskipun jumlah total ASN menurun, perempuan tetap mendominasi dengan proporsi lebih dari dua pertiga dari keseluruhan ASN.

Pada tahun 2023, jumlah ASN meningkat menjadi 3.080 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 947 orang atau 30,75 persen merupakan laki-laki, sedangkan 2.133 orang atau 69,25 persen merupakan perempuan. Persentase perempuan yang mendekati 70 persen menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam birokrasi pemerintahan Kota Payakumbuh semakin kuat.

Secara umum, selama periode 2021–2025 proporsi ASN perempuan berada pada kisaran 67–69 persen, sedangkan proporsi ASN laki-laki berkisar 31–32 persen. Dominasi perempuan dalam komposisi ASN ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki akses yang baik terhadap kesempatan kerja di sektor pemerintahan. Kondisi tersebut juga mencerminkan meningkatnya kualitas sumber daya manusia perempuan serta semakin besarnya kontribusi perempuan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari perspektif kepemimpinan perempuan, tingginya jumlah ASN perempuan merupakan modal yang penting dalam mendorong peningkatan keterwakilan perempuan pada jabatan struktural maupun jabatan pengambil keputusan. Keberadaan perempuan dalam birokrasi tidak hanya berkontribusi terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan, tetapi juga dapat memperkuat penerapan kebijakan yang responsif gender. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas, kompetensi, dan kesempatan yang setara bagi ASN perempuan untuk menduduki posisi strategis perlu

terus didorong guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, adil, dan berperspektif gender.

Dengan demikian, tingginya partisipasi perempuan sebagai ASN di Kota Payakumbuh menjadi salah satu indikator positif dalam upaya pemberdayaan perempuan serta menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang semakin signifikan dalam pembangunan daerah dan proses pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh pada Tahun 2025, dapat dilihat pada Tabel. 21

Tabel 21

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2025

Jabatan	2025		Jumlah
	L	P	
Fungsional Tertentu	292	1.213	1.505
Fungsional Umum	236	255	491
PPPK	255	567	822
Eselon II	24	6	30
Eselon III	65	34	99
Eselon IV	141	180	321
Struktural			
Total/Jumlah	1.013	2.255	3.268

Sumber : BKPSDM Kota Payakumbuh

Berdasarkan data BKPSDM Kota Payakumbuh Tahun 2025, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Payakumbuh tercatat sebanyak 3.268 orang, yang terdiri atas 1.013 ASN laki-laki (31,0 persen) dan 2.255 ASN perempuan (69,0 persen). Data ini menunjukkan bahwa perempuan mendominasi komposisi ASN di Kota Payakumbuh.

Dilihat menurut jenis jabatan, sebagian besar ASN berada pada kelompok jabatan fungsional tertentu, yaitu sebanyak 1.505 orang. Pada kelompok jabatan ini, jumlah perempuan mencapai 1.213 orang, jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki yang berjumlah 292 orang. Dominasi perempuan pada jabatan fungsional tertentu menunjukkan besarnya keterlibatan perempuan dalam profesi-profesi yang memerlukan keahlian khusus, seperti guru, tenaga kesehatan, dan jabatan teknis lainnya.

Pada jabatan fungsional umum, terdapat 491 ASN, terdiri dari 236 laki-laki dan 255 perempuan. Komposisi ini relatif seimbang, meskipun perempuan masih sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Sementara itu, jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mencapai 822 orang, dengan rincian 255 laki-laki dan 567 perempuan. Tingginya jumlah perempuan pada kategori PPPK menunjukkan bahwa perempuan memiliki partisipasi yang besar dalam pengisian kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

Ditinjau dari jabatan struktural, terdapat perbedaan komposisi antara laki-laki dan perempuan. Pada jabatan Eselon II, terdapat 30 pejabat, terdiri dari 24 laki-laki dan 6 perempuan, yang menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan pada jabatan pimpinan tinggi masih relatif rendah. Kondisi yang sama

terlihat pada jabatan Eselon III, dimana dari 99 pejabat, sebanyak 65 orang adalah laki-laki dan 34 orang perempuan.

Namun demikian, pada jabatan Eselon IV, jumlah perempuan justru lebih banyak dibandingkan laki-laki, yaitu 180 orang perempuan dan 141 orang laki-laki dari total 321 pejabat. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan telah memiliki kesempatan yang cukup besar untuk menduduki jabatan pengawas, meskipun representasi mereka pada jenjang kepemimpinan yang lebih tinggi masih perlu ditingkatkan.

Secara umum, data tersebut menggambarkan bahwa perempuan memiliki peran yang sangat signifikan dalam birokrasi Pemerintah Kota Payakumbuh. Meskipun jumlah perempuan secara keseluruhan lebih besar dibandingkan laki-laki, keterwakilan perempuan pada jabatan pimpinan tingkat tinggi masih belum seimbang. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk terus mendorong pengarusutamaan gender dan peningkatan kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki dalam pengembangan karier serta pengisian jabatan strategis di lingkungan pemerintahan, sehingga terwujud birokrasi yang lebih inklusif dan responsif gender.

Tabel 22
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Tingkat Pendidikan
dan Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2025

Pendidikan	2024		Jumlah
	L	P	
SD / Sederajat	7	1	8
SMP / Sederajat	6	0	6
SMA / Sederajat	211	101	312
Diploma I,II/ Akta I,II	4	8	12
Diploma III	137	460	597
Diploma IV	36	74	110
Sarjana, Magister, Doktor	612	1.611	2.223
Total/Jumlah	1.013	2.255	3.268

Sumber : BKPSDM Kota Payakumbuh

Berdasarkan data BKPSDM Kota Payakumbuh Tahun 2025, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Payakumbuh mencapai 3.268 orang, yang terdiri dari 1.013 laki-laki dan 2.255 perempuan. Ditinjau dari tingkat pendidikan, sebagian besar ASN telah memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, yang menunjukkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang semakin baik dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Kelompok pendidikan yang paling banyak ditempati ASN adalah Sarjana, Magister, dan Doktor, dengan jumlah 2.223 orang atau sekitar 68,0 persen dari total ASN. Pada jenjang pendidikan ini, jumlah ASN perempuan mencapai 1.611 orang, jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki yang berjumlah 612 orang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi dan berkontribusi besar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Payakumbuh.

ASN dengan tingkat pendidikan Diploma III berjumlah 597 orang, terdiri dari 137 laki-laki dan 460 perempuan. Dominasi perempuan pada jenjang ini menunjukkan tingginya partisipasi perempuan pada profesi-profesi yang memerlukan pendidikan vokasi, seperti tenaga kesehatan dan bidang teknis lainnya. Sementara itu, ASN yang berpendidikan Diploma IV tercatat sebanyak 110 orang, terdiri dari 36 laki-laki dan 74 perempuan, sedangkan yang berpendidikan Diploma I, II atau Akta I, II sebanyak 12 orang, dengan jumlah perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Pada tingkat pendidikan SMA/ sederajat, terdapat 312 ASN, yang terdiri dari 211 laki-laki dan 101 perempuan. Jumlah ASN dengan pendidikan SMP/ sederajat dan SD/ sederajat relatif sedikit, masing-masing sebanyak 6 orang dan 8 orang, yang menunjukkan bahwa sebagian besar ASN di Kota Payakumbuh telah memenuhi tuntutan kompetensi aparatur melalui pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Secara keseluruhan, struktur pendidikan ASN di Kota Payakumbuh memperlihatkan bahwa mayoritas aparatur memiliki kualifikasi pendidikan tinggi, dengan dominasi jumlah perempuan pada hampir seluruh jenjang pendidikan tinggi. Kondisi ini mencerminkan semakin meningkatnya akses dan kesempatan perempuan dalam memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia serta mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional dan responsif gender.

Dari perspektif gender, tingginya proporsi ASN perempuan yang berpendidikan sarjana dan pascasarjana menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai bidang pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan kompetensi dan pemberian kesempatan yang setara dalam pengembangan karier perlu terus didorong agar potensi perempuan dan laki-laki dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, inklusif, dan berkeadilan gender.

Tabel 23
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Kepangkat dan Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2025

Kepangkatan	2024		Jumlah
	L	P	
Golongan I	5	0	5
Golongan II	114	67	181
Golongan III	472	1.249	1.721
Golongan IV	167	372	539
Golongan V	74	39	113
Total/Jumlah	832	1.727	2.559

Sumber : BKPSDM Kota Payakumbuh

Berdasarkan data BKPSDM Kota Payakumbuh Tahun 2025, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kepangkatan tercatat sebanyak 2.559 orang, yang terdiri atas 832 ASN laki-laki dan 1.727 ASN perempuan. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan mendominasi jumlah ASN pada hampir seluruh golongan kepangkatan.

Dilihat dari distribusi kepangkatan, sebagian besar ASN berada pada Golongan III, yaitu sebanyak 1.721 orang atau

sekitar 67,3 persen dari total ASN. Pada golongan ini terdapat 1.249 perempuan dan 472 laki-laki. Dominasi perempuan pada Golongan III menunjukkan bahwa sebagian besar ASN perempuan berada pada jenjang karier menengah yang umumnya ditempati oleh pegawai dengan kualifikasi pendidikan tinggi dan jabatan fungsional tertentu.

Selanjutnya, ASN yang berada pada Golongan IV berjumlah 539 orang, terdiri dari 167 laki-laki dan 372 perempuan. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki representasi yang cukup besar pada golongan yang lebih tinggi, yang mencerminkan adanya peluang pengembangan karier yang semakin terbuka bagi perempuan di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

Pada Golongan II, jumlah ASN tercatat sebanyak 181 orang, dengan rincian 114 laki-laki dan 67 perempuan. Sementara itu, ASN yang berada pada Golongan I hanya berjumlah 5 orang dan seluruhnya merupakan laki-laki. Rendahnya jumlah ASN pada Golongan I menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur telah memiliki kualifikasi pendidikan dan kepangkatan yang lebih tinggi.

Adapun pada Golongan V, jumlah ASN tercatat sebanyak 113 orang, yang terdiri atas 74 laki-laki dan 39 perempuan. Keberadaan ASN pada golongan ini menggambarkan adanya aparatur dengan jenjang kepangkatan yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku.

Secara umum, struktur kepangkatan ASN di Kota Payakumbuh menunjukkan bahwa mayoritas pegawai berada pada Golongan III dan IV, yang mengindikasikan bahwa kualitas dan jenjang karier ASN telah berkembang dengan baik. Dominasi perempuan pada kedua golongan tersebut juga mencerminkan semakin besarnya peran perempuan dalam birokrasi pemerintahan serta meningkatnya kesempatan perempuan untuk mengembangkan karier dan menduduki posisi yang lebih tinggi.

Dari perspektif gender, distribusi kepangkatan ASN di Kota Payakumbuh memperlihatkan bahwa perempuan tidak hanya mendominasi jumlah ASN secara keseluruhan, tetapi juga memiliki proporsi yang besar pada golongan menengah dan tinggi. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam kesetaraan akses terhadap pengembangan karier bagi perempuan. Oleh karena itu, upaya pengarusutamaan gender serta pemberian kesempatan yang setara dalam peningkatan kompetensi dan promosi jabatan perlu terus diperkuat guna mewujudkan birokrasi yang profesional, inklusif, dan berkeadilan gender.

Tabel 24
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Masa Kerja dan Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2025

Masa Kerja	2025		Jumlah
	L	P	
00-04	252	591	843
05-09	33	82	115
10-14	34	76	110
15-19	183	469	652
20-24	320	668	988
25-29	100	150	250
30-34	51	104	155
35 +	40	115	155
Total/ Jumlah	1.013	2.255	3.268

Sumber : BKPSDM Kota Payakumbuh

Berdasarkan data BKPSDM Kota Payakumbuh Tahun 2025, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) tercatat sebanyak 3.268 orang, yang terdiri dari 1.013 laki-laki dan 2.255 perempuan. Dilihat dari masa kerja, komposisi ASN menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada kelompok masa kerja menengah, yang menggambarkan tersedianya sumber daya aparatur yang cukup berpengalaman dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kelompok masa kerja yang paling banyak adalah 20–24 tahun, yaitu sebanyak 988 orang atau sekitar 30,2 persen dari total ASN. Pada kelompok ini terdapat 320 laki-laki dan 668 perempuan, yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Tingginya jumlah ASN pada kelompok masa kerja ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pegawai berada pada fase kematangan karier dan telah memiliki pengalaman kerja yang cukup panjang.

Kelompok masa kerja terbesar berikutnya adalah 0–4 tahun, dengan jumlah 843 orang, terdiri dari 252 laki-laki dan 591 perempuan. Besarnya jumlah ASN pada kelompok masa kerja awal ini menunjukkan adanya regenerasi aparatur yang cukup baik melalui penerimaan pegawai baru, sekaligus menggambarkan dominasi perempuan pada kelompok ASN yang relatif muda.

Pada kelompok masa kerja 15–19 tahun, jumlah ASN tercatat sebanyak 652 orang, dengan rincian 183 laki-laki dan 469 perempuan. Sementara itu, kelompok masa kerja 25–29 tahun berjumlah 250 orang, terdiri dari 100 laki-laki dan 150 perempuan. ASN dengan masa kerja 30–34 tahun dan 35 tahun ke atas masing-masing berjumlah 155 orang, dengan jumlah perempuan yang lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Kelompok masa kerja yang paling sedikit terdapat pada rentang 10–14 tahun, yaitu sebanyak 110 orang, terdiri dari 34 laki-laki dan 76 perempuan, sedangkan kelompok masa kerja 5–9 tahun berjumlah 115 orang, yang terdiri dari 33 laki-laki dan 82 perempuan.

Secara umum, distribusi masa kerja ASN di Kota Payakumbuh menunjukkan adanya kombinasi antara pegawai yang telah berpengalaman dengan pegawai yang relatif baru, sehingga menciptakan keseimbangan antara pengalaman kerja dan regenerasi sumber daya manusia. Pada seluruh kelompok masa kerja, jumlah ASN perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki, yang menunjukkan tingginya partisipasi perempuan dalam birokrasi pemerintahan daerah.

Dari perspektif gender, dominasi perempuan pada hampir seluruh kelompok masa kerja mencerminkan bahwa perempuan tidak hanya memiliki akses yang luas untuk menjadi bagian dari aparatur pemerintah, tetapi juga mampu mempertahankan keberlanjutan karier dalam jangka panjang. Kondisi ini

merupakan indikator positif bagi terwujudnya kesetaraan gender dalam dunia kerja pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas, pengembangan karier, serta penciptaan lingkungan kerja yang responsif gender perlu terus dilakukan agar perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Payakumbuh.

1. Perempuan dalam Politik

Partisipasi perempuan dalam bidang politik merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan kesetaraan gender dan penguatan demokrasi. Keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun berbagai organisasi kemasyarakatan dan politik, memberikan kontribusi yang besar dalam memastikan bahwa kepentingan, kebutuhan, dan aspirasi perempuan dapat terakomodasi dalam kebijakan pembangunan.

Peningkatan partisipasi politik perempuan merupakan bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Kehadiran perempuan dalam ruang politik tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan keterwakilan secara kuantitatif, tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat, termasuk perempuan, anak, kelompok rentan, dan penyandang disabilitas. Dengan demikian, perspektif

gender dapat lebih terintegrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Di Indonesia, berbagai regulasi telah memberikan peluang yang lebih besar bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, antara lain melalui kebijakan afirmasi yang mendorong keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik dan pencalonan anggota legislatif. Kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen negara dalam meningkatkan akses dan kesempatan yang setara bagi perempuan untuk berperan dalam proses politik dan pengambilan keputusan.

Meskipun demikian, partisipasi perempuan dalam politik masih menghadapi berbagai tantangan, seperti budaya patriarki, stereotip gender, keterbatasan akses terhadap sumber daya politik, serta masih rendahnya keterwakilan perempuan pada posisi-posisi strategis. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak melalui peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan, pendidikan politik, penguatan organisasi perempuan, serta penciptaan lingkungan sosial yang mendukung partisipasi perempuan secara aktif dalam kehidupan politik.

Dalam konteks penyusunan Profil Perempuan, aspek perempuan dan politik menjadi penting untuk dikaji karena dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di daerah. Semakin besar partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga

politik dan pemerintahan, maka semakin besar pula peluang terwujudnya kebijakan yang berkeadilan gender dan berpihak pada kepentingan masyarakat secara luas. Dengan demikian, peningkatan representasi dan partisipasi perempuan dalam politik merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan yang demokratis, inklusif, dan berkelanjutan.

Tabel 25
Persentase Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin
di Kota Payakumbuh Tahun 2025

No	Partai	Anggota DPRD		
		L	P	Jumlah
1	PKS	3		3
2	Gerinda	1		1
3	Demokrat	3		3
4	PPP	3		3
5	Nasdem	3	1	4
6	PKB	2	1	3
7	PAN	2	1	3
8	Golkar	4		4
9	PDI			
10	PBB	1		1
	Total/Jumlah			25

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh

Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan kesetaraan gender dan peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Kehadiran perempuan di lembaga perwakilan diharapkan dapat memperkuat perspektif gender dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah.

Berdasarkan data Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2025, jumlah anggota DPRD Kota Payakumbuh sebanyak 25 orang, yang terdiri dari 21 anggota laki-laki (84 persen) dan 4 anggota perempuan (16 persen). Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kota Payakumbuh masih berada di bawah target keterwakilan perempuan sebesar 30 persen sebagaimana diamanatkan dalam berbagai kebijakan mengenai pengarusutamaan gender dan partisipasi politik perempuan.

Dilihat menurut partai politik, anggota DPRD perempuan berasal dari tiga partai, yaitu Partai NasDem sebanyak 1 orang, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 1 orang, dan Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 1 orang. Sementara itu, sebagian besar partai politik lainnya hanya diwakili oleh anggota laki-laki. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golkar, dan Partai Bulan Bintang (PBB) seluruh kursinya ditempati oleh laki-laki, sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI) tidak memperoleh kursi di DPRD Kota Payakumbuh.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif di Kota Payakumbuh masih perlu terus ditingkatkan. Upaya peningkatan kapasitas, penguatan kaderisasi perempuan di partai politik, serta pemberian kesempatan yang lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam proses politik menjadi faktor penting dalam mendorong terwujudnya representasi perempuan yang lebih

proporsional dan berkeadilan di lembaga pengambilan keputusan. Kepengurusan Partai Politik di Kota Payakumbuh dapat di lihat pada Tabel 26.

Tabel 26
Persentase Pengurus Partai Politik Menurut Jenis Kelamin
di Kota Payakumbuh Tahun 2025

No	Partai	DPC		
		L	P	Jumlah
1	PKB	17	5	22
2	Gerindra	19	13	32
3	PDIP	15	3	18
4	Golkar	42	23	65
5	Nasdem	25	9	34
6	Partai Buruh	3	2	5
7	Gelora	4	1	5
8	PKS	17	4	21
9	Kebangkitan Nusantara	2	1	3
10	Hanura	21	3	24
11	Garuda	1	2	3
12	PAN	49	23	72
13	PBB	6	4	10
14	Demokrat	17	7	24
15	PSI	3	2	5
16	Perindo	11	4	15
17	PPP	31	14	45
18	Ummat	3	2	5
Total/Jumlah		286	128	408
Persentase		69	31	

Sumber : Kantor Kesbangpol Kota Payakumbuh

Berdasarkan data dari Kantor Kesbangpol Kota Payakumbuh Tahun 2025, jumlah pengurus partai politik tingkat DPC di Kota Payakumbuh mencapai 408 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 286 orang atau 69 persen merupakan laki-laki, sedangkan 128 orang atau 31 persen merupakan perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan partai politik masih

lebih rendah dibandingkan laki-laki, meskipun perempuan telah berpartisipasi dalam kepengurusan seluruh partai politik yang ada di Kota Payakumbuh.

Partai dengan jumlah pengurus perempuan terbanyak adalah Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN), masing-masing sebanyak 23 orang. Selanjutnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki 14 orang pengurus perempuan, diikuti Partai Gerindra sebanyak 13 orang dan Partai Nasdem sebanyak 9 orang. Sementara itu, beberapa partai seperti Partai Gelora dan Partai Kebangkitan Nusantara hanya memiliki satu orang perempuan dalam struktur kepengurusannya.

Persentase perempuan sebesar 31 persen menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik di Kota Payakumbuh telah melampaui target afirmasi keterwakilan perempuan sebesar 30 persen yang diamanatkan dalam berbagai regulasi dan kebijakan nasional. Hal ini mencerminkan adanya kemajuan dalam upaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik dan pengambilan keputusan. Namun demikian, dominasi laki-laki yang masih mencapai 69 persen menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam struktur organisasi politik belum sepenuhnya terwujud.

Keberadaan perempuan dalam kepengurusan partai politik memiliki peran penting dalam memperkuat perspektif gender dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan

politik. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas, kesempatan, serta dukungan terhadap perempuan untuk menduduki posisi strategis di dalam partai politik perlu terus didorong agar partisipasi politik perempuan tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pembangunan yang responsif gender di Kota Payakumbuh.

7.1 Latar Belakang

Perempuan kepala rumah tangga merupakan salah satu kelompok yang memiliki peran strategis dalam kehidupan keluarga dan pembangunan masyarakat. Selain menjalankan fungsi domestik, perempuan kepala rumah tangga juga memikul tanggung jawab sebagai pencari nafkah utama, pengelola ekonomi keluarga, serta pengasuh dan pendidik bagi anggota keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki kontribusi yang besar dalam menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan rumah tangga.

Meningkatnya jumlah perempuan yang menjadi kepala rumah tangga dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain status janda karena perceraian atau kematian pasangan, belum menikah tetapi memiliki tanggungan keluarga, migrasi pasangan, maupun kondisi sosial ekonomi lainnya yang mengharuskan perempuan menjadi penanggung jawab utama keluarga. Perubahan struktur keluarga tersebut menuntut perempuan untuk menjalankan peran ganda, yaitu sebagai pengelola rumah tangga sekaligus sebagai pencari nafkah.

Dalam perspektif gender, perempuan kepala rumah tangga merupakan kelompok yang rentan menghadapi berbagai

tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak, rendahnya pendapatan, terbatasnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan, serta beban kerja yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Kondisi ini berpotensi memengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga dan kualitas hidup anggota rumah tangga yang menjadi tanggungannya.

Oleh karena itu, informasi mengenai perempuan kepala rumah tangga menjadi penting dalam penyusunan Profil Perempuan. Data tersebut dapat memberikan gambaran mengenai karakteristik dan kondisi sosial ekonomi perempuan kepala rumah tangga, sehingga dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender. Dengan demikian, upaya pemberdayaan perempuan kepala rumah tangga dapat dilakukan secara lebih terarah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, mengurangi kerentanan ekonomi, serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di Kota Payakumbuh.

Wujud nyata perhatian negara terhadap perempuan kepala rumah tangga, selain melalui Badan Pusat Statistik dan Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok perempuan kepala rumah tangga. Terdapat sejumlah program yang dilakukan untuk menguatkan perempuan kepala rumah tangga secara khusus. Di antaranya program Kemen PPPA yang menyentuh langsung perempuan kepala rumah tangga ini adalah sekolah perempuan yang

dimaksudkan membuka akses informasi dan pendidikan bagi perempuan, termasuk kepala rumah tangga perempuan. Selain itu, Kemen PPPA juga memberikan komitmen anggarannya melalui bantuan dana usaha untuk penguatan ekonomi, mengadakan sejumlah kegiatan untuk menguatkan kemampuan dan keterampilan perempuan kepala rumah tangga sehingga mereka mampu mengembangkan ekonomi kreatif dan inovatif. Pemerintah juga telah berupaya membuka akses perempuan kepala rumah tangga dalam mengembangkan polapola kerjasama dengan dunia usaha melalui program-program yang memiliki keberpihakan kepada perempuan kepala rumah tangga.

7.2 Definisi Konseptual

Semua definisi konseptual yang digunakan dalam menjelaskan perempuan kepala rumah tangga merujuk pada definisi yang telah dibangun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang diakses melalui laman sirusa.bps.go.id

7.2.1 Rumah Tangga

Badan Pusat Statistik membagi kategori rumah tangga dalam dua bentuk, yaitu rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus:

- a. Rumah tangga biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Rumah tangga biasanya terdiri dari ibu, bapak dan

anak, selain itu yang termasuk/dianggap sebagai rumah tangga biasa antara lain:

- 1) Seseorang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi makannya diurus sendiri.
 - 2) Keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut dalam blok sensus yang sama.
 - 3) Pondokan dengan makan (indekost) yang pemondoknya kurang dari 10 orang. Pemondok dianggap sebagai anggota rumah tangga induk semangnya.
 - 4) Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.
 - 5) Anggota TNI yang tinggal di asrama bersama keluarganya dan mengurus sendiri kebutuhan sehari-harinya.
- b. Rumah Tangga Khusus, yang termasuk/dianggap sebagai rumah tangga khusus antara lain orang-orang yang tinggal di asrama, yaitu tempat tinggal yang pengurusan kebutuhan sehari-harinya diatur oleh suatu yayasan atau badan, misalnya, asrama perawat, asrama TNI dan POLRI (tangsi). Di antara contoh rumah tangga khusus adalah orang-orang yang tinggal di lembaga permasyarakatan, panti asuhan, rumah tahanan; sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekost) yang berjumlah lebih besar atau sama dengan 10 orang. Kategori Rumah tangga khusus ini tidak dicakup dalam kegiatan Susenas.

7.2.2 Kepala Rumah Tangga (KRT)

BPS mendefinisikan kepala rumah tangga adalah seorang dari sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari, atau yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala rumah tangga. Dengan definisi ini, kepala rumah tangga tidak harus berjenis kelamin laki-laki. Kepala rumah tangga juga memungkinkan diperankan perempuan ketika situasi sebagaimana definisi tersebut terjadi dalam sebuah keluarga. Definisi ini menunjukkan kesetaraan dalam memosisikan suami dan istri, sama-sama berpeluang menjadi kepala keluarga dan mendapatkan hak-hak yang sama sebagai kepala rumah tangga.

7.2.3 Anggota Rumah Tangga (ART)

Anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal, di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah tangga pada waktu pencacahan maupun sementara tidak ada. Anggota rumah tangga bisa terdiri dari suami/istri, anak, menantu, cucu, orang tua, mertua, kerabat keluarga lain, pekerja rumah tangga, sopir, dan tukang kebun. Dengan demikian, anggota rumah tangga bisa diperinci sebagaimana berikut:

- a. Bayi yang baru lahir;
- b. Tamu yang sudah tinggal 6 bulan atau lebih, meskipun belum berniat untuk menetap (pindah datang). Termasuk tamu menginap yang belum tinggal 6 bulan, tetapi sudah meninggalkan rumahnya 6 bulan atau lebih;

- c. Orang yang tinggal kurang dari 6 bulan, tetapi berniat untuk menetap (pindah datang);
- d. Pekerja rumah tangga, tukang kebun, atau sopir yang tinggal dan makannya bergabung dengan rumah tangga majikan; Pembantu rumah tangga atau sopir yang hanya makan atau tinggal saja di rumah majikannya dianggap bukan majikannya.
- e. Orang yang mondok dengan makan (indekos) jumlahnya kurang dari 10 orang;

Merujuk pada definisi di atas, maka beberapa kategori berikut ini tidak dikategorikan sebagai anggota rumah tangga, yaitu:

- a. ART yang tinggal di tempat lain (luar rumah tangga/BS), misalnya untuk sekolah atau bekerja, meskipun kembali ke orang tuanya seminggu sekali atau ketika libur, dianggap telah membentuk rumah tangga sendiri atau bergabung dengan rumah tangga lain di tempat tinggalnya sehari-hari;
- b. Seseorang yang sudah bepergian 6 bulan atau lebih, meskipun belum jelas akan pindah;
- c. Orang yang sudah pergi kurang dari 6 bulan, tetapi berniat untuk pindah;
- d. Pekerja rumah tangga, sopir, tukang kebun yang tidak tinggal di rumah tangga majikan;
- e. Orang yang mondok tidak dengan makan;
- f. Orang yang mondok dengan makan (indekos) lebih dari 10 orang.

7.3 Pembahasan

7.3.1 Kepala Rumah Tangga

Pada umumnya, perempuan menjadi kepala rumah tangga karena adanya kejadian dalam rumah tangganya yang mengakibatkan tidak berjalannya peran laki-laki menjadi kepala rumah tangga karena berbagai alasan. Perempuan mengambil peran sebagai kepala rumah tangga untuk memastikan rumah tangga tetap berjalan dengan baik, terutama dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Di Kota Payakumbuh Jumlah kepala keluarga menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 27
Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
di Kota Payakumbuh Tahun 2025

No	Kecamatan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	Payakumbuh Barat	13.922	37,50	3.898	40,61	17.820	38,14
2	Payakumbuh Utara	8.536	22,99	2.080	21,67	10.616	22,72
3	Payakumbuh Timur	8.247	22,21	2.182	22,73	10.429	22,32
4	Lamposi Tigo Nagori	3.107	8,37	722	7,52	3.829	8,19
5	Payakumbuh Selatan	3.315	8,93	717	7,47	4.032	8,63
Jumlah		37.127	79,46	9.599	20,54	46.726	100

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Payakumbuh

Dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Tahun 2025, jumlah kepala keluarga (KK) di Kota Payakumbuh tercatat sebanyak 46.726 KK. Dari jumlah tersebut, 37.127 KK (79,46 persen) dikepalai oleh laki-laki, sedangkan 9.599 KK (20,54 persen) dikepalai oleh perempuan. Data ini menunjukkan bahwa sekitar satu dari lima kepala keluarga di Kota Payakumbuh merupakan perempuan.

Keberadaan kepala keluarga perempuan menjadi salah satu indikator penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang responsif gender. Kepala keluarga perempuan umumnya berasal dari berbagai kondisi, seperti perempuan yang berstatus janda karena perceraian atau ditinggal meninggal dunia, belum menikah tetapi menjadi penanggung jawab keluarga, maupun perempuan yang menjadi pencari nafkah utama dalam rumah tangga. Oleh karena itu, kelompok ini memiliki karakteristik dan kebutuhan yang memerlukan perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah.

Ditinjau menurut kecamatan, jumlah kepala keluarga perempuan terbanyak berada di Kecamatan Payakumbuh Barat, yaitu 3.898 KK atau 40,61 persen dari seluruh kepala keluarga perempuan di Kota Payakumbuh. Tingginya jumlah tersebut sejalan dengan kondisi bahwa Kecamatan Payakumbuh Barat juga memiliki jumlah kepala keluarga terbanyak secara keseluruhan, yakni 17.820 KK (38,14 persen) dari total kepala keluarga di Kota Payakumbuh.

Kecamatan Payakumbuh Timur memiliki 2.182 kepala keluarga perempuan (22,73 persen), diikuti Kecamatan Payakumbuh Utara sebanyak 2.080 kepala keluarga perempuan (21,67 persen). Sementara itu, jumlah kepala keluarga perempuan di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori sebanyak 722 KK (7,52 persen) dan di Kecamatan Payakumbuh Selatan sebanyak 717 KK (7,47 persen). Kedua kecamatan tersebut memiliki

proporsi kepala keluarga perempuan yang relatif lebih kecil dibandingkan kecamatan lainnya.

Distribusi kepala keluarga perempuan tersebut pada umumnya mengikuti persebaran jumlah penduduk dan rumah tangga di masing-masing kecamatan. Namun demikian, keberadaan hampir sepuluh ribu kepala keluarga perempuan di Kota Payakumbuh menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang cukup besar sebagai pengelola sekaligus penanggung jawab rumah tangga. Kondisi ini menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat program pemberdayaan perempuan, peningkatan akses terhadap kesempatan kerja, perlindungan sosial, peningkatan keterampilan ekonomi, serta perluasan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum.

Tabel 28
Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan di Kota Payakumbuh Tahun 2025

No	Status Perkawinan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	Belum Kawin	1.529	4,12	736	7,67	2.265	4,85
2	Kawin	32.636	87,90	1.381	14,39	34.017	72,80
3	Cerai Hidup	1.567	4,22	2.339	24,37	3.906	8,36
4	Cerai Mati	1.395	3,76	5.143	53,58	6.538	13,99
Jumlah		37.127	100	9.599	100	46.726	100

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Payakumbuh

Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terdapat 46.726 kepala keluarga, yang terdiri atas 37.127 kepala keluarga laki-laki (79,46 persen) dan 9.599 kepala keluarga perempuan

(20,54 persen). Komposisi tersebut menunjukkan bahwa laki-laki masih mendominasi status sebagai kepala keluarga di Kota Payakumbuh. Namun demikian, proporsi kepala keluarga perempuan yang mencapai lebih dari seperlima dari total kepala keluarga menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang perlu memperoleh perhatian dalam perspektif pembangunan yang responsif gender.

Berdasarkan status perkawinan, sebagian besar kepala keluarga berstatus kawin, yaitu sebanyak 34.017 kepala keluarga (72,80 persen). Dari jumlah tersebut, 32.636 kepala keluarga merupakan laki-laki dan 1.381 kepala keluarga merupakan perempuan. Tingginya proporsi kepala keluarga laki-laki yang berstatus kawin (87,90 persen) menunjukkan bahwa dalam rumah tangga dengan pasangan yang masih lengkap, peran kepala keluarga masih didominasi oleh laki-laki.

Sebaliknya, karakteristik kepala keluarga perempuan menunjukkan pola yang berbeda. Dari seluruh kepala keluarga perempuan, 53,58 persen berstatus cerai mati dan 24,37 persen berstatus cerai hidup. Dengan demikian, sekitar 77,95 persen kepala keluarga perempuan merupakan perempuan yang tidak lagi memiliki pasangan akibat perceraian maupun kematian pasangan. Sementara itu, kepala keluarga laki-laki yang berstatus cerai hidup dan cerai mati masing-masing hanya sebesar 4,22 persen dan 3,76 persen. Perbedaan ini menggambarkan bahwa perempuan lebih banyak mengambil

peran sebagai kepala keluarga setelah terjadi perubahan status perkawinan.

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga yang dikepalai perempuan di Kota Payakumbuh sebagian besar merupakan rumah tangga dengan tingkat kerentanan yang relatif lebih tinggi. Perempuan kepala keluarga umumnya menghadapi tanggung jawab ganda, yaitu sebagai pencari nafkah sekaligus pengelola rumah tangga dan pengasuh anggota keluarga. Kondisi ini dapat memengaruhi kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan anggota keluarga apabila tidak didukung oleh akses yang memadai terhadap sumber daya dan perlindungan sosial.

Dari perspektif kesetaraan gender, data ini menunjukkan bahwa status kepala keluarga perempuan tidak semata-mata mencerminkan perubahan struktur rumah tangga, tetapi juga menjadi indikator penting dalam mengidentifikasi kelompok perempuan yang memerlukan dukungan kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus memperkuat program pemberdayaan ekonomi perempuan, meningkatkan akses terhadap pelatihan keterampilan, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, serta memastikan rumah tangga yang dikepalai perempuan memperoleh akses terhadap program perlindungan sosial dan layanan publik yang inklusif.

Informasi mengenai kepala keluarga menurut jenis kelamin dan status perkawinan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang responsif gender. Analisis ini diharapkan dapat mendukung perencanaan program yang lebih tepat sasaran dalam rangka meningkatkan kualitas hidup keluarga, memperkuat ketahanan keluarga, serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Kota Payakumbuh.

7.3.2 Pendidikan Kepala Rumah Tangga Perempuan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kapasitas kepala rumah tangga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pendidikan yang lebih tinggi umumnya berkaitan dengan meningkatnya akses terhadap kesempatan kerja, pendapatan, kemampuan pengambilan keputusan, serta pemanfaatan berbagai layanan publik. Dalam perspektif gender, tingkat pendidikan kepala rumah tangga perempuan menjadi indikator penting untuk menggambarkan kualitas sumber daya manusia perempuan sekaligus tingkat kerentanan rumah tangga yang dipimpinnya.

Rumah tangga yang dikepalai perempuan umumnya terbentuk sebagai akibat perubahan status perkawinan, seperti perceraian atau meninggalnya pasangan. Kondisi tersebut menyebabkan perempuan tidak hanya menjalankan peran domestik, tetapi juga bertanggung jawab sebagai pencari nafkah utama. Oleh karena itu, tingkat pendidikan yang dimiliki menjadi

salah satu modal penting dalam menentukan kemampuan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Data mengenai pendidikan kepala rumah tangga perempuan memberikan gambaran mengenai distribusi jenjang pendidikan yang telah ditempuh, mulai dari tidak/belum sekolah hingga pendidikan tinggi. Apabila sebagian besar kepala rumah tangga perempuan masih memiliki tingkat pendidikan dasar atau menengah pertama, kondisi tersebut dapat menjadi tantangan dalam memperoleh pekerjaan formal dengan penghasilan yang memadai. Sebaliknya, meningkatnya proporsi kepala rumah tangga perempuan yang berpendidikan menengah atas dan perguruan tinggi menunjukkan semakin baiknya kualitas sumber daya manusia perempuan serta terbukanya peluang yang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidup keluarga.

Peningkatan tingkat pendidikan perempuan juga berkontribusi terhadap penguatan kapasitas dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga, pengambilan keputusan, pengasuhan anak, serta pemanfaatan layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya memberikan manfaat bagi perempuan sebagai individu, tetapi juga berdampak pada peningkatan kualitas hidup seluruh anggota keluarga.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus mendorong peningkatan akses pendidikan bagi perempuan melalui berbagai

program, baik pendidikan formal maupun nonformal, termasuk pelatihan keterampilan, pendidikan kesetaraan, dan peningkatan kapasitas kewirausahaan. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kemandirian ekonomi perempuan kepala rumah tangga, mengurangi kerentanan sosial ekonomi, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender di Kota Payakumbuh.

Tabel 29
Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi di Kota Payakumbuh Tahun 2025

No	Pendidikan	laki-laki		Perempuan		L + P	
		n	%	n	%	n	%
1	Tidak/Blm Sekolah	544	1,47	215	2,24	759	1,62
2	Belum Tamat SD/ sederajat	250	0,67	107	1,11	357	0,76
3	Tamat SD/ sederajat	7.398	19,93	3.052	31,79	10.450	22,36
4	SLTP/ sederajat	5.666	15,26	1.664	17,34	7.330	15,69
5	SLTA/ sederajat	16.307	43,92	3.229	33,64	19.536	41,81
6	Diploma I dan II	144	0,39	126	1,31	270	0,58
7	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda	1.361	3,67	316	3,29	1.677	3,59
8	Diploma IV/ Strata I	4.988	13,43	835	8,70	5.823	12,46
9	Strata II	457	1,23	51	0,53	508	1,09
10	Strata III	12	0,03	4	0,04	16	0,03
Jumlah		37.127	100	9.599	100	46.726	100

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Payakumbuh di olah

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Tahun 2025, sebagian besar kepala keluarga memiliki pendidikan SLTA/ sederajat, yaitu sebanyak 19.536 orang atau 41,81 persen dari total kepala keluarga. Kelompok ini terdiri atas 16.307 kepala keluarga laki-laki (43,92 persen) dan 3.229 kepala keluarga perempuan (33,64 persen). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan menengah atas

merupakan jenjang pendidikan yang paling banyak dimiliki oleh kepala keluarga di Kota Payakumbuh.

Jenjang pendidikan terbanyak berikutnya adalah tamat SD/ sederajat, yaitu sebanyak 10.450 kepala keluarga (22,36 persen), kemudian SLTP/ sederajat sebanyak 7.330 kepala keluarga (15,69 persen). Sementara itu, kepala keluarga yang telah menyelesaikan pendidikan Diploma IV/ Strata I mencapai 5.823 orang (12,46 persen). Adapun kepala keluarga yang menempuh pendidikan pascasarjana masih relatif sedikit, yaitu 508 orang (1,09 persen) pada jenjang Strata II dan hanya 16 orang (0,03 persen) pada jenjang Strata III.

Apabila ditinjau menurut jenis kelamin, terlihat adanya perbedaan karakteristik tingkat pendidikan antara kepala keluarga laki-laki dan perempuan. Kepala keluarga laki-laki lebih banyak memiliki pendidikan SLTA/ sederajat (43,92 persen) dan Diploma IV/ Strata I (13,43 persen) dibandingkan kepala keluarga perempuan yang masing-masing sebesar 33,64 persen dan 8,70 persen. Sebaliknya, kepala keluarga perempuan lebih banyak berada pada jenjang pendidikan dasar. Sebanyak 31,79 persen kepala keluarga perempuan berpendidikan tamat SD/ sederajat, lebih tinggi dibandingkan kepala keluarga laki-laki yang sebesar 19,93 persen. Demikian pula pada kelompok tidak/ belum sekolah dan belum tamat SD, proporsi kepala keluarga perempuan masing-masing sebesar 2,24 persen dan 1,11 persen, lebih tinggi dibandingkan kepala keluarga laki-laki yang masing-masing sebesar 1,47 persen dan 0,67 persen.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kepala keluarga perempuan di Kota Payakumbuh secara umum memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dibandingkan kepala keluarga laki-laki. Kondisi ini berkaitan dengan karakteristik kepala keluarga perempuan yang sebagian besar merupakan perempuan yang menjadi kepala keluarga akibat perceraian atau meninggalnya pasangan. Selain dipengaruhi oleh faktor usia, kondisi tersebut juga mencerminkan adanya perempuan dari kelompok usia yang lebih tua yang pada masa lalu memiliki kesempatan mengenyam pendidikan formal yang lebih terbatas dibandingkan laki-laki.

Tingkat pendidikan yang relatif lebih rendah berpotensi memengaruhi kemampuan kepala keluarga perempuan dalam memperoleh pekerjaan formal dengan pendapatan yang memadai. Akibatnya, rumah tangga yang dikepalai perempuan memiliki risiko yang lebih besar menghadapi kerentanan ekonomi apabila tidak didukung oleh akses terhadap pelatihan keterampilan, kesempatan berusaha, maupun program perlindungan sosial. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki perempuan akan semakin besar peluang untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik, meningkatkan pendapatan rumah tangga, serta memperkuat kapasitas dalam pengambilan keputusan dan pengasuhan keluarga.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia perempuan perlu terus menjadi perhatian dalam pembangunan

daerah. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui perluasan akses pendidikan sepanjang hayat, pendidikan kesetaraan, pelatihan vokasi, peningkatan kompetensi kerja, serta pengembangan kewirausahaan bagi perempuan, khususnya perempuan kepala keluarga. Program-program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan, mengurangi kesenjangan gender di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender di Kota Payakumbuh.

Secara keseluruhan, data tingkat pendidikan kepala keluarga menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa meskipun mayoritas kepala keluarga di Kota Payakumbuh telah menamatkan pendidikan menengah, masih terdapat kesenjangan tingkat pendidikan antara kepala keluarga laki-laki dan perempuan. Informasi ini menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang responsif gender, terutama dalam meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan, pelatihan, dan kesempatan ekonomi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

7.3.3 Pekerjaan Kepala Rumah Tangga Perempuan

Adapun faktor penyebab perempuan menjadi kepala rumah tangga, salah satunya karena bercerai dengan suaminya. Kemudian suami tidak jadi pencari nafkah utama karena difabel

atau kehilangan pekerjaan, suami pergi dalam waktu lama tanpa memberi nafkah serta karena belum menikah tetapi punya tanggungan keluarga. Di Kota Payakumbuh Tahun 2024 jumlah kepala keluarga yang bekerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Tabel 30
Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin dan Pekerjaan di Kota Payakumbuh Tahun 2025

No	Status Pekerjaan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	Belum/Tidak Bekerja	396	1,07	225	2,34	621	1,33
2	Aparatur Pejabat Negara	3.240	8,73	368	3,83	3.608	7,72
3	Tenaga Pengajar	314	0,85	117	1,22	431	0,92
4	Wiraswasta	25.527	68,76	1.225	12,76	26.752	57,25
5	Pertanian/Peternakan	6.011	16,19	204	2,13	6.215	13,30
6	Nelayan	12	0,03	1	0,01	13	0,03
7	Agama dan Kepercayaan	25	0,07	0	0,00	25	0,05
8	Pelajar/Mahasiswa	162	0,44	123	1,28	285	0,61
9	Tenaga Kesehatan	70	0,19	23	0,24	93	0,20
10	Pensiunan	1.364	3,67	522	5,44	1.886	4,04
11	Lainnya	6	0,02	6.791	70,75	6.797	14,55
Jumlah		37.127	79,46	9.599	20,54	46.726	100

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Payakumbuh

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Tahun 2025, sebagian besar kepala keluarga bekerja sebagai wiraswasta, yaitu sebanyak 26.752 orang atau 57,25 persen dari seluruh kepala keluarga. Kelompok ini terdiri atas 25.527 kepala keluarga laki-laki (68,76 persen) dan 1.225 kepala keluarga perempuan (12,76 persen). Tingginya proporsi kepala keluarga laki-laki yang bekerja sebagai wiraswasta menunjukkan bahwa sektor usaha mandiri masih menjadi sumber mata pencaharian utama bagi sebagian besar rumah tangga di Kota Payakumbuh.

Pekerjaan terbesar berikutnya adalah sektor pertanian dan peternakan, yang mencakup 6.215 kepala keluarga (13,30 persen). Pada sektor ini, kepala keluarga laki-laki mencapai 6.011 orang (16,19 persen), sedangkan kepala keluarga perempuan hanya 204 orang (2,13 persen). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di sektor primer masih didominasi oleh laki-laki, yang umumnya memiliki akses lebih besar terhadap lahan, modal usaha, maupun pekerjaan yang membutuhkan aktivitas fisik.

Di sektor formal, terdapat 3.608 kepala keluarga (7,72 persen) yang bekerja sebagai aparatur pejabat negara, terdiri atas 3.240 laki-laki dan 368 perempuan. Sementara itu, pada profesi tenaga pengajar dan tenaga kesehatan, proporsi kepala keluarga perempuan relatif lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kepala keluarga perempuan yang bekerja sebagai tenaga pengajar mencapai 1,22 persen, lebih tinggi dibandingkan laki-laki (0,85 persen). Demikian pula pada tenaga kesehatan, proporsi perempuan sebesar 0,24 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki (0,19 persen). Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan masih cenderung terkonsentrasi pada profesi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Data juga menunjukkan bahwa proporsi kepala keluarga perempuan yang belum atau tidak bekerja mencapai 2,34 persen, lebih tinggi dibandingkan kepala keluarga laki-laki yang sebesar 1,07 persen. Selain itu, kepala keluarga perempuan yang berstatus pensiunan juga memiliki proporsi lebih tinggi (5,44

persen) dibandingkan laki-laki (3,67 persen). Kondisi ini mencerminkan bahwa sebagian kepala keluarga perempuan berasal dari kelompok usia lanjut atau merupakan perempuan yang mengambil alih peran sebagai kepala keluarga setelah memasuki masa pensiun atau setelah kehilangan pasangan.

Hal yang perlu mendapat perhatian adalah besarnya jumlah kepala keluarga perempuan pada kategori "Lainnya", yaitu sebanyak 6.791 orang atau 70,75 persen dari seluruh kepala keluarga perempuan. Besarnya proporsi pada kategori ini mengindikasikan bahwa masih banyak pekerjaan kepala keluarga perempuan yang belum teridentifikasi secara spesifik dalam klasifikasi administrasi kependudukan. Kategori tersebut dapat mencakup berbagai aktivitas, seperti pekerjaan informal, pekerjaan domestik yang tidak tercatat sebagai kegiatan ekonomi, usaha keluarga, maupun pekerjaan lainnya yang belum diklasifikasikan secara rinci. Oleh karena itu, interpretasi terhadap kategori ini perlu dilakukan secara hati-hati karena tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ketenagakerjaan perempuan secara aktual.

Secara umum, data menunjukkan adanya perbedaan karakteristik pekerjaan antara kepala keluarga laki-laki dan perempuan. Kepala keluarga laki-laki lebih banyak bekerja pada sektor usaha mandiri, pertanian, dan jabatan pemerintahan, sedangkan kepala keluarga perempuan lebih banyak berada pada kategori pekerjaan yang belum terklasifikasi serta memiliki proporsi yang relatif lebih tinggi pada profesi pendidikan dan

kesehatan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kesempatan kerja dan jenis pekerjaan yang diakses perempuan masih dipengaruhi oleh pembagian peran gender, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, serta kondisi sosial ekonomi rumah tangga.

Dari perspektif pembangunan gender, kondisi tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan akses perempuan terhadap kesempatan kerja yang produktif, layak, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu terus memperkuat program pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan keterampilan, pengembangan kewirausahaan, perluasan akses permodalan, pendampingan usaha mikro dan kecil, serta peningkatan kompetensi kerja agar perempuan, khususnya kepala keluarga perempuan, memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Informasi mengenai pekerjaan kepala keluarga menurut jenis kelamin merupakan salah satu indikator penting dalam penyusunan Profil Gender Kota Payakumbuh karena memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi rumah tangga dan akses laki-laki serta perempuan terhadap lapangan pekerjaan. Hasil analisis ini diharapkan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih responsif gender, terutama dalam upaya meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan, mengurangi kesenjangan kesempatan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi keluarga di Kota Payakumbuh.

8.1 Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih menjadi tantangan dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kekerasan yang dialami perempuan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, yang terjadi di lingkungan rumah tangga, tempat kerja, ruang publik, maupun media digital. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental korban, tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup, produktivitas, serta partisipasi perempuan dalam pembangunan.

Perempuan memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap tindak kekerasan akibat adanya ketimpangan relasi gender, norma sosial, serta faktor ekonomi dan budaya yang masih menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan. Oleh karena itu, penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan hak asasi manusia dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan Profil Gender menjadi salah satu instrumen penting untuk menggambarkan kondisi perempuan secara komprehensif, termasuk dalam aspek perlindungan perempuan dari tindak kekerasan. Data dan informasi mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan diperlukan untuk mengetahui besaran permasalahan, karakteristik korban, serta cakupan layanan perlindungan yang tersedia. Informasi tersebut dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, penyusunan program, serta pengambilan keputusan yang responsif gender guna meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan perempuan.

Selain itu, penyajian data mengenai perempuan dan kekerasan dalam Profil Gender diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai pentingnya pencegahan serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Dengan tersedianya data yang akurat dan berkelanjutan, diharapkan tercipta lingkungan yang aman, setara, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, sehingga perempuan dapat berpartisipasi secara optimal dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Dengan demikian, kajian mengenai perempuan dan kekerasan dalam Buku Profil Gender memiliki peran strategis sebagai dasar dalam mengidentifikasi permasalahan, mengevaluasi upaya perlindungan yang telah dilakukan, serta mendorong terwujudnya pembangunan yang berperspektif gender dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

8.2 Definisi Konseptual

8.2.1 Kekerasan

Dalam pasal 1 Undang-undang PTPPO, kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Ancaman kekerasan termasuk salah satu bentuk kekerasan. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, ancaman kekerasan didefinisikan sebagai setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan dapat berdasarkan jenis, tempat kejadian, dan hubungan pelaku-korban. Berdasarkan jenisnya, kekerasan dapat dikategorikan sebagai kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Akan tetapi, dalam undang-undang yang lain dijumpai kategori jenis kekerasan selain empat varian tersebut, yaitu

eksploitasi, eksploitasi seksual, dan bentuk kekerasan lainnya, seperti ancaman kekerasan dan pemaksaan. Berdasarkan tempat kejadian, kekerasan dapat dibagi dalam dua tempat kejadian, yaitu di dalam rumah tangga dan di ruang publik. Kekerasan di ruang publik bisa terjadi di sekolah, kampus, rumah sakit, tempat perbelanjaan, terminal, pasar, kantor, dan lainnya.

Praktik kekerasan selalu melibatkan minimal dua orang, dimana satu menjadi korban dan satu menjadi pelaku, meskipun dimungkinkan pelaku atau korban berjumlah lebih dari satu. Hubungan antara pelaku dan korban dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu hubungan dalam relasi perkawinan (suami dan istri), hubungan keluarga (orang tua-anak, saudara, paman-ponakan, nenek/kakek-cucu, menantu-mertua, dan sebagainya), hubungan personal (pacar, sahabat, teman), dan hubungan lain karena pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan atau lainnya.

8.2.2 Jenis Kekerasan

Terdapat setidaknya 3 undang-undang yang dapat dirujuk dalam mengkategorikan jenis kekerasan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Berikut ini jenis-jenis kekerasan dan penjelasannya:

- a. Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6 UU PKDRT);
- b. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 UU PKDRT);
- c. Kekerasan Seksual adalah perbuatan yang terkait (namun tidak terbatas pada) hal-hal berikut:
 - 1) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan/atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain, untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8 UU PKDRT).
 - 2) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia (Pasal 285 KUHP).
 - 3) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul (Pasal 289 KUHP).
- d. Penelantaran adalah perbuatan yang terkait namun tidak terbatas pada penjelasan berikut:
 - 1) tindakan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut (Pasal 9 UU PKDRT).

- 2) tindakan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut (Pasal 9 UU PKDRT).
- 3) tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut (Pasal 9 UU PKDRT).
- e. Eksploitasi adalah perbuatan yang meliputi namun tidak terbatas pada tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. (pasal 1 UU PTPPO)
- f. Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan (Pasal 1 UU PTPPO dan Pasal 4 UU Pornografi).
- g. Kekerasan lainnya, yaitu perbuatan yang meliputi tapi tidak terbatas pada hal berikut ini:

- 1) ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang (Pasal 1 UU PTPPO).
- 2) pemaksaan adalah suatu keadaan di mana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri (Penjelasan Pasal 18 UU PTPPO).

8.2.3 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 mendefinisikan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. UU ini menggunakan istilah 'penghapusan' dengan maksud bahwa negara berkewajiban melakukan upaya pencegahan terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, melakukan penindakan pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga meliputi para pihak berikut ini:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dalam UU PKDRT, kekerasan dibagi dalam 4 kategori dengan penjelasan berikut ini:

- a. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang
- c. Kekerasan seksual adalah:
 - 1) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
 - 2) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran rumah tangga yaitu perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Dalam penjelasan tentang penelantaran, termasuk kategori penelantaran adalah

perbuatan yang mengakibatkan seseorang berada dalam kondisi ketergantungan ekonomi dan membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

8.2.4 Perdagangan Orang

Pasal 1 UU PTPPO mendefinisikan Perdagangan Orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

UU ini memberikan perlindungan kepada korban, pelapor, dan saksi di dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Beberapa perlindungan yang dapat diberikan di antaranya adalah hak menyembunyikan identitas diri, mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan korban, didampingi oleh advokat atau pendamping lainnya, dan tidak memaksa kehadirannya di ruang sidang, namun dapat dilakukan dari jarak jauh dengan menggunakan audio visual (pasal 33-36 UU PTPPO).

8.2.5 Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindak kekerasan yang dialami perempuan dengan pelaku berjenis kelamin perempuan atau laki-laki. Kekerasan terhadap perempuan kerap terjadi karena adanya ketimpangan relasi antara pelaku dan korban, karena itulah kekerasan terhadap perempuan dapat disebut sebagai kekerasan berbasis gender. Kekerasan terhadap perempuan memosisikan perempuan sebagai korban dengan batas usia minimal 18 tahun ke atas atau perempuan dewasa. Kekerasan yang terjadi atau dialami perempuan (dan laki-laki) yang masih berusia di bawah 18 tahun disebut sebagai kekerasan terhadap anak.

8.2.6 Perlindungan

UU PKDRT pasal 1 menyebutkan bahwa Perlindungan merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Dalam upaya memberikan perlindungan, pemerintah telah memberikan layanan kepada korban melalui Komnas Perempuan dan KPPPA Kemen PPPA, yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan membentuk unit layanan dan penanganan kekerasan, seperti Women Crisis Center (WCC), Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Selain pemerintah, upaya perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap

perempuan juga dilakukan oleh masyarakat secara individu, LSM, organisasi profesi, organisasi keagamaan, dan Lembaga non pemerintah lainnya.

Pencatatan data kasus kekerasan dan jenis layanan yang terkompilasi dalam SIMPFONI PPA dengan penjelasan operasional berikut (Kemen PPPA, 2020):

- a. Penanganan Pengaduan: serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
- b. Pelayanan Kesehatan: upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- c. Rehabilitasi Sosial: pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- d. Penegakkan Hukum: tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- e. Bantuan Hukum: jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.
- f. Pemulangan: upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point, atau dari daerah penerima ke daerah asal.

g. Reintegrasi Sosial: upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau

8.2.7 Basis Periode dalam Simfoni PPA

Basis periode dalam Simfoni PPA dibagi menjadi dua yaitu menurut tanggal kejadian dan tanggal pelaporan. Pembagian tersebut dijelaskan sebagai berikut: a. Tanggal kejadian: Tanggal pada saat korban mengalami kekerasan b. Tanggal pelaporan: Tanggal pada saat korban menyampaikan laporannya kepada unit layanan. Jumlah data dengan menggunakan basis pelaporan lebih banyak dibandingkan dengan tanggal kejadian. Korban lebih cenderung melaporkan kasusnya tidak pada saat kejadian, dan ada kemungkinan beda tahun untuk pelaporannya. Sehingga tanggal pelaporan ini diperlukan oleh unit layanan untuk memperkirakan anggaran layanan terhadap korban yang dibutuhkan setiap tahunnya.

8.3 Pembahasan

8.3.1 Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan

Berbagai jenis kekerasan terhadap perempuan diantaranya adalah kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, trafficking dan penelantaran. Di Kota Payakumbuh Tahun 2025 jumlah korban kekerasan terhadap perempuan berdasarkan kekerasan yang dialami dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 31
Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan
Jenis Kekerasan yang Dialami di Kota Payakumbuh Tahun 2025

Bulan	Korban Fisik	Korban Psikis	Korban Seksual	Korban Eksploitasi	Korban Trafficking	Korban Penelantaran	Korban Lainnya
Januari	2	0	0	0	0	0	2
Februari	0	1	0	0	0	0	1
Maret	2	1	0	0	0	0	3
April	1	0	0	0	0	0	1
Mei	2	0	0	0	0	0	2
Juni	1	0	0	0	0	0	1
Juli	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0	0	0
September	5	1	0	0	0	0	6
Oktober	0	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	13	3	0	0	0	0	16

Sumber : Simfoni PPA Tahun 2025

Berdasarkan data SIMFONI PPA Tahun 2025, tercatat sebanyak 16 kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Payakumbuh. Dari berbagai jenis kekerasan yang dialami korban, kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang paling dominan dengan jumlah 13 korban atau sekitar 81,25 persen dari seluruh kasus yang tercatat. Sementara itu, kekerasan psikis tercatat sebanyak 3 korban atau sekitar 18,75 persen. Pada tahun 2025 tidak ditemukan kasus kekerasan seksual, eksploitasi, perdagangan orang (trafficking), maupun penelantaran yang dilaporkan melalui sistem SIMFONI PPA.

Jika dilihat berdasarkan waktu kejadian, kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi hampir sepanjang semester pertama tahun 2025, dengan jumlah kasus tertinggi terjadi pada bulan September, yaitu sebanyak 6 korban, terdiri dari 5 korban kekerasan fisik dan 1 korban kekerasan psikis. Sementara itu,

pada bulan Januari dan Maret masing-masing tercatat sebanyak 2 korban kekerasan fisik dan 1 korban lainnya, sehingga jumlah korban pada kedua bulan tersebut mencapai 2 dan 3 orang. Pada bulan Juli, Agustus, Oktober, November, dan Desember tidak terdapat laporan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Dominannya kasus kekerasan fisik menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai bentuk kekerasan yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan mereka. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat, penguatan ketahanan keluarga, peningkatan kesadaran mengenai kesetaraan gender, serta penguatan layanan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, organisasi masyarakat, dan keluarga sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan terhadap perempuan.

Data ini juga menjadi salah satu indikator penting dalam penyusunan Profil Gender Kota Payakumbuh Tahun 2026, karena memberikan gambaran mengenai tingkat kerentanan perempuan terhadap tindak kekerasan serta menjadi dasar dalam perencanaan program perlindungan perempuan yang lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan. Meskipun jumlah kasus yang tercatat relatif tidak banyak, fenomena kekerasan terhadap perempuan perlu mendapat perhatian serius mengingat masih adanya kemungkinan kasus yang belum dilaporkan (*underreporting*) akibat berbagai faktor, seperti stigma sosial,

rasa takut, maupun keterbatasan akses terhadap layanan pengaduan dan pendampingan.

8.3.2 Layanan Korban Kekerasan

Layanan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dilakukan sesuai kebutuhan korban yang terdiri dari penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, penegakan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, pemulangan dan pendampingan. Di Kota Payakumbuh Tahun 2024 jumlah korban kekerasan terhadap perempuan berdasarkan jumlah layanan yang diterima dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 32
Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Jumlah Layanan yang Diterima di Kota Payakumbuh Tahun 2025

Bulan	1 Layanan	2 Layanan	3 Layanan	4 Layanan	5 Layanan
Januari	2	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0
Maret	3	0	0	0	0
April	1	0	0	0	0
Mei	2	0	0	0	0
Juni	1	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0
September	6	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0
Jumlah	13	0	0	0	0

Sumber : Simfoni PPA Tahun 2025

Berdasarkan data SIMFONI PPA Tahun 2025, tercatat sebanyak 13 korban kekerasan terhadap perempuan di Kota Payakumbuh yang memperoleh layanan penanganan. Seluruh korban yang tercatat tersebut memperoleh 1 jenis layanan, sedangkan tidak terdapat korban yang menerima 2 layanan atau

lebih. Dengan demikian, sebanyak 100 persen korban yang mendapatkan layanan hanya memperoleh satu jenis layanan.

Ditinjau berdasarkan bulan kejadian, jumlah korban yang menerima layanan tertinggi terjadi pada bulan September, yaitu sebanyak 6 korban, diikuti bulan Maret sebanyak 3 korban, serta bulan Januari dan Mei masing-masing sebanyak **2** korban. Sementara itu, pada bulan April dan Juni masing-masing terdapat 1 korban yang menerima layanan. Tidak terdapat korban yang menerima layanan pada bulan Februari, Juli, Agustus, Oktober, November, dan Desember.

Data tersebut menunjukkan bahwa seluruh korban kekerasan terhadap perempuan yang tercatat telah memperoleh akses terhadap layanan penanganan. Namun, masih terbatasnya jumlah layanan yang diterima oleh masing-masing korban mengindikasikan bahwa penanganan yang diberikan masih bersifat tunggal atau disesuaikan dengan kebutuhan korban pada saat pelaporan. Padahal, korban kekerasan pada umumnya memerlukan penanganan yang bersifat komprehensif dan terintegrasi, meliputi layanan pengaduan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga pemberdayaan ekonomi.

Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan koordinasi dan integrasi layanan perlindungan perempuan melalui berbagai pemangku kepentingan, seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), fasilitas

kesehatan, kepolisian, lembaga bantuan hukum, serta instansi terkait lainnya. Penyediaan layanan yang lebih menyeluruh diharapkan dapat membantu proses pemulihan korban secara optimal serta mencegah terjadinya kekerasan berulang.

Dalam konteks penyusunan Profil Gender Kota Payakumbuh Tahun 2026, informasi mengenai layanan yang diterima korban kekerasan terhadap perempuan menjadi bagian penting dalam mengukur kualitas akses dan respons sistem perlindungan perempuan. Selain itu, data ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas layanan, memperkuat mekanisme rujukan, serta memastikan bahwa setiap perempuan korban kekerasan memperoleh perlindungan dan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak-haknya.